



UNIVERSITAS PERTAHANAN INDONESIA

**ANALISIS PERAN SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN TNI AD
DI SIDOARJO SEBAGAI UNSUR PERTAHANAN UDARA PASIF
DALAM RANGKA Mendukung OPERASI PERTAHANAN
UDARA NASIONAL**

TESIS

**HARI PURNOMO
NIM. 120170109018**

**FAKULTAS STRATEGI PERTAHANAN
PRODI STRATEGI PERTAHANAN UDARA**

**BOGOR
NOVEMBER 2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Hari Purnomo
NIM : 120170109018
Program Studi : Strategi Pertahanan Udara
Judul Tesis : Analisis Peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD
di Sidoarjo Sebagai Unsur Pertahanan Udara Pasif
Dalam Rangka Mendukung Operasi Pertahanan Udara
Nasional

Tesis dengan judul dan atas nama mahasiswa tersebut diatas telah disetujui untuk dapat diujikan, sebagai bagian dari persyaratan penulisan Tesis untuk memperoleh gelar Magister Terapan bidang Ilmu Pertahanan pada Program Studi Strategi Pertahanan Udara, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Pembimbing I : Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng (.....)

Pembimbing II : Kolonel Pnb Oka Prawira, M.Si (Han) (.....)

Bogor, Oktober 2017

Mengetahui
Dekan Fakultas Strategi Pertahanan,

Dr. Tri Legionosuko, S.IP., M.AP
Mayor Jenderal TNI

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau bagian karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan jenjang apapun di suatu Perguruan Tinggi; dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat istilah, frasa, kalimat, paragraf, subbab atau bab dari karya yang pernah ditulis atau diterbitkan; kecuali yang secara tertulis diujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa terdapat plagiat dalam tesis ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Bogor, November 2017

Hari Purnomo

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pertahanan Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hari Purnomo
NIM : 120170109018
Program Studi : Strategi Pertahanan Udara
Fakultas : Strategi Pertahanan
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pertahanan Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya berjudul :

ANALISIS PERAN SATUAN KOMANDO KEWILAYAHAN TNI AD DI SIDOARJO
SEBAGAI UNSUR PERTAHANAN UDARA PASIF DALAM RANGKA Mendukung
OPERASI PERTAHANAN UDARA NASIONAL

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pertahanan Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta/Karya Intelektual dari tesis ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari pihak manapun

Bogor, November 2017

Hari Purnomo

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyandang gelar Magister dalam bidang Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan berbagai pihak, tidak mudah untuk merampungkan tesis ini. Oleh sebab itu, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Letnan Jenderal TNI Dr. I Wayan Midhio, M.Phil selaku Rektor Universitas Pertahanan.
- (2) Prof. Dr. Ir. Dadang Gunawan, M.Eng selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Kemahasiswaan Unhan dan selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (3) Mayjen TNI Dr. Tri Legionasuko, S.IP., M.AP selaku Dekan Fakultas Strategi Pertahanan Unhan.
- (4) Kolonel Pas Dr. Drs. Marsono, M.Si, selaku Kaprodi SPU yang senantiasa mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan tesis ini.
- (5) Kolonel Pnb Oka Prawira, M.Si (Han), selaku dosen pembimbing II yang juga telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran serta dorongan semangat dalam penyusunan tesis ini.
- (6) Kolonel Arh M. Hasyim Laihakim, S.E., M.M sebagai Assus Matra Darat Kohanudnas, selaku narasumber yang telah menyediakan waktu dan pikiran dalam penyusunan tesis ini.

- (7) Letkol Inf Fadli Mulyono sebagai Dandim 0816/SDA, Kapten Inf Kabul Tarmanto, Kapten Arh Bambang Suryono dan Serda Purwanto serta segenap personel kodim 0816/Sidoarjo yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan untuk penelitian ini.
- (8) Dewan Penguji baik Proposal maupun Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Pertahanan.
- (9) Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
- (10) Ucapan terima kasih yang paling utama kepada orang tua, istri tercinta Dhana Dwiferina, S.E dan anak-anakku Aura Shafa Athira, Afra Thoriq Putera Purnomo, Tania Puteri Terentia, Gilang Putera Purnomo dan Farza Ameera Dewi yang dengan setia menyertai penulis selama dalam penyusunan tesis ini dan tidak pernah putus dalam berdoa memohon kesuksesan dan kelancaran untuk penulis.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Bogor, November 2017

Hari Purnomo

ABSTRAK

Nama : Hari Purnomo
NIM : 120170109018
Program Studi : Strategi Pertahanan Udara
Judul Tesis : *Analisis Peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di Sidoarjo Sebagai Unsur Pertahanan Udara Pasif Dalam Rangka Mendukung Operasi Pertahanan Udara Nasional*

Satuan Komando Kewilayahan TNI AD merupakan salah satu unsur sekaligus koordinator di dalam Operasi Pertahanan Udara Pasif yang digelar pada tempat-tempat yang bernilai strategis seperti pada pusat-pusat pemerintahan, industri strategis, instansi militer dan pemukiman penduduk untuk mencegah, membatasi, menanggulangi, dan mengurangi kerugian akibat serangan udara musuh di daerah kewenangannya masing-masing. Namun demikian, masih banyak permasalahan yang menyebabkan peran akan tugas tersebut belum dilaksanakan. Tesis ini berusaha menjawab sejauh mana peran Satkowil TNI AD di Kabupaten Sidoarjo, peluang dan kendala yang dihadapi serta strategi apa yang dapat dilakukan guna melaksanakan peran akan tugas Hanud pasif dalam rangka mendukung Opshanudnas. Penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat secara teoritis untuk pengembangan Ilmu Strategi Pertahanan Udara dan sebagai kajian lanjutan maupun kajian informasi serta manfaat secara praktis sebagai masukan bagi Komando Atas dalam pengambilan Kebijakan. Teori peran dan teori perilaku organisasi digunakan sebagai pisau analisis. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan data-data untuk mendukung penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data dalam tesis ini dipilih secara *purposive* dengan subyek adalah unsur-unsur Kodim 0816/SDA dan sebagai obyek penelitian adalah satuan Kodim 0816/SDA. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang dilanjutkan dengan melaksanakan pengujian keabsahan data. Data penelitian dan hasil analisis data digunakan sebagai bahan pembahasan guna menjawab semua permasalahan yang terjadi secara komprehensif dengan memperhatikan landasan teori, kekuatan dan kelemahan yang ada. Hal-hal penting yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diangkat sekaligus masukan bagi satuan atas akan diuraikan pada kesimpulan dan saran.

Kata kunci : *Satuan Komando Kewilayahan TNI AD, Pertahanan Udara Pasif, Operasi Pertahanan Udara Nasional.*

ABSTRACT

Name : Hari Purnomo
NIM : 120170109018
Study Program : Air Defense Strategy
Thesis Title : Analysis of the Role of the Army Regional Command Unit in Sidoarjo as a Passive Air Defense Element In Order To Support National Air Defense Operations

The Army Regional Command Unit is one of the elements as well as the coordinator in the Passive Air Defense Operations deployed at strategically valued places such as government centers, strategic industries, military agencies and human settlements to prevent, limit, tackle and reduce losses due to enemy air strikes in their respective areas of authority. Nevertheless, there are still many problems occurred that caused the afore mentioned role has not been implemented. This thesis attempts to answer how far the role of Satkowil TNI AD located in Sidoarjo Regency in this case Military District Command (Kodim) 0816 / Sidoarjo, the opportunities and constraints faced as well as strategies that can be undertaken to carry out the role of passive air defense tasks in order to support National Air Defense Operation. The author hopes that this thesis can provide the oretical benefits in the development of Air Defense Strategy Science as well as practical benefits that be used by the higher command to deepen their understanding and to make the right policy decisions. The role theory and organizational behavior theory as analysis tools. Research method in this thesis is qualitative with approach of data to support research which is descriptive analysis. The data source in this thesis was chosen purposively with the subjecks are elements of Kodim 0816/SDA and as research object is Kodim 0816/SDA unit. Data collection technique is done by series of interviews and documentation study, while data analysis technique is done by data reduction, data display and conclusion followed by conducting validity test of data. Research data and data analysis results are used as a discussion material to answer all problems that occur comprehensively by considering basic theories, strengths and weaknesses that exist. Important matters and findings in which the answers to the formulation of the issues raised as well as inputs for the above mentioned units will be described in conclusions and suggestions.

Keywords : The Army Regional Command Unit, Passive Air Defense, National Air Defense Operation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
DAFTAR ISTILAH.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	6
1.3.2 Signifikansi Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2 Manfaat Praktis	8
1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian.....	8
1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
1.5.2 Gambaran Desain Penelitian.....	9
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
2.1 Tinjauan Pustaka..	11
2.1.1 Teori Peran.....	11
2.1.1.1 Peran Tentara Nasional Indonesia Secara Umum.....	14
2.1.1.2 Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.....	17

2.1.1.3 Peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD.....	19
2.1.1.3.1 Tahap Persiapan.....	20
2.1.1.3.2 Tahap Pelaksanaan Kegiatan.....	23
2.1.1.3.3 Tahap Pengakhiran Kegiatan.....	24
2.1.2 Petahanan Negara.....	25
2.1.3 Unsur Pertahanan Udara Pasif.....	28
2.1.4 Hukum Udara.....	28
2.1.5 Operasi Pertahanan Udara Nasional.....	29
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Pemikiran.....	37

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian	40
3.2 Sumber Data, Subyek dan Obyek Penelitian.....	42
3.2.1 Sumber Data.....	42
3.2.2 Subyek Penelitian.....	44
3.2.3 Obyek Penelitian.....	45
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.3.1 Wawancara.....	46
3.3.2 Dokumen.....	50
3.4 Teknik Analisis Data.....	51
3.5 Prosedur Penelitian.....	54
3.5.1 Instrumen Penelitian.....	54
3.5.2 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data.....	55
3.6 Definisi Operasional.....	57
3.7 Jadwal Kegiatan.....	60

BAB 4 ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian.....	61
4.1.1 Profil Komando Distrik Militer/0816/SDA.....	62
4.1.2 Tugas dan Kewajiban Perwira Staf Operasi.....	67
4.1.3 Tugas dan Kewajiban Perwira Staf Teritorial.....	67
4.1.4 Struktur Organisasi Kodim 0816/SDA.....	68
4.1.5 Struktur Organisasi Staf Operasi Kodim 0816/SDA.....	71
4.1.6 Struktur Organisasi Staf Teritorial Kodim 0816/SDA.....	72

4.1.7	Struktur Organisasi dan Tugas Kosekhanudnas.....	73
4.1.8	Susunan Organisasi, Tugas Tanggung Jawab	76
4.1.9	Gambaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.....	77
4.2.	Analisis Data.....	78
4.2.1	Analisis Peran Kodim.....	78
4.2.2	Analisis Peluang dan Kendala Kodim.....	82
4.2.3	Analisis Strategi atau Upaya Kodim.....	88
4.3	Pembahasan.....	90
4.3.1	Peran Kodim.....	90
4.3.2	Peluang dan Kendala Kodim.....	97
4.3.3	Strategi atau Upaya.....	102
BAB 5	SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan.....	109
5.2	Saran.....	112
5.2.1	Saran Teoritis.....	112
5.2.2	Saran Praktis.....	113
5.2.2.1	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	113
5.2.2.2	Mabes TNI dan Kohanudnas.....	113
5.2.2.3	Mabes TNI AD.....	113
	DAFTAR PUSTAKA.....	115
LAMPIRAN	1.1 Surat Ijin Penelitian.....	121
	1.2 Panduan Wawancara.....	124
	1.3 Transkrip Wawancara.....	130
	1.4 Dokumentasi Wawancara.....	143
	1.5 Format Protap Bahaya Udara.....	149
	1.6 Format Isi Laporan Kesiapan.....	161
	1.7 Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan.....	162
	1.8 Data Obyek Vital.....	163
	1.9 Data Riwayat Hidup.....	167

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Identifikasi Masalah.....	10
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Unsur Hanud Pasif.....	21
Gambar 2.2	Struktur Orgaisasi Hanud Pasif Aspek Darat.....	25
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 3.1	Alur Metode Penelitian.....	42
Gambar 3.2	Bagan Teknik Analisis Data Model Interaktif.....	53
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Komando Distrik Militer.....	69
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Staf Operasi Kodim 0816/SDA.....	71
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Staf Teritorial Kodim 0816/SDA.....	72
Gambar 4.4	Struktur Organisasi Kosek Hanudnas.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1	Jadwal Kegiatan.....	60

DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
NKRI	Negara Kesatuan Republik Indonesia	1
TNI	Tentara Nasional Indonesia	2
RI	Republik Indonesia	2
Kohanudnas	Komando Pertahanan Udara Nasional	2
Protap	Prosedur Tetap	2
Opshanud	Operasi Pertahanan Udara	2
TNI AD	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat	3
TNI AL	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut	4
TNI AU	Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara	4
Posko	Pos Komando	5
Satkowil	Satuan Komando Kewilayahan	5
Kodim	Komando Distrik Militer	5
Sishanta	Sistem Pertahanan Semesta	18
RAK Juang	Ruang Alat Kondisi Juang	19
Binter	Pembinaan Teritorial	19
DAN UNSUR	Komandan Unsur	21
BALAKSAT	Badan Pelaksana Satuan	21
SATGAS	Satuan Tugas	21
DANSATGAS	Komandan Satuan Tugas	21
PEN	Penerangan	21
KAMTIBMAS	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	21
SAR	<i>Search and Rescue</i>	21
PLN	Perusahaan Listrik Negara	24
Danposko	Komandan Pos Komando	24
Pemda	Pemerintah Daerah	24
Posekhanudnas	Pos Komando Sektor Hanudnas	24
DANPUSKOR	Komandan Pusat Koordinator	25

DANSUBKOR HP	Komandan Sub Koordinator Hanud Pasif	25
PAKOR OV	Perwira Koordinator Obyek Vital	25
SIE	Seksi	25
PUSPRING	Pusat Peringatan	25
URDAL	Urusan Dalam	25
RAH GA & ANG	Pengerahan Tenaga dan Angkutan	25
Pangkosek	Panglima Komando Sektor	25
Kemenhan	Kementerian Pertahanan	27
SDA	Sumber Daya Alam	27
SDM	Sumber Daya Manusia	27
SDAB	Sumber Daya Alam Buatan	27
Kotamaops	Komando Utama Operasi	29
Pusdik Arhanud	Pusat Pendidikan Arhanud	30
OMP	Operasi Militer Perang	30
OMSP	Operasi Militer Selain Perang	30
SDA	Sidoarjo	39
Assus	Asisten Khusus	42
OPR COMP	Operator Komputer	71
TURYAN	Pengatur dan Pelayan	71
PUANTER	Kemampuan Teritorial	72
WANWIL	Perlawanan Wilayah	72
KOMSOS	Komunikasi Sosial	72
Dansatkwil	Komandan Satuan Komando Kewilayahan	76
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	81
Forkopimda	Forum Komunikasi Pimpinan Daerah	83
Pusdiklat	Pusat Pendidikan dan Latihan	83
Proja	Program Kerja	85
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah	86
Arhanud	Artileri Pertahanan Udara	89
Bujuknis	Buku Petunjuk Teknis	90
Lemhanas	Lembaga Ketahanan Nasional	97
Sesko	Sekolah Staf dan Komando	97

DAFTAR ISTILAH

ISTILAH	Nama	Pemakaian pertama kali pada halaman
Hibrida	Penggabungan ancaman militer Dan non-militer	1
<i>Defense in Depth</i>	Pertahanan Berlapis	2
Komcad	Warga negara, SDA, SDB, sarana dan pra- sarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan guna memperkuat komponen utama	3
Komduk	Warga negara, SDA, SDB, sarana dan pra- sarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan	3
Impersonal	Tidak bersifat pribadi, tidak berkaitan/tidak Mengenai seseorang	13
Adaptabilitas	Kemampuan Beradaptasi	65
Kontinjensi	suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi mungkin juga tidak akan terjadi	75
Interoperabilitas	kapabilitas dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepe- nuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Surat Ijin Penelitian	121
Lampiran 1.2 Panduan Wawancara.....	124
Lampiran 1.3 Transkrip Wawancara.....	130
Lampiran 1.4 Dokumentasi Wawancara.....	143
Lampiran 1.5 Format Protap Bahaya Udara.....	149
Lampiran 1.6 Format Isi Laporan Kesiapan.....	161
Lampiran 1.7 Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan.....	162
Lampiran 1.8 Data Obyek Vital.....	163
Lampiran 1.9 Data Riwayat Hidup.....	167

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pertahanan negara dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan dan konteks strategis baik global, regional maupun nasional. Perkembangan lingkungan strategis berpengaruh terhadap dinamika ancaman, tantangan, risiko, dan peluang bagi kepentingan nasional. Sementara konteks strategis yang bersifat dinamis akan semakin memperluas bentuk, sumber, sifat, dan dimensi ancaman, tantangan serta risiko. Esensi dari analisis terhadap perkembangan lingkungan dan konteks strategis menentukan kemungkinan atau perkiraan ancaman, tantangan, dan risiko terhadap pertahanan negara. Kemungkinan ancaman, tantangan dan risiko tersebut dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam pemilihan strategi pertahanan negara. Lingkungan strategis juga memberikan peluang bagi kepentingan nasional untuk menjaga tetap tegaknya NKRI dan terjaminnya kelancaran pembangunan nasional (Kemenhan, Buku Putih Pertahanan, 2015).

Pertahanan negara diselenggarakan untuk mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Identifikasi ancaman dari luar dan dalam negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa, merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara. Upaya pertahanan negara diselenggarakan untuk mencegah dan mengatasi ancaman yang berbentuk ancaman militer dan non-militer maupun penggabungan dari keduanya yang disebut ancaman hibrida baik berupa ancaman nyata maupun belum nyata. Setiap bentuk ancaman memiliki karakteristik serta tingkat risiko berbeda yang mempengaruhi pola penanganannya, sehingga perlu dicermati hal-hal yang berhubungan dengan penilaian,

penggolongan, sasaran dan eskalasi ancaman (Kemenhan, Buku Doktrin Pertahanan Negara, 2015).

Undang-undang RI Nomor 34 (2004:7), Tugas pokok TNI adalah Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, dimana TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara tentunya harus dapat menangkal setiap ancaman yang akan timbul.

Operasi Pertahanan Udara pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk menghadapi setiap ancaman yang menggunakan media udara guna menegakkan kedaulatan wilayah udara nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur-unsur TNI dan sipil yang mempunyai kemampuan pertahanan udara serta harus dilaksanakan secara terus menerus agar setiap ancaman udara yang muncul dapat terdeteksi dan diantisipasi sedini mungkin karena dapat muncul setiap saat (Kohanudnas, Protap Opshanud, 2015). Operasi Pertahanan Udara nasional pada dasarnya menggunakan konsep "*Defense In Depth*" atau pertahanan berlapis, dimana konsep tersebut diaplikasikan dengan kondisi riil NKRI yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang mempunyai 17.508 buah pulau (Suradinata, 2005) serta memiliki obyek vital yang harus dilindungi berada tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Hal ini menuntut penerapan konsep Operasi Pertahanan Udara nasional "*Nusantara Defense In Depth*" secara sempurna (Kohanudnas, *Superior Air Defence System*, 2015).

Komponen pertahanan udara dalam Operasi Pertahanan Udara nasional terdiri atas unsur-unsur pertahanan udara aktif dan unsur pertahanan udara pasif yang pembinaannya dilaksanakan oleh induk organisasi masing masing. Unsur Hanud aktif terdiri dari, *pertama* : Radar Pertahanan Udara terdiri dari *Early Warning Radar (EW)*, *Early Warning -*

Ground Controlled Intercept Radar (GCI), Airborne Radar dan Gap Filler Mobile Radar (Portable Radar). Kedua : Pesawat Tempur Sergap, unsur ini digelar di pangkalan induk atau pangkalan operasi untuk melaksanakan identifikasi *visual* dan penindakan. *Ketiga* : Pesawat Penyergap *Low Speed*, unsur ini digelar di pangkalan induk atau pangkalan operasi untuk melaksanakan identifikasi *visual* dan penindakan khususnya pada pesawat dengan kecepatan dan ketinggian rendah.

Selanjutnya, *Keempat* : Rudal dan Meriam Hanud, unsur ini digunakan untuk melaksanakan penindakan terhadap sasaran/ancaman yang berhasil memasuki wilayah pertahanan udara yang mendekati obyek vital nasional serta sedapat mungkin mampu melindungi dan atau melumpuhkan serangan udara dari segala arah. *Kelima* : *Military Civil Coordination (MCC), military civil coordination* adalah satuan pelaksana Kosekhanudnas di suatu bandara udara yang secara struktural di bawah kewenangan Pangkosekhanudnas dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan operasi udara serta keselamatan penerbangan secara umum. *Keenam* : Kapal Republik Indonesia (KRI) Berkemampuan Pertahanan Udara, digelar pada lokasi yang dapat berfungsi sebagai *gap filler* radar dan atau untuk memperkuat perlindungan suatu obyek vital nasional terhadap serangan udara. *Ketujuh* : Pangkalan Udara (Lanud), pangkalan udara induk atau pangkalan udara operasional disiapkan untuk mendukung gelar unsur Tempur Sergap dan pesawat penyergap *low speed* dalam pelaksanaan operasi pertahanan udara di wilayahnya (Kohanudnas, Protap Opshanud, 2015).

Unsur Hanud pasif terdiri dari: Satuan Komando Kewilayahan TNI AD, bandara sipil, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), komponen cadangan (Komcad) dan komponen pendukung (Komduk). Dalam gelar komponen Operasi Pertahanan Udara, unsur pertahanan udara pasif digelar pada tempat-tempat yang bernilai strategis seperti pada pusat-pusat pemerintahan, industri strategis, instansi militer dan pemukiman penduduk untuk menghindari, mengurangi, dan menanggulangi akibat

serangan udara lawan/musuh (Kohanudnas, Protap Opshanud, 2015). Unsur pertahanan udara pasif yang merupakan komponen pelaksana kegiatan Operasi Pertahanan Udara (Opshanud) yang dipimpin oleh seorang Komandan Unsur yang bertanggung jawab kepada Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Pangkosekhanudnas) yang bertugas untuk mencegah, membatasi, menanggulangi, dan mengurangi efektivitas dari serangan udara (Serud) lawan yang ditujukan kepada obyek vital nasional sekaligus merupakan penanggulangan dan pengurangan kerugian yang diakibatkan oleh serangan udara tersebut.

Satuan Komando Kewilayahan TNI AD berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Prosedur Tetap Operasi Pertahanan Udara yang dikeluarkan oleh Komando Pertahanan Udara Nasional selain sebagai unsur juga sebagai koordinator pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara Pasif di wilayah kewenangannya. Hal ini tentunya menuntut peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang lebih di dalam mengkoordinir dan mengorganisir unsur-unsur Hanud pasif lainnya di daerah mengingat peran akan tugas ini sangat penting. Sidoarjo merupakan sebuah Kabupaten yang memiliki penduduk cukup padat dengan perkembangan pembangunan yang cukup pesat dibawah Jakarta. Kabupaten Sidoarjo juga memiliki banyak obyek-obyek rawan yang merupakan sasaran dari serangan udara. Bandar Udara Internasional, obyek-obyek vital dan instansi-instansi militer baik TNI AD, TNI AL dan TNI AU terdapat di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi tersebut tentunya memiliki kompleksitas permasalahan yang cukup besar dihadapkan dengan pertahanan udara pasif yang dapat mewakili daerah-daerah lainnya di Negara Indonesia. Namun fenomena yang terjadi saat ini, Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di Sidoarjo belum melaksanakan peran akan tugas-tugas yang berkaitan dengan mekanisme pertahanan udara pasif.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan oleh penulis, terdapat indikator-indikator yang menguatkan asumsi serta menunjukkan bahwa peran yang seharusnya dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan TNI AD sebagai unsur sekaligus koordinator pertahanan udara pasif belum dilaksanakan secara utuh dalam pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara nasional. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara Pasif “Sarang Petir-16” pada Triwulan III TA 2016 yang mengatakan bahwa belum adanya sarana komunikasi untuk Kodal antara Kosekhanudnas I, II, III dan IV Posko dengan obyek vital nasional yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun obyek vital nasional yang berada di Kabupaten Sidoarjo adalah PT Pabrik Kertas Tk. Dengan tidak terlibatnya Satkowl TNI AD khususnya Kodim 0816/SDA selaku koordinator unsur Hanud pasif mengindikasikan bahwa satuan tidak dapat melaksanakan peran akan tugasnya.

Dengan demikian, analisis peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di Sidoarjo dalam pertahanan udara pasif memerlukan suatu gagasan dan pemikiran inovatif yang mampu menerjemahkan ketentuan-ketentuan, referensi dan prosedur tetap tentang pertahanan udara pasif dengan sederhana, jelas dan mampu diaplikasikan oleh setiap unsur dalam Satuan Komando Kewilayahan TNI AD sehingga terwujud sinergitas dan interoperabilitas antar *stake holder* di wilayah dalam mendukung pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara nasional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tulisan tentang Analisis Peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di Sidoarjo Sebagai Unsur Hanud Pasif Dalam Rangka Mendukung Operasi Pertahanan Udara Nasional ini dirumuskan permasalahannya dan dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di Kabupaten Sidoarjo selaku unsur sekaligus koordinator seluruh *stake holder* unsur pertahanan udara pasif dalam pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara nasional ?
- 2 Apa peluang dan kendala yang dihadapi oleh satuan komando kewilayahan TNI AD di Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan perannya sebagai unsur sekaligus koordinator pertahanan udara pasif ?
- 3 Bagaimana strategi Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan perannya sebagai unsur sekaligus koordinator pertahanan udara pasif dalam Operasi Pertahanan Udara nasional ?

1.3 Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini ditentukan dari pertanyaan penelitian yang merupakan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti. Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

- 1 Menganalisis sejauh mana peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di Kabupaten Sidoarjo saat ini selaku unsur sekaligus koordinator seluruh *stake holder* unsur pertahanan udara pasif dalam pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara nasional;
- 2 Menganalisis peluang dan kendala yang dihadapi oleh satuan komando kewilayahan TNI AD di Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan perannya sebagai unsur sekaligus koordinator pertahanan udara pasif;

- 3 Menganalisis strategi Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur sekaligus koordinator pertahanan udara pasif dalam Operasi Pertahanan Udara nasional.

1.3.2 Signifikansi Penelitian

Signifikansi dari penelitian ini yaitu menjelaskan tentang pentingnya peran satuan komando kewilayahan TNI khususnya satuan setingkat Kodim yang berada di Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur pertahanan udara pasif sehingga dapat memaksimalkan pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara nasional guna menghindari, mengurangi, dan menanggulangi akibat serangan udara. Penelitian ini juga dapat dijadikan kajian informasi akademik yang dapat digunakan oleh seluruh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di Indonesia dalam mengoptimalkan perannya sebagai unsur sekaligus koordinator pelaksanaan pertahanan udara pasif.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat secara khusus baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menjadi masukan dalam mengembangkan ilmu Strategi Pertahanan Udara khususnya analisis dan penjelasan tentang bagaimana peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang harus dilakukan sebagai unsur sekaligus koordinator pertahanan udara pasif di daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan analisis tentang bagaimana mengoptimalkan peran tersebut sehingga terwujud Operasi Pertahanan Udara nasional yang komprehensif.

Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai kajian lanjutan dan kajian informasi serta memperkaya karya tulis tentang tugas Satuan

Komando Kewilayahan TNI AD sebagai unsur Hanud pasif dalam mendukung Operasi Pertahanan Udara nasional baik secara individu maupun institusi.

1.4.2 Praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis, sebagai berikut:

- 1 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pemerintah pusat yang dalam hal ini adalah Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian RI dan pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta pemerintah daerah di Sidoarjo khususnya tentang pentingnya koordinasi dan sinergisme seluruh *Stake Holder* dalam pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara nasional;
- 2 Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi TNI khususnya Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) selaku *leading sector* dalam pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara nasional khususnya Operasi Pertahanan Udara pasif dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman yang utuh kepada seluruh unsur-unsur yang terlibat operasi;
- 3 Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi TNI AD dalam mengoptimalkan peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD khususnya keterlibatan Kodim sebagai unsur pertahanan udara pasif dalam pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara nasional.

1.5 Ruang Lingkup dan Gambaran Desain Penelitian

1.5.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada **tugas** Satuan Komando Kewilayahan TNI AD khususnya satuan setingkat Komando Distrik Militer

(Kodim) di Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur pertahanan udara pasif dalam rangka mendukung Operasi Pertahanan Udara nasional dalam kurun waktu 2014 s.d 2017. Penulisan pada tesis ini terdiri dari beberapa bab, masing-masing bab akan menjelaskan secara rinci dan memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat dalam penyusunannya.

1.5.2 Gambaran Desain Penelitian

Gambaran desain penelitian tentang analisis peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD setingkat Kodim di Sidoarjo sebagai unsur pertahanan udara pasif, digambarkan dengan penelitian kualitatif melalui identifikasi sejauh mana peran, peluang dan kendala atau hambatan yang dihadapi, serta strategi apa yang dapat dilakukan oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD khususnya Kodim yang berada di Kabupaten Sidoarjo sebagai unsur sekaligus koordinator pertahanan udara pasif dalam mendukung pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara nasional yang komprehensif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan teknik observasi partisipan belum dapat dilakukan karena mengingat keterbatasan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Untuk dapat memperkuat data yang diperlukan, peneliti menggunakan bahan referensi dan tinjauan pustaka dari peneliti-peneliti terdahulu yang tentunya memiliki relevansi dengan tesis ini.

Berikut ini akan disampaikan proses identifikasi permasalahan berdasarkan penjelasan di atas, yaitu:



Gambar 1.1 Proses Identifikasi Permasalahan

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan tesis ini, peneliti mengurai tinjauan pustaka sesuai dengan teori, konsep, doktrin, hukum, kebijakan, undang-undang dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan berfikir dan analisis. Teori, konsep, doktrin, hukum, kebijakan, undang-undang serta penelitian terdahulu yang dipilih menjadi landasan dalam penelitian ini yang tentunya memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan yang diangkat. Berikut ini akan diuraikan tinjauan pustaka yang disesuaikan dengan variabel-variabel yang terdapat didalam judul tesis.

2.1.1 Teori Peran

Teori peran digunakan oleh peneliti sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang dituangkan dalam tesis ini. Mengingat pentingnya peran ini untuk mencegah, membatasi, menanggulangi dan mengurangi tingkat efektifitas dari serangan udara yang dilakukan oleh lawan/musuh terhadap obyek-obyek vital nasional sekaligus untuk menanggulangi dan mengurangi kerugiannya sebagai akibat dari serangan udara tersebut. Peran ini juga dirasakan sangat vital dalam rangka mencegah terjadinya korban jiwa yang tidak perlu apabila terjadi serangan udara.

Berikut ini adalah beberapa teori dari berbagai sumber tentang peran yang dapat dijadikan penjelasan sekaligus pemahaman guna melengkapi tesis ini. Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukannya terhadap sesuatu. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka sebenarnya ia telah menjalankan suatu peran (Soeharto, 2002; Soekamto, 1984, p. 237). Selanjutnya menurut Biddle dan Thomas (1996), teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

- 1 Orang yang mengambil bagian dalam suatu interaksi sosial;
- 2 Perilaku yang kemudian muncul dalam melakukan interaksi tersebut;
- 3 Kedudukan orang-orang dalam perilaku;
- 4 Kaitan antara orang dan perilaku.

Apabila ditinjau dari struktur dan fungsional maka peran dalam arti struktur adalah semua tindakan yang harus dilakukan oleh setiap komponen (fungsional) dari suatu institusi demi terwujudnya tujuan (sasaran) yang telah ditetapkan. Sedangkan peran dalam arti fungsional adalah sebagai konsekuensi dari dianutnya paradigma sistem yang dikenal dengan *system approach* oleh semua pemikir di dunia sejak tahun 1950-an. Jadi dalam pengertian fungsional adalah *output* dari interaksi sejumlah komponen terhadap suatu sistem/instansi/organisasi. (Salim et al., 1995). Pengertian ini sejalan dengan peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang merupakan salah satu unsur dari beberapa unsur Hanud pasif yang memerlukan interaksi yang sinergi dengan unsur lainnya guna menghasilkan *output* berupa tindakan-tindakan dalam rangka pelaksanaan tugas pertahanan udara pasif.

Selanjutnya mengenai Teori peran (*Role Theory*) dapat didefinisikan sebagai “batasan dan pengaturan dari penerapan peran orang yang memegang posisi tertentu yang ditentukan oleh orang yang berada di atasnya baik ke dalam maupun keluar sesuai dengan batasan yang dimiliki organisasi”. Selain itu, Robbin (2001:227), mengartikan peran sebagai “pengaturan mengenai kebiasaan yang diharapkan dari pekerjaan seseorang yang diberikan dalam suatu unit sosial”. Sedangkan menurut Dougherty dan Pritchard (1985) dalam Bauer (2003:55), teori peran dapat memberikan kerangka konseptual dalam perilaku/tindakan di dalam suatu organisasi. Mereka juga menyatakan bahwa peran dapat menciptakan suatu produk sebagai akibat dari tindakan dan perilakunya. Selain itu, hubungan suatu peran akan bergantung pada penekanan perannya oleh

para pengamat dan penilai terhadap hasil produk atau *outcome*. Sesuai teori tersebut, Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dituntut memiliki produk atau *outcome* yang berkaitan dengan perannya sebagai koordinator unsur pertahanan udara pasif berupa perencanaan dan prosedur tetap bahaya udara.

Peran dari tinjauan perilaku organisasi adalah merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi (*Organization's social system*) diluar norma dan budaya dari organisasi itu sendiri. Satuan Komando Kewilayahan TNI AD merupakan salah satu organisasi yang berada di daerah dengan tugasnya sebagai unsur sekaligus koordinator dalam pertahanan udara pasif. Scott et al. (1981) dalam **Kanfer** (1987:197), menyatakan terdapat lima aspek penting dari peran, sebagai berikut:

- 1 Peran bersifat impersonal, bahwa posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya bukan individunya. Oleh sebab itu, yang dituntut dari Satuan Komando Kewilayahan TNI AD adalah peran dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur Hanud pasif.
- 2 Peran berkaitan dengan perilaku kerja. Perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu.
- 3 Peran biasanya sulit dikendalikan. Peran terkadang menyebabkan ambigu atau kebingungan dalam implementasinya.
- 4 Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat juga menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. Dengan keterlibatan Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dalam Opshanudnas, tentunya hal ini dapat mengubah interaksi satuan dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- 5 Peran dalam suatu pekerjaan tentunya tidaklah sama, seseorang atau organisasi dapat memainkan beberapa peran. (<https://jodenmot.wordpress.com> site, diunduh 30 April 2017). Satuan Komando Kewilayahan TNI AD selain sebagai unsur juga dituntut dapat mengkoordinir unsur lainnya di daerah sebagai koordinator dalam pertahanan udara pasif.

Dari beberapa pengertian dan teori tentang peran, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran adalah seperangkat tingkat tertentu yang melekat pada diri seseorang maupun organisasi sesuai dengan batasan yang telah ditentukan dalam mencapai tujuan tertentu. Seperangkat tingkat bermakna bahwa di dalam peran terdapat beberapa faktor yang menyangkut hak, kewajiban, hubungan, interaksi, tugas, tanggung jawab, sikap dan perilaku yang harus dilakukan baik bagi orang maupun organisasi. Peran menuntut usaha terbaik terhadap segala sesuatu yang dibebankan kepadanya, pemahaman yang utuh, memiliki strategi yang tepat, interaksi yang sinergis terhadap peran lainnya, kemampuan menempatkan peran yang tepat karena biasanya peran itu sulit dikendalikan, menghasilkan produk atau *outcome*, dan peran dalam suatu pekerjaan (*jobs*) dapat memainkan beberapa peran.

Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang merupakan bagian dari TNI AD dan TNI sebagai unsur pertahanan udara pasif memiliki tugas melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan dalam pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara nasional untuk menghindari, mengurangi, dan menanggulangi akibat serangan udara lawan/musuh. Peran dalam menjalankan tugas-tugas baik sebagai unsur sekaligus koordinator pertahanan udara pasif harus dilaksanakan secara optimal.

2.1.1.1 Peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) Secara Umum

UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dalam pasal 5 menyebutkan bahwa TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Selain itu, TNI berfungsi sebagai penangkal adalah kekuatan nyata TNI yang mempunyai aspek psikologis untuk diperhitungkan oleh lawan sehingga mengurungkan niat lawan sekaligus juga mencegah niat lawan yang akan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sebagai penindak adalah kekuatan TNI yang mampu menghancurkan kekuatan yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. TNI sebagai pemulih adalah

kekuatan TNI bersama-sama dengan instansi pemerintah lainnya membantu fungsi pemerintah untuk mengembalikan kondisi keamanan negara yang telah terganggu akibat kekacauan keamanan karena perang, pemberontakan, konflik komunal, huru-hara, terorisme, dan bencana alam. Dalam konteks internasional, TNI turut berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui upaya penciptaan dan pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri (UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI, Bab Penjelasan pasal 6, p. 7).

Adapun tugas TNI dilakukan dengan melaksanakan Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang antara lain :

- 1 Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
- 2 Mengatasi pemberontakan bersenjata;
- 3 Mengatasi aksi terorisme;
- 4 Mengamankan wilayah perbatasan;
- 5 Mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
- 6 Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
- 7 Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
- 8 Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
- 9 Membantu tugas pemerintah di daerah;
- 10 Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang;

- 11 Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
- 12 Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- 13 Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*);
- 14 Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

Pelaksanaan tugas-tugas TNI saat ini sudah sangat jelas baik dalam Operasi Militer Untuk Perang maupun Operasi Militer Selain Perang. Hal ini dikarenakan adanya dasar hukum Undang-undang RI Nomor 34 tahun 2004 dan Undang-undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. selain itu TNI juga berfungsi sebagai penangkal, penindak, dan pemulih terhadap segala bentuk ancaman yang mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Penjelasan di atas bermakna dan harus dimaknai oleh seluruh instansi/lembaga baik di tingkat pusat maupun di daerah serta seluruh lapisan masyarakat guna terciptanya sinergitas dan interoperabilitas dalam menghadapi setiap ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan fungsi TNI dan kaitannya dengan penelitian ini adalah: Sebagai penangkal, TNI melaksanakan suatu Operasi Pertahanan Udara nasional yang bertujuan untuk menghadapi serangan udara yang dilakukan oleh lawan/musuh guna menjaga kedaulatan yurisdiksi wilayah udara nasional sekaligus melindungi segenap warga negara sebagai akibat dari serangan udara tersebut. Sebagai penindak, TNI menghancurkan setiap ancaman berupa serangan udara yang akan

menghancurkan obyek-obyek vital nasional guna menjaga keberlangsungan pencapaian tujuan nasional. Sebagai pemulih, TNI akan bersama-sama seluruh komponen bangsa lainnya bertugas untuk memulihkan kondisi negara sebagai akibat serangan udara yang dilakukan oleh lawan/musuh.

2.1.1.2 Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD)

Dalam Pasal 8 UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI mengatakan bahwa Angkatan Darat bertugas melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain, melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat dan melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Adapun tugas pokok TNI AD sebagai bagian dari TNI adalah melaksanakan Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang terutama mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, serta membantu tugas pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan tugas pemberdayaan wilayah pertahanan, salah satu fungsi utama TNI AD adalah pembinaan teritorial. Fungsi ini menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pengerahan, dan pengendalian potensi wilayah pertahanan dengan segenap aspeknya untuk menjadi kekuatan sebagai ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara di darat. Supriyanto (2014) mengatakan:

Ruang adalah “unsur geografi”, yaitu merupakan kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya yang harus menjadi suatu kesatuan wilayah dan yang menjadi ruang hidup atau habitat (*living*

space atau *lebensraum*) bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di atas permukaannya bumi, terutama manusia atau bangsa Indonesia. Alat adalah “unsur demografi” yaitu bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, dan bahasa daerah, memeluk berbagai agama dan kepercayaan harus merupakan suatu kesatuan kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia, yang disimbolkan dengan Bhineka Tunggal Ika. Kondisi sosial adalah kondisi dinamis dari rakyat dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan dalam menghadapi berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar, baik ancaman dari kekuatan militer maupun kekuatan non militer (p. 396-397).

Tugas pokok TNI AD sebagai bagian dari TNI adalah melaksanakan Operasi Militer Untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Dalam konteks ini, hal yang menjadi penekanan dalam pelaksanaan tugasnya adalah pengamanan terhadap objek vital nasional strategis, pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sedini mungkin sesuai dengan Sishanta, tugas perbantuan kepada Polri dalam bidang Kamtibmas sesuai dengan undang-undang, serta membantu tugas pemerintahan di daerah. Tugas-tugas tersebut memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem pertahanan udara nasional, dimana sebagian dari satuan-satuan TNI AD memiliki peran dalam Operasi Pertahanan Udara nasional. Fungsi pembinaan teritorial TNI AD sangat berperan penting guna mendukung keberhasilan Operasi Pertahanan Udara nasional khususnya pelaksanaan pertahanan udara pasif. Dalam menjalankan perannya TNI AD tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari instansi/lembaga lainnya. Hal ini diperlukan pemahaman semua unsur guna terciptanya suatu konsep pertahanan udara pasif yang efektif dan efisien guna mencegah, membatasi, menanggulangi dan mengurangi dampak dari serangan udara.

2.1.1.3 Peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD

Tugas pokok Satuan Kewilayahan TNI AD Sesuai dengan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/13/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, yaitu menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial, untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayah, untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Satuan Komando Kewilayahan TNI AD merupakan satuan di bawah TNI AD yang menitikberatkan pada tugas pembinaan teritorial (*Binter-territorial management*), antara lain tugasnya adalah mempersiapkan ruang, alat, dan kondisi juang (RAK Juang) (Supriyanto, 2014); guna menyiapkan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya serta upaya untuk memantapkan kemandirian TNI-Rakyat. Peran Binter adalah sebagai salah satu kegiatan utama dalam rangka mencapai tugas pokok TNI AD dengan mewujudkan potensi wilayah menjadi kekuatan dalam menyelenggarakan tugas pertahanan negara aspek darat sesuai dengan sistem pertahanan negara yang dilaksanakan terus-menerus baik masa damai, sebelum, selama, dan sesudah perang.

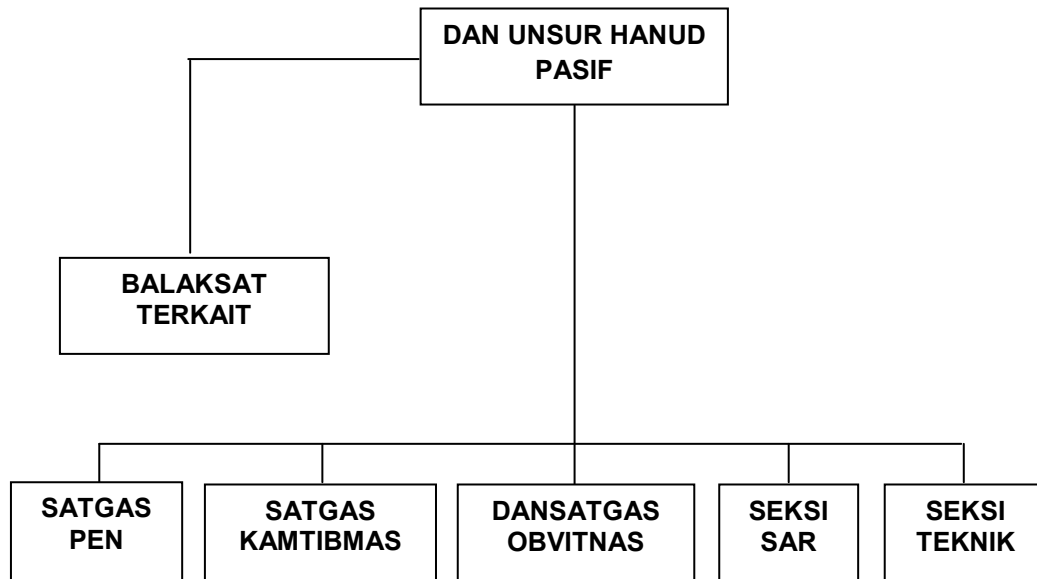
Pada hakikatnya, Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang menitikberatkan pelaksanaan tugasnya pada pembinaan teritorial terutama pembinaan bidang perlawanan wilayah dalam rangka penyiapan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta sudah cukup sinergis dikaitkan dengan keterlibatannya sebagai unsur pertahanan udara pasif dalam Operasi Pertahanan Udara nasional. Seperti yang telah peneliti sampaikan sebelumnya bahwa Satuan Komando Kewilayahan TNI AD merupakan salah satu unsur sekaligus koordinator pertahanan udara pasif dimana perannya cukup vital dalam memobilisasi seluruh unsur di daerah

dan masyarakat guna mencegah, membatasi, menanggulangi dan mengurangi dampak dan akibat apabila terjadi serangan udara lawan/musuh. Peran ini tentunya juga harus dipahami oleh semua unsur baik internal maupun eksternal dan seluruh masyarakat yang berada di daerah-daerah khususnya Kabupaten Sidoarjo.

Untuk memperoleh keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pertahanan udara pasif, tentunya diperlukan tahapan-tahapan kegiatan yang harus dipegang teguh, dipedomani dan dilaksanakan oleh setiap unsur Hanud pasif khususnya Satuan Komando Kewilayahan TNI AD sebagai koordinator di daerah. Dalam Prosedur Tetap Operasi Pertahanan Udara (Kohanudnas, 2015), Tahapan kegiatan pertahanan udara pasif adalah sebagai berikut:

2.1.1.3.1 Tahap Persiapan

Satuan Komando Kewilayahan TNI AD merupakan salah satu unsur pertahanan udara pasif dalam pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara nasional yang sekaligus bertindak sebagai komandan unsur Hanud pasif membentuk organisasi dan menggelar pos komando pertahanan udara pasif di Kabupaten Sidoarjo sebagai komando operasi Hanud pasif yang dibantu oleh satuan tugas-satuan tugas serta seksi-seksi seperti yang tercantum pada gambar 2.1 struktur organisasi, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Unsur Pertahanan Udara Pasif
Sumber : Komando Pertahanan udara Nasional, Prosedur Tetap Operasi
Pertahanan Udara, (2015).

Ketentuan dan kebutuhan Operasi Pertahanan Udara pasif dikoordinasikan antar unsur baik komando kewilayahan, Polri, pemerintah daerah dan pimpinan obyek vital/instansi di wilayahnya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif jauh sebelum operasi dimulai antara lain berupa:

- 1 Penentuan daerah. Daerah yang memiliki obyek vital nasional yang bernilai strategis dan penduduk padat akan tinggi nilai keamanannya, sehingga perlu perhatian yang lebih besar dari pihak Komando Teritorial dan pemerintah daerah khususnya dalam rangka penyelenggaraan pertahanan udara pasif;
- 2 Pemberian penerangan. Untuk menanamkan kesadaran masyarakat, perlu adanya penerangan-penerangan dari pemerintah pusat/pemerintah daerah/Komando Teritorial tentang bahaya udara dan penanggulangannya;

- 3 Mencegah Urbanisasi. Pemerintah dapat mengantisipasi dan mencegah kemungkinan terjadinya pemusatan penduduk di kota-kota besar;
- 4 Penyebaran Obyek Vital. Untuk menghindari kehancuran total, maka obyek-obyek vital perlu tersebar, sehingga satu sama lain jaraknya berjauhan;
- 5 Penyamaran. Penyamaran dilaksanakan agar lawan tidak mengenali sasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat sasaran yang sulit dibedakan dengan benda-benda medan di sekitarnya;
- 6 Penyesatan. Penyesatan bertujuan untuk membingungkan lawan yang sedang menyerang. Penyesatan dapat dilakukan antara lain dengan cara pembuatan sasaran-sasaran tipuan;
- 7 Perlindungan. Perlindungan yang baik akan mengurangi jatuhnya korban dan kerusakan materiil;
- 8 Pembuatan Sistem Cadangan. Komando Teritorial dan pemerintah daerah setempat merencanakan dan menyiapkan cadangan logistik terutama air, bahan pangan, dan obat-obatan;
- 9 Peringatan Bahaya Udara. Berita adanya bahaya udara harus disalurkan sampai kepada seluruh masyarakat dengan cepat dan tepat;
- 10 Pembuatan Prosedur Tetap Bahaya Udara. Setiap Komando Teritorial harus membuat prosedur tetap pertahanan udara pasif yang terintegrasi dengan instansi terkait sebagai pedoman pelaksanaan pertahanan udara pasif di wilayahnya;
- 11 Latihan Bahaya Udara. Unsur Hanud Pasif dikoordinir oleh Komandan Pos Komando Hanud Pasif setempat secara periodik harus memerlukan latihan dan pengujian prosedur tetap

pertahanan udara pasif untuk meningkatkan kemampuan aparat/petugas dan masyarakat;

- 12 Melaksanakan Tindakan Penanggulangan. Apabila terjadi serangan udara, maka kegiatan unsur pertahanan udara pasif adalah: *pertama*, Melaksanakan evakuasi medis terhadap personel ke rumah sakit dan mengamankan dokumen ke tempat aman yang telah ditentukan. *Kedua*, Menginventarisir kerusakan dan kerugian akibat serangan udara. *Ketiga*, Menyiapkan dan menyelenggarakan tempat pengungsian, dapur lapangan, dan medis. *Keempat*, Merehabilitasi kerusakan.

2.1.1.3.2 Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Pelaksanaan kegiatan operasi Hanud pasif dilaporkan ke pos komando pertahanan udara pasif, komando daerah militer/komando resimen, dan ke Kosekhanudnas melalui Perwira penghubung pertahanan udara pasif yang ada di Kosekhanudnas paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan operasi pukul "P" sesuai dengan saluran/jaringan komunikasi yang berlaku.

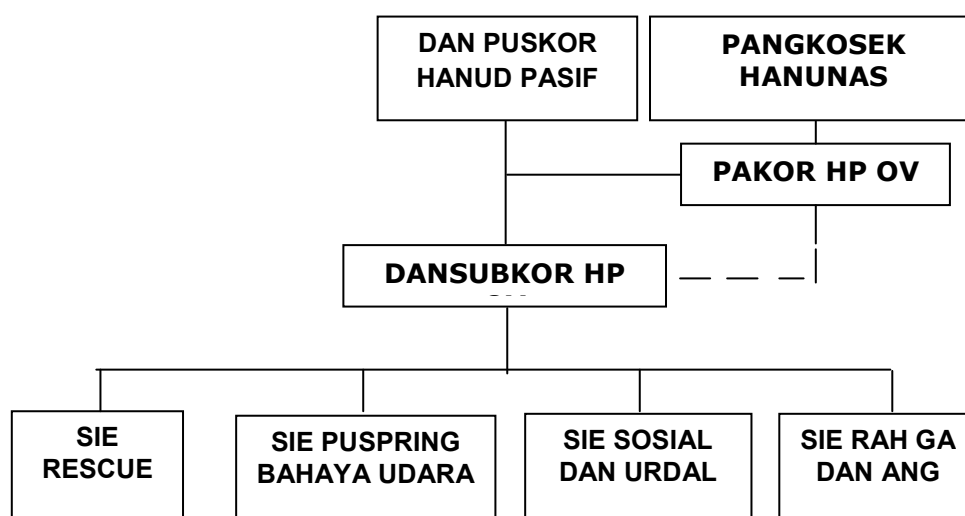
- 1 Isi laporan kesiapan dalam pelaksanaan kegiatan, meliputi: Klasifikasi, nama dan tempat pos komando pertahanan udara pasif, kekuatan satuan tugas, tanggal/waktu pembuatan;
- 2 Prosedur Penggunaan Komponen cadangan dan pendukung. Penggunaan komponen cadangan dan pendukung harus disesuaikan dengan ancaman bahaya udara dan dikoordinasikan antara Komando Teritorial dengan pemerintah daerah setempat. Penggelaran kedua komponen tersebut disesuaikan dengan lokasi obyek vital yang ada;
- 3 komponen cadangan dan komponen pendukung yang ditugaskan di satuan/instansi, penggunaannya ditentukan oleh pimpinan satuan/instansi yang bersangkutan;

- 4 Dalam penggunaan tenaga kesehatan dan pemadam kebakaran, komandan pos komando pertahanan udara pasif mengkoordinasikan dengan dinas kesehatan setempat dan pimpinan/instansi obyek vital yang ada di wilayahnya;
- 5 Penggunaan tenaga pemadam listrik/lampu, komandan pos komando pertahanan udara pasif mengkoordinasikan dengan Kepala PLN setempat;
- 6 Penggunaan tenaga pengamanan personel dan materiil, komandan pos komando pertahanan udara pasif mengkoordinasikan dengan bantuan tempur dan Polisi Republik Indonesia setempat;
- 7 Penggunaan tenaga pembunyian tanda-tanda bahaya, sesuai prosedur pemberitaan bahaya udara, Danposko Hanud Pasif mengkoordinasikan dengan Pemda, Polri dan pimpinan obyek vital;
- 8 Pemberitaan adanya bahaya udara datang dari Posekhanudnas atau Rudal dan Meriam hanud dengan sandi yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada;
- 9 Pemberitaan aman dari bahaya udara, juga datang dari Posekhanudnas atau Rudal dan Meriam hanud dengan sistem pemberitaan/sandi yang telah ditetapkan.

2.1.1.3.3 Tahap Pengakhiran Kegiatan

Pelaksanaan operasi dilaporkan ke pos komando pertahanan udara pasif, komando daerah militer/komando resimen, dan ke Posekhanudnas. Adapun isi laporan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : Klasifikasi, tanggal, nama posko pertahanan udara pasif, kegiatan operasi yang dilaksanakan dan, kerugian-kerugian yang mungkin timbul.

Selain peran akan tugas Komando Kewilayahan TNI AD dalam Operasi Pertahanan Udara Nasional yang diatur dalam Buku Petunjuk Kohanudnas, hal ini juga diatur oleh TNI AD sendiri yaitu pertahanan udara pasif aspek darat. Pemahaman Hanud Pasif Aspek Darat diperlukan oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dalam rangka mendukung Hanud aktif. Berikut ini susunan organisasi Hanud Pasif Aspek Darat, yaitu :



Gambar 2.2 Struktur Organisasi Pertahanan Udara Pasif Aspek Darat
 Sumber : Markas Besar Angkatan Darat, Petunjuk Teknis Tentang Pertahanan Udara Pasif Aspek Darat, (2016).

2.1.2 Pertahanan Negara

UU No. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara mengatakan: Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional

lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman (p. 4).

Selanjutnya dalam UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI menyebutkan:

Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. (p. 4).

Pertahanan negara bersifat semesta, Hal ini menuntut adanya kesadaran hak dan kewajiban seluruh warga negara dan mempunyai keyakinan yang kokoh akan kekuatan sendiri. Sedangkan kesemestaan bermakna adanya pelibatan seluruh rakyat, Sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan menyeluruh dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Strategi Pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan tiga elemen dasar. **Pertama**, membentuk, yaitu suatu strategi yang mampu menciptakan dan membentuk lingkungan keamanan nasional dan internasional yang dapat menjamin kepentingan nasional dengan mempromosikan stabilitas kawasan, mengurangi dan meniadakan ancaman, mencegah konflik, mencegah agresi, dan tindakan kekerasan lainnya. **Kedua**, merespon, yaitu strategi yang mampu merespon berbagai spektrum krisis yang dapat menciptakan ancaman dan risiko terhadap kepentingan nasional. **Ketiga**, menyiapkan, yaitu strategi yang mampu mempersiapkan suatu pertahanan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan memusatkan diri pada upaya pembangunan kekuatan,

pengembangan konsep, dan pengorganisasian pertahanan yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk melindungi kepentingan nasional (Kemenhan RI, Buku Strategi Pertahanan negara, 2015, p. 37-38).

Menurut Hakim (2011), "Pertahanan suatu negara dalam pengertian awam sering disebut juga sebagai pertahanan nasional, biasanya mengandung pengertian segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan dan kehormatan bangsa dan negara" (p. 109). Sedangkan sistem pertahanan semesta (Sishanta), yaitu suatu sistem pertahanan yang mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki, yang terdiri dari komponen utama, komponen cadangan, dan sumber daya nasional, baik itu sumber daya buatan maupun sumber daya alam. (Supriyanto, 2014, p. 262).

Berdasarkan beberapa penjelasan tentang pengertian pertahanan negara yang telah disampaikan sebelumnya dari berbagai sumber, dapat disimpulkan tentang pertahanan negara adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa, menjaga keutuhan wilayah negara, dan melindungi segenap bangsa dan negara serta seluruh tumpah darah Indonesia. Sistem pertahanan semesta adalah sistem pertahanan yang melibatkan seluruh warga negara (SDM), wilayah, sumber daya nasional (SDA dan SDAB), dan kondisi sosial yang dipersiapkan secara dini disertai dengan kesadaran yang tinggi, keyakinan akan kekuatan sendiri, dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut guna menghadapi segala bentuk ancaman baik dari dalam maupun dari luar, baik ancaman militer dan non-militer serta ancaman hibrida. Ancaman hibrida adalah penggabungan berbagai ancaman. (Kemenhan RI, Buku Doktrin Pertahanan Negara, 2015, p. 19).

Adapun maksud peneliti memasukkan pengertian-pengertian tentang pertahanan negara di dalam tesis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang utuh dan rutut kepada pembaca. Peneliti ingin memberikan gambaran mengenai pertahanan negara dan sistem pertahanan yang dianut oleh Negara Indonesia yang pada akhirnya

seluruh komponen bangsa memiliki kesadaran untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara nasional. Lebih khusus lagi, terciptanya kesadaran seluruh unsur di daerah dan masyarakat mengenai peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dalam pertahanan udara pasif.

2.1.3 Unsur Pertahanan Udara Pasif

Secara umum yang dimaksud dengan unsur adalah bagian kecil dari bagian yang lebih besar. Satuan Komando Kewilayahan TNI AD merupakan salah satu kelompok dari beberapa satuan yang terlibat sebagai unsur pertahanan udara pasif. Pengertian pertahanan udara pasif adalah merupakan kegiatan operasi dengan menggunakan sistem pertahanan udara untuk menghindari, mengurangi, dan menanggulangi kerugian akibat serangan udara musuh/lawan.

Pengertian lain pertahanan udara pasif adalah suatu pola pertahanan udara dimana unsur-unsur didalamnya digelar pada tempat-tempat yang bernilai strategis seperti pada pusat-pusat pemerintahan, industri strategis, instansi militer, dan pemukiman penduduk untuk menghindari, mengurangi dan menanggulangi akibat serangan udara lawan. (Kohanudnas, n.d. p. 11). Adapun Unsur-Unsur yang terlibat pada operasi Hanud pasif yaitu unsur pasukan, unsur pendukung lainnya, unsur obyek vital, dan masyarakat sekitar. (Bujukin TNI AU, 2008, p. 10). Satuan Komando Kewilayahan TNI AD merupakan salah satu kelompok atau unsur pasukan dari beberapa satuan yang terlibat sebagai unsur pertahanan udara pasif. Adapun unsur-unsur Hanud pasif lainnya adalah unsur pemerintah daerah, unsur Kepolisian Republik Indonesia, unsur penerbangan sipil, dan unsur masyarakat sekitar.

2.1.4 Hukum Udara.

UU RI No. 1 Tahun 2009 dalam pasal 1 menyatakan : Bahwa Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia. Selanjutnya menurut Martono (2007), "Belum adanya kesepakatan secara internasional tentang pengertian hukum

udara (*air law*) yang mengatur secara baku. Banyak istilah yang digunakan seperti misalnya penggunaan istilah hukum penerbangan (*aviation law*) atau hukum navigasi udara (*air navigation law*) atau hukum transportasi udara (*air transportation law*) atau hukum penerbangan (*aerial law*) atau hukum aeronautika (*aeronautical law*) atau udara-aeronautika (*air-aeronautical law*) secara bergantian tanpa dibedakan antara yang satu dengan lainnya.(p. 1).

Di tingkat internasional, hukum udara yang mengatur penerbangan militer dan sipil paling tidak sudah dijadikan landasan hukum yang utama bagi terciptanya keselamatan pemanfaatan ruang udara. Ketentuan hukum udara yang mengatur navigasi dan transportasi udara, baik untuk saat ini maupun pada masa lampau selalu diarahkan penerbangan sipil komersial atau sipil lainnya, diluar penerbangan oleh pesawat udara militer.(Abdurrasyid, 2008, p. 424). Pramono (2011) mengemukakan bahwa:

Hukum udara adalah keseluruhan peraturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan satu kesatuan tatanan sistem, terdiri atas pesawat udara, pemanfaatan wilayah udara, angkutan udara, bandar udara, keselamatan dan keamanan, navigasi penerbangan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya yang berhubungan dengan penerbangan.(p. 8)

Pengertian udara dan hukum udara seperti yang telah dijelaskan di atas dapat menambah wawasan kita dan lebih khusus lagi sebagai pengetahuan bagi aparat komando kewilayahan TNI AD mengingat kajian yang diangkat dalam tesis ini berkaitan dengan permasalahan pertahanan udara.

2.1.5 Operasi Pertahanan Udara Nasional

Komando Pertahanan Udara Nasional disingkat Kohanudnas merupakan salah satu Kotamaops TNI yang bertugas menyelenggarakan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan pertahanan keamanan atas wilayah udara nasional baik secara mandiri ataupun bekerja sama dengan Komando Utama Operasi lainnya dalam rangka menegakkan kedaulatan

Negara kesatuan Republik Indonesia serta menyelenggarakan pembinaan administrasi dan kesiapan operasi setiap unsur pertahanan udara yang terdapat di dalam jajarannya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI. Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional merupakan Komando pelaksana operasi pertahanan udara yang dipimpin oleh seorang Panglima dan bertanggung jawab kepada Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional. (Kohanudnas. 2015).

Dalam Operasi Pertahanan Udara Nasional, tentunya harus mengetahui bentuk-bentuk ancaman serta sasaran-sasaran serangan udara untuk dapat menemukan pola operasi yang tepat. Daerah atau obyek yang akan dijadikan sasaran serangan udara sebenarnya sulit untuk kita perkirakan, sebab tergantung dari tujuan taktis maupun strategis pihak penyerang. Serangan udara dilaksanakan setelah dipersiapkan dengan teliti. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pendudukan, kecepatan, ketepatan waktu maupun obyek sasaran dan dilaksanakan pada waktu yang singkat dengan akibat yang sangat fatal terhadap obyek yang diserang. Dengan demikian obyek-obyek yang bernilai taktis maupun strategis merupakan obyek yang rawan. Obyek-obyek militer maupun ekonomi merupakan obyek yang mendapatkan prioritas penghancuran, karena sebab dari kehancuran potensi militer dan ekonomi tersebut akan sangat mempengaruhi potensi perang lainnya.(Pusdik Arhanud. 2005). Dalam konteks Operasi Hanud Pasif, sasaran serangan udara yang perlu mendapatkan perlindungan adalah obyek vital nasional yang bersifat strategis, instansi militer dan Bandar udara.

Operasi adalah gerakan militer, beroperasi berarti melakukan gerakan militer seperti pengerahan satuan militer kedalam medan tugas dan pengoperasian berarti suatu proses, cara, perbuatan mengoperasikan sedangkan operasional bersangkutan paut dengan operasi. (KBBI, 2008, p. 1090-1091). Supriyanto (2014) mengatakan, operasi adalah sebuah aksi militer yang bersifat strategis, taktis, dan atau latihan, atau misi militer yang bersifat administrasi, atau suatu pelaksanaan pertempuran, termasuk

gerakan, pasokan, serangan, pertahanan dan manuver yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari setiap pertempuran atau kampanye militer. (p. 425)

Dalam prosedur tetap Kohanudnas tentang Operasi Pertahanan Udara disebutkan pengertian Operasi Pertahanan Udara pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk menghadapi setiap ancaman yang menggunakan media udara guna menegakkan kedaulatan wilayah udara nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan unsur-unsur TNI dan sipil yang mempunyai kemampuan pertahanan udara serta harus dilaksanakan secara terus-menerus agar setiap ancaman udara yang muncul dapat terdeteksi dan diantisipasi sedini mungkin karena dapat muncul setiap saat. Sasaran Operasi Pertahanan Udara adalah:

- 1 Terdeteksi, terhalau dan hancurnya tindak permusuhan kekuatan udara lawan;
- 2 Terlindunginya objek vital nasional strategis dari ancaman musuh;
- 3 Teratasinya gangguan keamanan udara di wilayah udara yurisdiksi nasional.

Nasional adalah bersifat kebangsaan, berkenaan dengan bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa dan nasionalis berarti pencinta nusa dan bangsa sendiri, orang yang memperjuangkan kepentingan bangsanya sedangkan nasionalisme merupakan paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri.(KBBI, 2008, p.1068). Operasi Pertahanan Udara nasional adalah operasi yang diselenggarakan untuk mewujudkan penguasaan wilayah udara yurisdiksi nasional pada OMP dan OMSP, dalam rangka menegakkan kedaulatan negara, hukum dan mengatasi gangguan keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional.

Pada hakikatnya Operasi Pertahanan Udara nasional adalah suatu proses, gerakan, aksi, dan tindakan yang bersifat taktis dan strategis untuk menghadapi segala bentuk ancaman yang menggunakan media

udara dan dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi, dan di secara terus-menerus dengan melibatkan unsur TNI dan sipil yang memiliki kemampuan pertahanan udara guna deteksi, antisipasi, menghalau, serta menghancurkan kekuatan udara musuh/lawan dalam rangka menegakkan kedaulatan wilayah udara yurisdiksi nasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut ini akan disampaikan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna memperkaya referensi dalam tesis ini yang dituliskan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Penerbit, Tahun	Metode	Rekomendasi	Persamaan	Perbedaan
1	Thomas Goss	Jurnal, "Who's in Charge ?" New Challenges in Homeland Defence and Homeland Security	The Center for Homeland Defence and Security (CHDS) USA 2006	Descriptive-explanatory	Pertahanan negara ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan negara Amerika, wilayah, populasi domestik, dan infrastruktur vital dalam rangka melawan ancaman dan agresi. Operasi yang dilaksanakan harus dapat diyakinkan memiliki integrasi dan keamanan. Kegiatan itu dilaksanakan dengan cara deteksi, menghalangi, pencegahan, dan penghancuran ancaman dan serangan yang melawan	Pelaksanaan Hanud pasif untuk memberikan perlindungan dan meminimalisir dampak dari ancaman agresi terhadap daerah teritorial, masyarakat dan obyek-obyek / infrastruktur rawan.	Spektrum ancaman yang diambil jauh lebih luas dari Hanud pasif yang ada di Indonesia. Spektrum ancaman bagi Negara Indonesia hanya serangan udara, sedangkan dalam jurnal yang ditulis oleh Thomas Goss tentang Hanud Pasif di USA sudah mengantisipasi

					<p>negara Amerika Serikat secara awal dan jauh dari perbatasan negara dalam rangka meminimalisir dampak terhadap warga negara dan kepentingan Amerika Serikat. Misi disusun untuk pertahanan negara dari ancaman, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahanan Udara 2. Pertahanan Darat 3. Pertahanan Laut 4. Ballistic Missile Defense (BMD) 		<p>ancaman dari darat, laut dan udara serta Rudal balistik.</p>
2	Tinton Dwi Atmaja, Hendri Maja Saputra	Jurnal, Perancangan Arsitektur Sistem Integrasi Infomasi Pada Jaringan Pertahanan Udara Bergerak	ITB Bandung 2010	Kualitatif- Deskriptif analisis	<p>Integrasi data dan informasi dari perangkat pertahanan udara, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Radar pendeteksi 2. Sistem Radar penjejak 3. Sistem persenjataan 4. Sistem penempatan persenjataan 5. Sistem kendaraan 	<p>Menguraikan tentang integrasi sistem informasi, Hal ini sesuai dengan peran akan tugas Satuan Komando Kewilayahan TNI AD terhadap unsur-unsur Hanud pasif lainnya. Integrasi sistem informasi antar unsur Hanud pasif</p>	<p>Secara umum jurnal tersebut lebih mengkhhususkan pada pelaksanaan pertahanan udara aktif. Hal ini berbeda dengan Tesis yang dibuat oleh penulis dimana lebih mengkhhususkan pada</p>

						sangat penting dalam mendukung Opshanud	Operasi Hanud Pasif.
3	Ian Easton	Jurnal, Taiwan Defense Strategy in an Age of Precision Strike	Project 2049 Institute Arlington, Virginia. 2014	Kualitatif	Taiwan memerlukan penguatan terhadap pertahanan pasif guna mendukung pertahanan udara aktifnya untuk menghadapi perkembangan Rudal PLAAF. Taiwan harus terus melanjutkan pengembangan dan penempatan secara jauh kedepan Rudalnya dan jika memungkinkan dapat melakukan peggancuran artileri dan markas PLAAF. Hal ini dilakukan untuk dapat menjamin ketahanan terhadap serangan pertama musuh. Selain untuk melindungi negaranya dan dapat menyerang PLAAF, pertahanan pasif ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya dan obyek-obyek vital nasionalnya.	Operasi Pertahanan Udara Pasif yang diselenggarakan oleh Taiwan adalah untuk melindungi rakyatnya dari akibat serangan udara musuh.	Peran militer Taiwan dalam melaksanakan Hanud pasif harus dapat mendukung Operasi Hanud aktif. Hanud pasif di Taiwan dibentuk dan diarahkan berdasarkan bagaimana strategi Operasi Hanud Aktif dimainkan. Hanud pasif dan Hanud aktif dikombinasikan guna menjaga keberlangsungan Operasi Pertahanan Udara yang dilaksanakan. Titik berat pelaksanaan Hanud

							pasif diperuntukkan untuk menghadapi ancaman serangan dari Negara Tiongkok saja. Secara umum konsep Hanud Pasif di Taiwan berbeda dengan Indonesia.
4	Baghdadi Arash and Eghtedar Bakhtiyari Shahla	Jurnal, An Analytical Approach to the Issue of Passive Defense in Relation with Preservation of Urban Elements	Islamic Azad University, Tehran, Iran. 2014	Descriptive-explanatory and Comparative Methods	Pertahanan pasif diperkirakan dapat melawan perang asimetris untuk melawan dan meminimalisir invasi musuh baik berupa serangan udara, serangan darat dan laut. Selain itu, pertahanan pasif dilaksanakan untuk memberikan perlindungan seluruh warga negara, infrastruktur, obyek vital militer dan non-militer serta komunikasi.	Secara umum pelaksanaan Hanud pasif untuk mengurangi dampak dari serangan udara. Obyek-obyek yang dilindungi berupa populasi/masyarakat dan obyek yang sensitif dan vital.	Pelaksanaan Hanud pasif selain untuk menghadapi serangan udara juga dipersiapkan untuk menghadapi serangan / invasi dari darat dan laut. Hal inilah yang berbeda dengan pelaksanaan Hanud pasif di Indonesia.

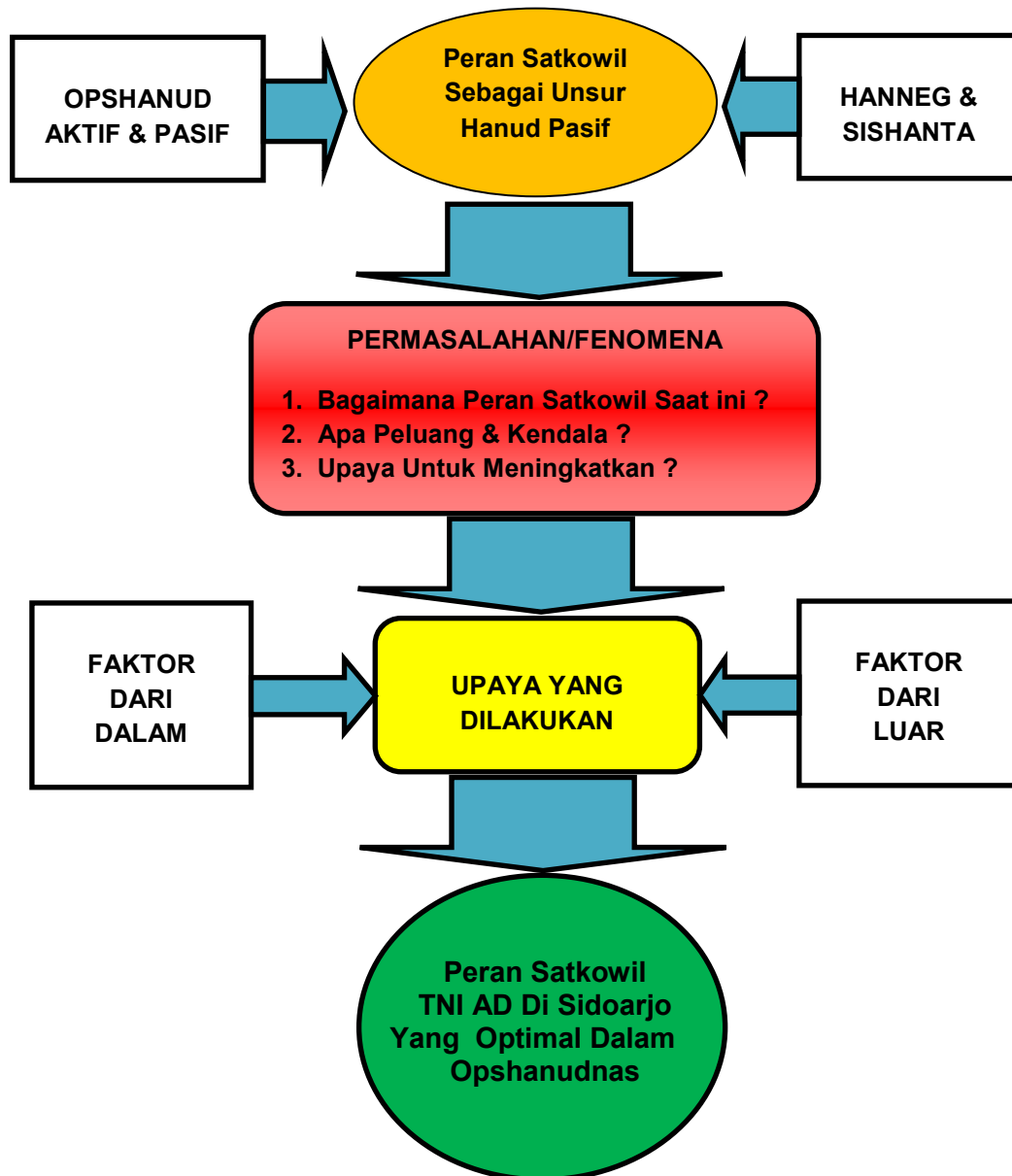
Dari hasil persamaan dan perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti akan menjelaskan sebagai berikut : Dalam jurnal yang ditulis oleh Tinton Dwi Atmaja dan Hendri Maja Saputra menguraikan tentang integrasi sistem informasi, dimana hal ini merupakan salah satu peran yang harus dilaksanakan oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD terhadap unsur-unsur Hanud pasif lainnya. Integrasi sistem informasi antar unsur Hanud pasif sangat penting dalam mendukung Operasi Pertahanan Udara. Namun secara umum jurnal tersebut lebih menghususkan pada pelaksanaan pertahanan udara aktif. Berikutnya adalah jurnal yang ditulis oleh Ian Easton menjelaskan tentang peran militer Taiwan dalam mengkombinasikan antara Hanud pasif dan Hanud aktif. Hanud pasif harus dapat mendukung keberlangsungan Operasi Pertahanan Udara. Tulisan Ian Easton lebih memfokuskan pelaksanaan Hanud pasif guna menghadapi ancaman serangan dari Negara Tiongkok.

Jurnal yang ditulis oleh Baghdadi Arash and Eghtedar Bakhtiyari Shahla, serta Thomas Goss memiliki kesamaan dalam hal obyek yang dilindungi antar keduanya dan pelaksanaan pertahanan udara pasif di Indonesia. Namun spektrum yang mereka tuliskan lebih luas dibandingkan dengan pengertian pertahanan udara pasif yang ada di Indonesia. Mereka menyebutkan datangnya ancaman dari udara, darat dan laut. Sedangkan perspektif yang dianut oleh operasi Hanud pasif Indonesia hanya terhadap serangan udara lawan/musuh. Namun secara keseluruhan dari jurnal tersebut tidak merincikan sampai dengan teknis pelaksanaan pertahanan udara pasif. Dalam tesis ini, peneliti akan menjelaskan secara jelas mengenai peran yang harus dilakukan dalam melaksanakan tugas sebagai unsur pertahanan udara pasif guna mendukung Operasi Pertahanan Udara nasional.

2.3 Kerangka Pemikiran

Guna memudahkan pembaca dalam memahami tesis ini, peneliti mencoba memetakan kerangka pemikiran secara jelas dan sederhana yang isinya akan dibahas dan diuraikan secara mendalam pada bab-bab

selanjutnya. Adapun kerangka pemikiran yang dibuat dalam tesis ini adalah seperti pada gambar 2.3. berikut ini:



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran

Peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai unsur pertahanan udara pasif dalam mendukung Operasi Pertahanan Udara nasional saat ini belum optimal.

Hal ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman peneliti selama berdinamika baik di satuan operasional/tempur maupun di Satuan Komando Kewilayahan TNI AD. Operasi Pertahanan Udara dirasakan suatu hal yang asing bagi sebagian besar Satuan Komando Kewilayahan TNI AD. Hal ini dapat dipahami mengingat kurangnya sosialisasi dan keterlibatan Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dalam latihan bersama Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) tentang pertahanan udara pasif.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti mencoba merumuskan permasalahan dari kondisi yang terjadi, sebagai berikut: bagaimana analisis peran yang sudah dilakukan oleh komando kewilayahan TNI AD saat ini dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pertahanan udara pasif dalam Operasi Pertahanan Udara nasional, apa peluang dan kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan perannya serta strategi yang dapat dilakukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan di Satuan Komando Kewilayahan TNI AD setingkat Komando Distrik Militer (Kodim) di Kabupaten Sidoarjo. Subyek penelitian dalam hal ini adalah Komandan Kodim, Perwira Staf Operasi, Perwira Seksi Teritorial, dan perwakilan Bintara dengan jabatan Bintara Pembina Desa dan obyek penelitian adalah Kodim 0816/SDA. Selain itu, peneliti mengarahkan lokus penelitian di Kodim 0816/SDA mengingat Kabupaten Sidoarjo memiliki obyek vital nasional berupa bandar udara internasional, perusahaan-perusahaan besar, penduduk yang cukup padat, serta laju pembangunan yang cukup pesat. Kondisi ini sedikit banyak dapat memberikan gambaran keterwakilan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kemudian untuk melengkapi data, peneliti juga akan melaksanakan penelitian di Markas Komando Pertahanan Udara Nasional dengan subyek penelitian adalah Asisten Khusus Matra Darat Kohanudnas.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Menurut Sugiyono (2016), metode penelitian pada dasarnya merupakan *cara ilmiah* untuk mendapatkan *data* dengan *tujuan* dan *kegunaan* tertentu. Tesis ini dibuat dengan berpedoman pada cara ilmiah yaitu dengan cara menggunakan teori-teori yang dapat dipertanggung jawabkan. Penelitian yang dilakukan berguna untuk memperoleh data yang dapat mendukung kedalaman tesis ini dengan harapan dapat memberikan kegunaan dan manfaat dimasa yang akan datang. Peneliti akan senantiasa memperhatikan keempat kata kunci seperti tersebut diatas. Peneliti memahami bahwa data yang diperoleh melalui penelitian adalah data yang bersifat empiris (teramati) dan tentunya memenuhi kriteria valid, reliabel dan obyektif.

Desain penelitian pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan data-data untuk mendukung kajian penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Selanjutnya menurut Sugiyono, (2016, p. 12), metode kualitatif sering disebut juga dengan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Filsafat postpositivisme sering disebut sebagai paradigma interpretif dan konstruktif, yang memandang realitas sosial sebagai suatu yang holistik/utuh. Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menganalisis berbagai fenomena yang terkait dengan peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dalam mengaplikasikan tugasnya sebagai unsur pertahanan udara pasif dalam rangka mendukung Operasi Pertahanan Udara nasional secara utuh.

Guna mendukung keberhasilan penelitian ini, tentunya perlu didukung dengan kemampuan peneliti dalam mengajukan pertanyaan, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti agar menjadi lebih jelas dan bermakna. (Sugiyono, 2016, p. 13). Pengajuan pertanyaan-pertanyaan sebagai prosedur penelitian dalam

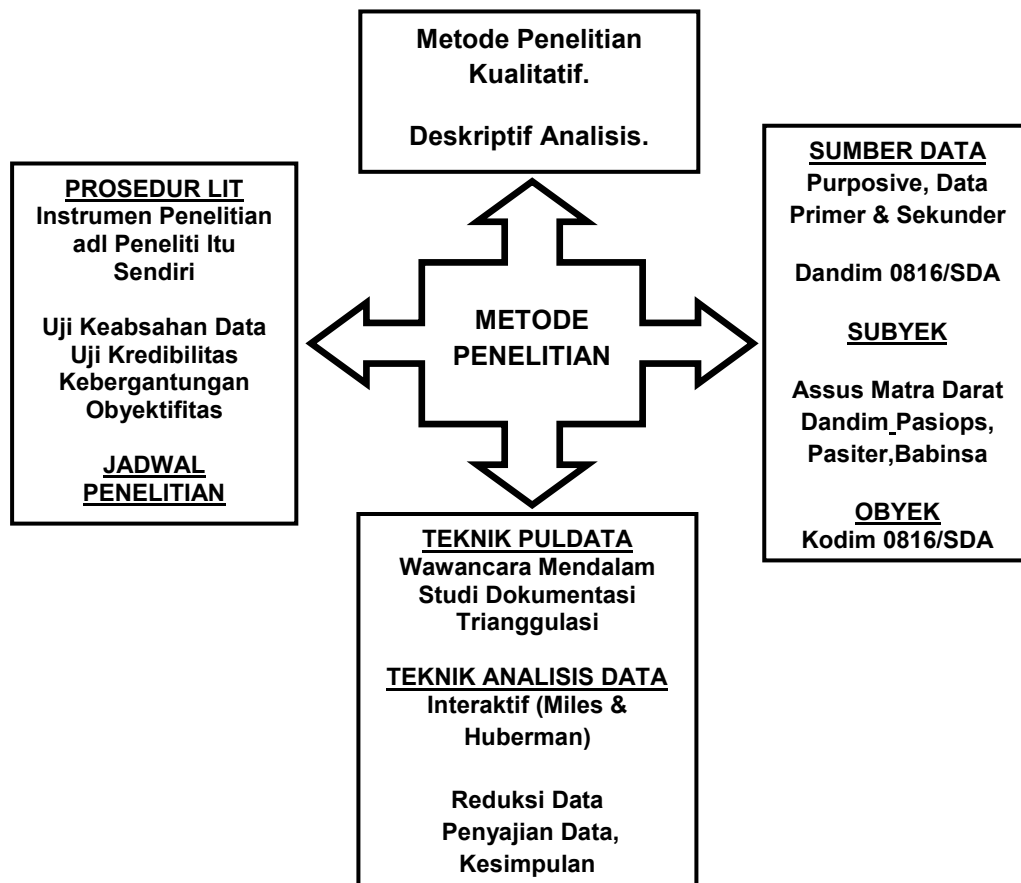
rangka pengumpulan data yang spesifik dari informan, partisipan maupun narasumber akan menjawab semua permasalahan-permasalahan yang terjadi. Peneliti akan menanyakan hal-hal yang langsung berkaitan dengan permasalahan kepada narasumber, partisipan dan informan yang dianggap kompeten untuk mendapatkan data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan and Biken dalam Sugiyono (2016) bahwa metode penelitian kualitatif itu:

- 1 Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen). Peneliti akan terjun langsung ke lapangan dan ke sumber data, serta sebagai instrumen kunci adalah peneliti sendiri;
- 2 Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh biasanya berbentuk kata-kata atau gambar bukan menekankan pada angka atau statistik;
- 3 Pada penelitian kualitatif lebih ditekankan pada proses daripada produk atau *overcome*;
- 4 Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif;
- 5 Penelitian yang dilakukan secara kualitatif lebih menekankan pada makna atau data dibalik yang diamati.

Peneliti menggunakan metode kualitatif karena melihat permasalahan yang diangkat akan selalu berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Adapun fokus penelitian ini adalah bagaimana analisis peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di Sidoarjo yang dalam hal ini adalah Kodim 0816/SDA dalam melaksanakan **tugas** sebagai unsur sekaligus koordinator pertahanan udara pasif dalam Operasi Pertahanan Udara nasional. Berdasarkan karakteristik menurut Bogdan dan Biken yaitu penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, tentunya hal ini sudah sesuai dengan metode deskriptif analisis yang akan

digunakan oleh peneliti. Berikut ini merupakan gambar alur metode penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian.



Gambar 3.1 Gambar Alur Metode Penelitian

3.2 Sumber Data, Subyek dan Obyek Penelitian

3.2.1 Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif, sumber data dipilih secara *purposive*. Peneliti akan memasuki situasi sosial secara langsung untuk melakukan observasi (jika waktu memungkinkan) dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang memahami tentang peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD sebagai unsur pertahanan udara pasif. Sumber data

yang akan dipilih merupakan orang yang memiliki kompetensi dibidangnya dan otoritas pada situasi sosial atau obyek yang diteliti sehingga mampu membukakan pintu kemana saja peneliti akan melakukan pengambilan data, (Sugiyono, 2016, p. 382). Peneliti akan memilih pejabat Komandan Kodim 0816/SDA sebagai sumber data karena dimungkinkan dapat memberikan data-data atau keterangan yang dapat melengkapi tesis ini sekaligus sebagai pembuka pintu bagi peneliti untuk mendapatkan data ke semua unsur di bawahnya.

Peneliti memahami bahwa akan ada dinamika terhadap pengembangan sumber data yang akan diteliti demi melengkapi data dalam penelitian ini. Hal ini didukung oleh teori dari Lincoln dan Guba (1985) dalam Sugiyono (2016, p. 302), yang menyatakan bahwa dalam penelitian naturalistik spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Ciri-ciri khusus sampel *purposive*, yaitu 1) *Emergent sampling design*/sementara, artinya adalah bahwa sampel awal bersifat sementara. 2) *Serial selection of sample units*/menggelinding seperti bola salju (snow ball), sampel akan berkembang karena akan diperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah dari sumber yang lain. 3) *Continuous adjustment or 'focusing' of the sample*/disesuaikan dengan kebutuhan, penambahan jumlah sampel disebabkan karena menyesuaikan kebutuhan akan data sesuai dengan penelitian. 4) *Selection to the point of redundancy*/dipilih sampai jenuh, sampel tidak akan bertambah jika data yang berkaitan dengan penelitian sudah lengkap.

Menurut Arikunto (2010), Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data akan diperoleh. Selanjutnya Arikunto menjelaskan bahwa sumber data dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian secara individu yang menjadi informan ataupun didapatkan dari suatu perusahaan pengolah data bagi peneliti yang memerlukannya. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan unsur-unsur

pejabat yang berada di Kodim 0816/SDA yaitu: Komandan Kodim 0816/SDA, Perwira Seksi Operasi, Perwira Seksi Teritorial, dan Bintara yang menjabat sebagai Bintara Pembina Desa (Babinsa). Untuk melengkapi data tersebut, peneliti juga akan melakukan wawancara dengan Asisten Khusus Matra Darat di Kohanudnas.

Sumber data yang kedua adalah data sekunder, yaitu data-data yang berguna untuk melengkapi data primer. Guna memenuhi data-data sekunder, peneliti akan berusaha mendapatkan produk-produk berupa rencana, laporan, prosedur tetap, peranti lunak (Penak) serta dokumen-dokumen lain mengenai peran akan tugas Satuan Komando Kewilayahan TNI AD sebagai unsur pertahanan udara pasif dalam pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara nasional.

3.2.2 Subyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini meliputi pihak-pihak yang terlibat langsung sebagai data primer penelitian. Narasumber yang dipilih oleh peneliti merupakan informan sebagai pihak utama dan tambahan. Selanjutnya menurut teori yang disampaikan Sanafiah Faizal (1990) dengan mengutip pendapat Spradley dalam Sugiyono (2016, p. 304), yang mengemukakan bahwa situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang di dalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Dalam hal ini adalah pejabat Komandan Kodim 0816/SDA karena dapat melanjutkan penelitian ke pejabat di bawahnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1 Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi. Peneliti menentukan pejabat-pejabat di satuan Kodim 0816/SDA yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan pertahanan udara pasif;

- 2 Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti. Subyek penelitian yang dipilih masih berdinamis di satuan dan memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian;
- 3 Subyek penelitian yang dipilih diharapkan memiliki waktu yang memadai untuk dimintai keterangannya;
- 4 Subyek penelitian adalah unsur-unsur dari lokus penelitian yang memang membidangi masalah pertahanan udara pasif sehingga data yang diperoleh bukan merupakan informasi yang sesuai dengan pemahaman masing-masing, melainkan informasi yang sesuai dengan referensi;
- 5 Sumber data atau informan pada awalnya cukup asing dengan peneliti.

Adapun subyek utama pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Komandan Kodim 0816/SDA;
- 2 Assus Matra Darat Kohanudnas;
- 3 Perwira Seksi Operasi Kodim 0816/SDA;
- 4 Perwira Seksi Teritorial Kodim 0816/SDA;
- 5 Babinsa Kodim 0816/SDA.

3.2.3. Obyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan "*social situation*" atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktifitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis. Situasi sosial tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek penelitian yang ingin diketahui "apa yang terjadi" di dalamnya. (Sugiyono, 2016, p. 297). Selanjutnya menurut Arikunto (2010), obyek penelitian adalah sesuatu yang merupakan pokok atau inti dari problematika penelitian.

Dalam penelitian ini, pelaku (*actor*) yang akan diteliti telah disampaikan pada penjelasan sebelumnya. Sedangkan untuk tempat (*place*) penelitian adalah di Markas Komando Distrik Militer 0816/Sidoarjo yang beralamatkan di jalan Lingkar Timur, Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234. Adapun aktifitas (*activity*) dalam penelitian adalah hal-hal yang telah dilakukan oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang dalam hal ini Kodim 0816/SDA dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur sekaligus koordinator pertahanan udara pasif dalam rangka mendukung Operasi Pertahanan Udara nasional.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, tehnik pengumpulan data adalah langkah yang paling utama. Menurut Sugiyono (2016, p 308), Terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Selanjutnya Catherine Marshall, Gretchen B. Rossman dalam Sugiyono (2016, p. 309), menyatakan bahwa *“the fundamental methods relied on by qualitative researches for gathering information are, participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review”*. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan gabungan/triangulasi. Pada dasarnya peneliti ingin melaksanakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi agar memperoleh data yang valid dan akurat, namun peneliti memiliki keterbatasan waktu untuk melaksanakan penelitian dengan teknik tersebut.

3.3.1 Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono (2016, p. 316), Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti pada awalnya merupakan fenomena yang ditemukan secara personal yang kemudian mencoba

melaksanakan wawancara dengan beberapa personel yang berdinasi di Satuan Komando Kewilayahan TNI AD. Lebih lanjut mengenai pengertian wawancara menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2016, p. 316), mendefinisikan *interview* sebagai berikut. “*a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Secara sederhana, wawancara adalah bertemunya dua orang dengan tujuan untuk saling bertukar informasi atau ide dengan tanya jawab sehingga terbentuk suatu makna dari topik pembicaraan tersebut.

Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2016, p. 317), mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu *wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur*. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan ketiga macam wawancara tersebut. Peneliti ingin mendapatkan fakta yang sebenarnya tentang fenomena/permasalahan yang berkaitan dengan peran Kodim 0816/SDA dalam pelaksanaan tugas pertahanan udara pasif secara jujur dan transparan. Berikut ini penjelasan dari peneliti mengenai teknis dari masing-masing macam wawancara yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1 Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Menurut Sugiyono (2016, p. 318), wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Pada dasarnya, peneliti telah mengetahui secara garis besar tentang informasi apa yang harus didapatkan pada saat pelaksanaan wawancara. Peneliti telah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan disertai dengan alternatif jawaban. Peneliti menyiapkan jenis pertanyaan yang sama untuk ditanyakan kepada semua subyek penelitian, yaitu: Komandan Kodim 0816/Siodarjo, Pasiops, Pasiter, dan Bintara yang menjabat Babinsa serta Assus Matra Darat

Kohanudnas. Pada saat wawancara, peneliti juga membawa instrumen penelitian dan alat bantu seperti alat perekam, kamera, Handycam, buku catatan, buku-buku petunjuk, prosedur tetap, referensi, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertahanan udara pasif.

2 Wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. (Sugiyono, 2016, p. 318). Dalam pengumpulan data pada saat penelitian, peneliti akan menggali sebanyak-banyaknya informasi mengenai peran Kodim 0816/SDA sebagai unsur sekaligus koordinator pertahanan udara pasif, kendala-kendala yang terjadi di lapangan, dan sejauh mana upaya yang sudah dilakukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan peran tersebut. Peneliti akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan ide atau pendapat dari setiap subyek penelitian terhadap permasalahan yang diangkat.

3 Wawancara Tak Berstruktur (*Unstructure Interview*)

Sugiyono (2016), menyatakan pengertian wawancara tidak terstruktur adalah semacam wawancara yang tidak terikat/bebas, peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara secara tersusun untuk mengumpulkan data. Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan dari semua unsur yang terdapat di Kodim 0816/SDA seperti yang telah dijelaskan sebelumnya guna memperoleh kedalaman data. Subyek yang telah dipilih sudah mewakili dari beberapa lapisan, mulai dari unsur pimpinan (Komandan), Unsur pembantu pimpinan (Staf) dan unsur pelaksana (Anggota) serta pejabat Asisten di satuan atas. Peneliti

akan melakukan wawancara secara informal diluar jam dinas baik dengan wawancara *face to face* maupun dengan menggunakan alat komunikasi.

Dalam kegiatan penelitian dengan menggunakan ketiga teknik wawancara tersebut, peneliti menggunakan jenis-jenis pertanyaan sesuai dengan teori Patton dalam Molleong (2002), yaitu:

1 Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman

Peneliti akan menanyakan apakah masing-masing dari subyek pernah memiliki pengalaman atau terlibat dalam melaksanakan pertahanan udara pasif.

2 Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat

Peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat *cross check* terhadap informasi yang diberikan sumber lain.

3 Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan

Peneliti akan menanyakan mengenai bagaimana perasaan subyek penelitian selama melaksanakan dinas di Kodim 0816/SDA dihadapkan dengan keterlibatan satuan sebagai unsur Hanud pasif dalam Operasi Pertahanan Udara nasional.

4 Pertanyaan tentang pengetahuan

Pada jenis pertanyaan ini, peneliti akan memberikan perhatian lebih dengan membuat lebih banyak pertanyaan guna melengkapi data dalam tesis.

5 Pertanyaan yang berkaitan dengan indera

Peneliti juga akan menyampaikan hal-hal guna menambahkan pemahaman mengenai pertahanan udara pasif berdasarkan pengalaman pribadi, kejadian di daerah lain dan hasil membaca guna mengetahui reaksi dari subyek penelitian.

6 Pertanyaan berkaitan dengan latar belakang atau demografi

Peneliti akan mencoba mendapatkan latar belakang dari subyek penelitian dihadapkan pada fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

3.3.2 Dokumen (*Document*)

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. (Sugiyono, 2016, p. 326). Selanjutnya menurut Arikunto (2006, p. 236), studi dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda program, dan sebagainya. Selain pengumpulan data dengan teknik wawancara, peneliti juga akan melakukan studi dokumentasi dengan memperoleh dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan subyek penelitian maupun dokumen yang berada di lokus penelitian terutama yang berkaitan pelaksanaan tugas pertahanan udara pasif. Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa rencana, laporan, prosedur tetap pertahanan udara pasif, buku-buku petunjuk, foto-foto kegiatan dan sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Dengan dokumentasi tersebut, maka data yang akan diperoleh oleh peneliti dapat lebih kredibel.

Dalam penelitian ini, peneliti membagi tahapan penelitian kedalam tiga tahapan, sebagai berikut:

- 1 Studi Orientasi. Studi ini dilakukan dengan penyusunan konsep usulan penelitian atau proposal. Dimana kegiatan ini dilakukan dengan cara berkonsultasi dengan para dosen pembimbing, diskusi dengan rekan-rekan mahasiswa lainnya, berkomunikasi dengan rekan-rekan lainnya yang dianggap memahami mengenai permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, mengumpulkan data awal dan studi orientasi terhadap satuan Kodim 0816/SDA secara garis besar;
- 2 Studi Eksplorasi Umum. Studi ini dilakukan dengan melaksanakan komunikasi awal kepada Komandan Kodim 0816/SDA dan Assus Matra Darat Kohanudnas berkaitan dengan masalah perijinan, studi literatur, serta peneliti mengikuti perkuliahan dengan mata kuliah metodologi riset;
- 3 Eksplorasi Terfokus. Kegiatan ini dilakukan untuk melaksanakan pengecekan terhadap hasil dari penelitian dan pembuatan laporan hasil penelitian. Adapun fokus dari kegiatan ini adalah pengumpulan data secara terperinci serta pengumpulan dan analisis data secara bersamaan.

3.4 Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016), Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan, menjelaskan ke dalam unit-unit, melaksanakan sintesa, menyusun ke dalam pola-pola, dan memilih mana data yang dianggap penting untuk dipelajari, serta membuat kesimpulan agar mudah dipahami baik oleh peneliti maupun pembaca. Peneliti memahami bahwa analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, sehingga peneliti akan menganalisis data yang diperoleh, selanjutnya akan peneliti kembangkan menjadi hipotesis. Hasil hipotesis berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan tersebut akan terus dicarikan data lagi secara

berulang-berulang sampai dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak.

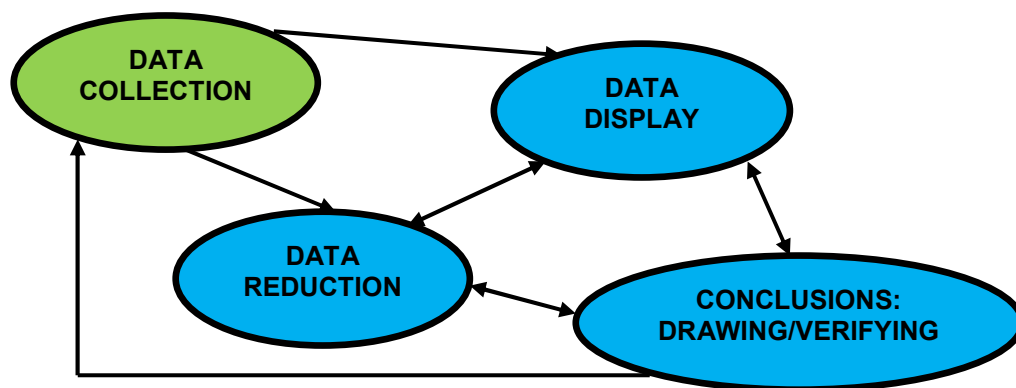
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Peneliti sudah menganalisis data jauh sebelum penelitian ini dibuat, peneliti telah memiliki pemikiran dan data awal mengenai peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD sebagai unsur pertahanan udara pasif. Peneliti juga memilih lokus penelitian di Kodim 0816/SDA mengingat di daerah ini banyak terdapat obyek vital nasional baik bandara internasional maupun perusahaan-perusahaan, jumlah penduduk yang cukup padat serta pembangunan ekonomi yang sangat pesat. Namun peneliti akan fokus pada teknik penelitian di lapangan.

Teknik analisis data pada penelitian ini difokuskan pada saat di lapangan, sejalan dengan proses pengumpulan data terkait penelitian analisis peran Kodim 0816/SDA sebagai unsur pertahanan udara pasif dalam mendukung Operasi Pertahanan Udara nasional. Adapun Teknik analisa data penelitian ini berdasarkan cara dari **Miles** dan **Huberman**, yaitu dengan menganalisis data secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman adalah sebagai berikut :

- 1 Reduksi data (*Data Reduction*), data berasal dari lapangan, dicatat dan dilakukan analisis secara reduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari pola dan temanya;
- 2 Penyajian Data (*Display Data*), dilakukan setelah mereduksi data, dengan penyajian data kedalam bentuk tabel, teks naratif, grafik, dan sejenisnya. Penyajian data dilakukan dengan mengorganisasikan, lalu menyusun data ke dalam suatu pola, agar dapat terhubung, dan memudahkan untuk dipahami;

- 3 Penarikan kesimpulan (*Conclusion Drawing*), yaitu dengan menarik kesimpulan yang bersifat kredibel dan kemudian diverifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah suatu temuan yang baru dan belum pernah ada. (p. 336)

Berikut ini akan digambarkan dalam bentuk bagan tentang tahapan dalam menganalisis data berdasarkan metode Miles & Huberman, sebagai berikut:



Gambar 3.2 Bagan Teknik Analisis Data Model Interaktif
 Sumber: Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods), (2016).

Dalam melaksanakan analisis data, peneliti juga mempedomani tahapan-tahapan dalam melakukan analisis data terutama saat pengumpulan data, sebagai berikut:

- 1 Segera setelah proses pengumpulan data selesai/berakhir, peneliti akan membaca ulang, memahami, dan membuat ringkasan tulisan;
- 2 Peneliti akan membaca ulang keseluruhan catatan dilanjutkan membuat ringkasan sementara dengan cara mensitesiskan hal-hal yang sudah diketahui sebelumnya tentang fenomena/permasalahan yang terdapat di latar belakang penelitian. Setelah mensitesiskan data, akan terdapat hal-hal yang perlu

mendapatkan penegasan sehingga kemungkinan diperlukan penelitian ulang. Ringkasan yang dibuat oleh peneliti bertujuan untuk melengkapi catatan-catatan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian;

- 3 Setelah data dirasakan telah lengkap dan peneliti kembali dari lokus penelitian, catatan hasil penelitian dianalisa secara intens dan mendalam. Tahapan ini disebut dengan analisa sesudah penelitian.

3.5 Prosedur Penelitian

3.5.1 Instrumen Penelitian

Pada penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Hal ini senada dengan pendapat Lincoln and Guba (1986) dalam Sugiyono (2016, p. 306), menyatakan bahwa:

“The instrument of choice in naturalistic inquiry is the human. We shall see that other forms of instrumentation may be used in later phases of the inquiry, but the human is the initial and continuing mainstay. But if the human instrument has been used extensively in earlier stages of inquiry, so that an instrument can be constructed that is grounded in the data that human instrument has produced”

Peneliti sebagai *human instrument* akan menentukan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data dan akan membuat kesimpulan berdasarkan temuan yang didapat selama penelitian. Untuk pengumpulan data primer, peneliti akan melakukan dengan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi jika memungkinkan terhadap subyek penelitian. Oleh sebab itu pedoman wawancara disiapkan sebagai instrumen penelitian. Sedangkan untuk data sekunder dilakukan dengan metode studi dokumentasi berupa

produk-produk rencana, laporan, prosedur tetap dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan peran Kodim 0816/SDA sebagai unsur pertahanan udara pasif dalam mendukung Operasi Pertahanan Udara nasional. Dalam pengumpulan data tersebut, peneliti juga melengkapi dengan alat bantu seperti perekam, kamera, dan *handycam*.

3.5.2 Pengujian Keabsahan dan Keterandalan Data

Sugiyono (2016) menerangkan, “Uji keabsahan data meliputi uji kredibilitas data (validitas internal), uji depenabilitas (reliabilitas) data, uji transferabilitas (validitas eksternal/generalisasi), dan uji komfirmabilitas (obyektivitas). Namun yang utama adalah uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dilakukan dengan: perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, *member check*, dan analisis kasus negatif”. (p. 383). Berikut ini akan dijelaskan mengenai uji keabsahan data, yaitu:

1 Uji Kredibilitas Data

Dalam uji kredibilitas data, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh peneliti, antara lain: *Pertama*, Peneliti akan melakukan perpanjangan pengamatan terhadap subyek penelitian baik Dandim, Pasiops, Pasiter, Babinsa dan Assus Matra Darat Kohanudnas dengan melakukan wawancara baik pada kesempatan secara *face to face* maupun melalui alat komunikasi, hal ini dilakukan sampai peneliti yakin tidak ada lagi perubahan data. Data yang tidak berubah dapat meyakinkan peneliti bahwa data yang didapat sudah benar dan kredibel. *Kedua*, Peneliti akan meningkatkan ketekunan dengan cara membaca referensi buku berupa Protap Opshanud Kohanudnas maupun Bujuknis Hanud Pasif Aspek Darat dan buku-buku lainnya yang terkait serta hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dengan temuan yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk menambah wawasan peneliti agar semakin luas dan tajam sehingga dapat

digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dapat dipercaya atau tidak.

Ketiga, Triangulasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode triangulasi sumber data dengan melakukan *cross check* terhadap subyek penelitian yaitu Komandan Kodim, Perwira Staf Operasi, Perwira Staf Teritorial, dan Babinsa. *Keempat*, Menggunakan bahan referensi. Peneliti akan menggunakan rekaman hasil wawancara, video hasil rekaman gambar, foto-foto wawancara untuk membuktikan data yang telah ditemukan agar dapat dipercaya. *Kelima*. Peneliti akan mengadakan *member check* agar mengetahui sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan data yang diberikan oleh subyek penelitian.

2 Uji Transferabilitas

Peneliti akan membuat laporan penelitian secara rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Peneliti menginginkan pembaca dapat dengan jelas memahami tentang penelitian yang dibuat yang pada akhirnya hasil dari penelitian ini dapat diaplikasikan di seluruh satuan komando kewilayahan TNI guna melaksanakan peran akan tugas sebagai unsur pertahanan udara pasif dalam rangka mendukung Operasi Pertahanan Udara nasional.

3 Uji Depenability

Guna memenuhi uji depenability, peneliti benar-benar melakukan penelitian di lokus dan subyek penelitian. Peneliti melengkapi hal ini dengan hasil rekaman wawancara, hasil video dan foto-foto selama melakukan penelitian di lapangan guna memperoleh data yang reliabel atau *dependable*.

4 Uji Konfirmability

Dalam rangka memenuhi uji konfirmability, peneliti akan melaksanakan pengujian terhadap hasil penelitian yang dilakukan di lapangan. Peneliti akan berusaha mendapatkan hasil penelitian yang merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan. Hal ini hampir sama dengan uji dekenability, dimana peneliti menghindari tersedianya data tanpa adanya proses penelitian di lapangan.

Keterandalan data didukung dengan berbagai cara dan waktu. Kemudian dilanjutkan dengan menggunakan bahan referensi yaitu didukung dengan membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti terkait penelitian analisis peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD di Sidoarjo sebagai unsur pertahanan udara pasif dalam mendukung Operasi Pertahanan Udara nasional melalui hasil wawancara dan rekaman wawancara serta studi dokumentasi.

3.6 Definisi Operasional

- 1 Komando Distrik Militer adalah komando pelaksana Korem di bidang fungsi teritorial yang berbentuk kewilayahan bersifat taktis dan berkedudukan langsung di bawah Danrem dengan tugas pokok menyelenggarakan pembinaan kesiapan operasional komandonya, pembinaan teritorial dan perlawanan rakyat dalam rangka menciptakan ruang, alatdan kondisi juang yang tangguh serta kekuasaan miiter dalam keadaan darurat di wilayahnya;
- 2 Unsur Pertahanan Udara Pasif adalah satuan-satuan yang terlibat di dalam Hanud pasif dalam rangka melakukan upaya pencegahan, membatasi, menanggulangi dan mengurangi efektifitas serangan udara lawan terhadap obyek vital nasional serta penanggulangan dan pengurangan kerugian akibat serangan udara lawan;

- 3 Operasi Pertahanan Udara adalah merupakan kegiatan untuk menghadapi setiap ancaman yang menggunakan media udara guna menegakkan kedaulatan wilayah udara nasional;
- 4 Sistem Pertahanan Udara Nasional (Sishanudnas) merupakan suatu sistem yang digunakan oleh Kohanudnas dalam melaksanakan tugasnya untuk mempertahankan keunggulan di udara, sebagai penegak hukum di udara, penjaga kedaulatan serta keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional dalam konteks Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP);
- 5 Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara;
- 6 Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman;
- 7 Prosedur Tetap adalah kumpulan instruksi, perintah dan sejenisnyayang berlaku waktu yang cukup panjang bagi suatu organisasi, lembaga, satuan, komando dan sebagainya bagi pelaksanaan tugas rutin baik taktis maupun administrasi;
- 8 Pertahanan udara adalah segala usaha dan tindakan yang direncanakan untuk membinasakan/menghancurkan, menghalau/membatalkan dan mengurangi berhasilnya serta menanggulangi akibat serangan udara lawan. Kegiatan/tindakan

tersebut meliputi pertahanan udara aktif dan pertahanan udara pasif;

- 9 Komandan Unsur Pertahanan Udara Pasif adalah pejabat unsur pertahanan udara pasif yang bertanggung jawab kepada Pangkosekhanudnas atas kesiapan Satuan Tugas dan Pos Komando pertahanan udara pasif untuk mencegah, membatasi, menanggulangi dan mengurangi kerugian serangan udara musuh di daerah kewenangannya.

BAB 4

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Data Penelitian

Tesis ini mengambil fokus penelitian pada peran Satuan Komando Kewilayahan TNI AD khususnya Komando Distrik Militer (Kodim) 0816/Sidoarjo sebagai unsur pertahanan udara pasif dalam rangka mendukung operasi pertahanan udara nasional. Dalam bab ini akan disampaikan hasil penelitian berupa wawancara dan studi dokumentasi yang telah dilakukan terhadap unsur-unsur yang berada di Kodim 0816/SDA baik unsur pimpinan yaitu Komandan Kodim (Dandim), Unsur pembantu pimpinan yaitu Perwira Seksi Operasi (Pasiops), Perwira Seksi Teritorial (Pasiter), dan Bintara Kodim 0816/SDA. Untuk melengkapi data dalam tesis ini, penulis juga memperoleh data dari Assus Matra Darat Kohanudnas. Penelitian dengan metode penelitian kualitatif ini dilakukan sepanjang bulan juli s.d Agustus 2017 di Markas Komando Kodim 0816/SDA. Penelitian ini juga dilakukan di Markas Komando Kohanudnas Jakarta. Adapun data yang diperoleh berupa data primer maupun data sekunder yang kemudian diolah untuk menghasilkan suatu pemecahan terhadap permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peran akan tugas Kodim 0816/SDA sebagai unsur pertahanan udara pasif, kendala-kendala apa yang dihadapi, peluang-peluang yang ada serta strategi yang dapat dilakukan guna pelaksanaan peran tersebut dalam rangka mendukung operasi pertahanan udara nasional. Peran Kodim 0816/SDA khususnya dan seluruh unsur pertahanan udara pasif lainnya pada umumnya sangat vital mengingat hal ini merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, dan Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.

4.1.1 Profil Komando Distrik Militer 0816/SDA.

Markas Komando Kodim 0816/SDA berada di Jalan Lingkar Timur, Ds. Kemiri, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234. Kodim 0816/SDA merupakan satuan yang berada di bawah Komando Resort Militer 084/Bhaskara Jaya Kodam V/Brawijaya. (Mabesad, 2012)

Tugas pokok Kodim 0816 Sesuai dengan peraturan Kasad Nomor Perkasad/13/III/2008 tanggal 28 Maret 2008, yaitu menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan teritorial, untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan negara di wilayah Kodim 0816, untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas - tugas Kodim 0816/SDA untuk melaksanakan tugas pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1 Melaksanakan tugas bidang pertahanan dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP);
- 2 Menjaga keamanan wilayah jajaran Kodim 0816;
- 3 Melaksanakan pembangunan dan pengembangan gelar kekuatan jajaran Kodim 0816 sesuai petunjuk dari komando atas;
- 4 Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan jajaran Kodim 0816.

Tugas Kodim 0816 TA. 2017 dengan memperhatikan tugas pokok Kodim 0816 dan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, maka tugas Kodim 0816 TA. 2017 sebagai berikut :

- 1 Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, yaitu dengan melakukan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer selain Perang (OMSP), dengan prioritas :
 - a. Memelihara dan meningkatkan kemampuan Satintel untuk melaksanakan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini dari setiap gejala kerawanan dan ancaman agar tidak berkembang menjadi ancaman nyata;
 - b. Menyiapkan dan menyiagakan satuan dalam rangka tugas pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Pemerintahan Asing yang sedang berada di wilayah Kodim 0816;
 - c. Menyiapkan satuan dalam rangka tugas perbantuan kepada Polri khususnya dalam mengamankan wilayah pasca penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2017 atas permintaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menyiapkan dan menyiagakan satuan dalam rangka tugas membantu pemerintah menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan serta pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*Search dan Rescue*);
 - e. Menyiapkan dan menyiagakan satuan untuk secara bersama-sama menangani/mencegah aksi terorisme.
- 2 Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat, yaitu dengan melakukan segala upaya, pekerjaan dan kegiatan untuk mewujudkan penampilan postur TNI AD yang merupakan keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan Kodim 0816 serta

tersusunnya komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara matra darat, dengan prioritas :

- a. Menyiapkan dan memelihara kemampuan operasional Kodim 0816 yang profesional dengan cara meningkatkan kemandirian satuan, menata organisasi dan mengembangkan gelar satuan untuk menangkal segala bentuk ancaman dan meningkatkan sinergitas dan interoperabilitas antara komponen militer dan non militer;
- b. Melanjutkan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi Kodim 0816 yang meliputi aspek struktural, doktrin dan kultural serta hukum dalam upaya meningkatkan kinerja Kodim 0816;
- c. Menyiapkan dan memelihara kemampuan operasional Kodim 0816 baik penyiapan satuan maupun kemampuannya dalam rangka mendukung tugas penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
- d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat, dengan menyelenggarakan perencanaan, pengembangan, pengerahan dan pengendalian wilayah pertahanan untuk kepentingan pertahanan negara di darat sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) melalui pembinaan teritorial yaitu :
 - Membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan aspek darat yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan Operasi Militer untuk Perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta;

- Membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka penguatan dalam mengupayakan Binter Kodim 0816 untuk dapat diakui dan diterima secara akademis sebagai suatu *knowledge* (pengetahuan) serta menjadikan Binter sebagai satu – satunya sistem untuk dapat mencapai kemanunggalan TNI Rakyat secara kokoh;
- Membantu pemerintah dalam memberdayakan rakyat dengan melaksanakan kegiatan operasi bhakti TNI;
- Memperkuat lini SDM komando kewilayahan melalui proses penyediaan tenaga untuk prajurit Satkowil sesuai dengan kompetensi dan klasifikasi psikologi yang diperlukan sehingga memiliki keterampilan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tipologi wilayah penugasan. Kapabilitas yang dipersyaratkan untuk prajurit Satkowil adalah personel yang mampu melaksanakan komunikasi sosial dengan baik, adaptabilitas terhadap lingkungan yang tinggi serta memiliki *situational awareness* yang baik;
- Mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat dengan senantiasa bersama – sama rakyat dalam menghadapi permasalahan bangsa dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Dalam hal ini prajurit Kodim 0816 harus mampu menampilkan sosok prajurit panutan dan prajurit yang berpegang teguh kepada jati diri prajurit dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kemampuan Kodim 0816/SDA yang tertuang dalam Organisasi dan Tugas Komando Distrik Militer (Orgas Kodim) pada pasal 4 kemampuan dan batas kemampuan Kodim adalah sebagai berikut :

- 1 Mampu menyelenggarakan Bhakti TNI dan Operasi Bhakti dalam rangka membantu tugas pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- 2 Mampu menyelenggarakan Pembinaan Perlawanan Wilayah dengan merekrut komponen cadangan dan komponen pendukung untuk melaksanakan latihan dasar militer;
- 3 Mampu melaksanakan Komunikasi Sosial dengan aparat pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama serta komponen masyarakat;
- 4 Mampu menyelenggarakan pendataan Geografi, Demografi, Kondisi Wilayah serta SDA, SDM, dan SDB untuk kepentingan Ruang Alat dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara;
- 5 Mampu menyelenggarakan fungsi intelijen yang meliputi cuaca, medan dan musuh untuk kepentingan keamanan wilayah;
- 6 Mampu menyelenggarakan dukungan logistik wilayah untuk mendukung Kompartemen Strategis dalam menyelenggarakan operasi pertempuran;
- 7 Mampu memberikan bantuan kepada Pemda;
- 8 Mampu memberikan bantuan kepada Polres di bidang keamanan wilayah bila diminta.

Batas kemampuan Kodim 0816/SDA adalah sebagai berikut :

- 1 Kodim memiliki keterbatasan kemampuan dalam mengatasi bencana alam yang berskala nasional;
- 2 Kodim memiliki keterbatasan kemampuan menyelenggarakan operasi militer untuk perang secara berdiri sendiri;

- 3 Kodim memiliki keterbatasan kemampuan mengatasi konflik komunal, vertikal maupun horizontal;
- 4 Kodim memiliki keterbatasan kemampuan mengatasi operasi militer dalam skala besar.

4.1.2 Tugas dan Kewajiban Perwira Staf Operasi Kodim 0816/SDA

Tugas Perwira Staf Operasi Kodim 0816/SDA adalah sebagai berikut :

- 1 Menyelenggarakan fungsi operasi yang meliputi organisasi, operasi dan latihan;
- 2 Melaksanakan perencanaan pemeliharaan kekuatan dan kemampuan kesatuan, pelaksanaan latihan dan pelaksanaan operasi tempur serta teritorial;
- 3 Melaksanakan pengawasan staf, yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- 4 Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dandim sesuai dengan bidang tugasnya;
- 5 Menyiapkan laporan kepada satuan atas.

Pasiops dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dandim, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasdim. (Mabesad, 2012)

4.1.3 Tugas dan Kewajiban Perwira Staf Teritorial Kodim 0816/SDA

Tugas dan kewajiban Perwira Staf Teritorial Kodim 0816/SDA adalah sebagai berikut :

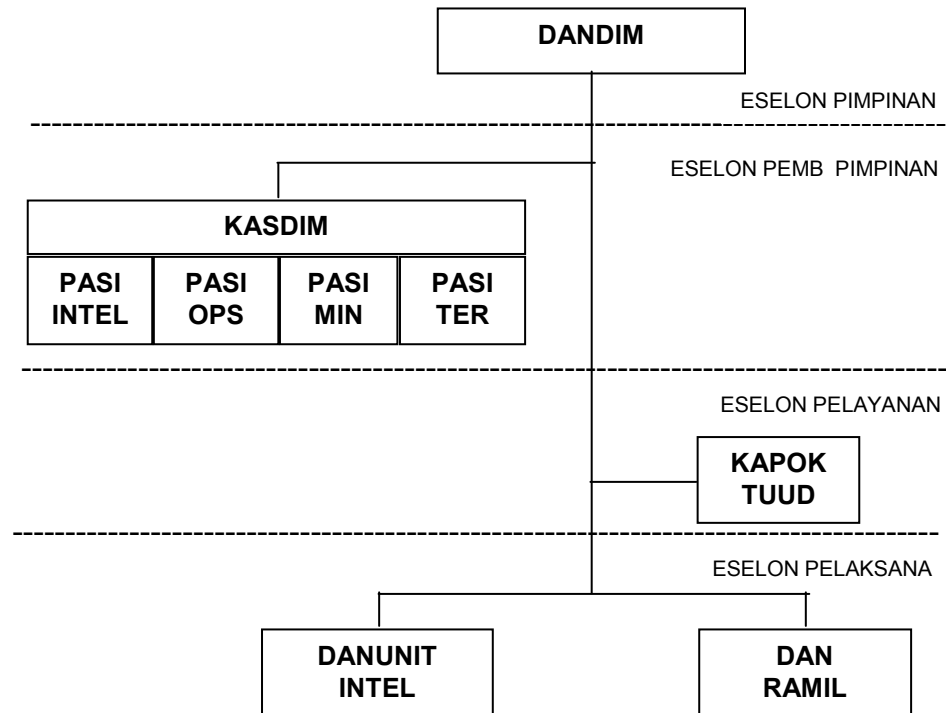
- 1 Menyelenggarakan fungsi teritorial yang meliputi kegiatan pembinaan kemampuan teritorial, Bhakti TNI, Pembinaan Perlawanan Wilayah dan Komunikasi Sosial;

- 2 Menyelenggarakan perencanaan kegiatan pembinaan teritorial;
- 3 Menyelenggarakan perencanaan pembinaan Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial untuk menciptakan Ruang Alat dan Kondisi Juang yang tangguh di wilayahnya;
- 4 Melaksanakan pendataan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB) serta sarana dan prasarana lainnya untuk menyelenggarakan perencanaan pembinaan komponen cadangan dan komponen pendukung;
- 5 Menyiapkan Petunjuk Teritorial (Jukter), Analisa Potensi Wilayah (Anpotwil), Analisa Potensi Pertahanan (Anpothan) dan Rencana Pembinaan Teritorial (Renbinter);
- 6 Melaksanakan pengawasan staf tentang kegiatan pembinaan teritorial yang telah direncanakan;
- 7 Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Dandim sesuai dengan bidang tugasnya;
- 8 Menyiapkan laporan sesuai dengan bidang tugasnya kepada satuan atas.

Pasiter dalam melaksanakan tugas kewajibannya bertanggung jawab kepada Dandim, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasdim. (Mabesad, 2012)

4.1.4 Struktur Organisasi Kodim 0816/SDA

Berikut ini disampaikan Struktur Organisasi Kodim 0816/SDA sebagai berikut :



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Komando Distrik Militer
 Sumber : Markas Besar Angkatan Darat, Organisasi dan Tugas Komando Distrik Militer, (2012).

Organisasi Kodim disusun berdasarkan eselon dan jabatan sebagai berikut :

- 1 Eselon Pimpinan. Komandan Komando Distrik Militer, disingkat Dandim;
- 2 Eselon Pembantu Pimpinan.
 - a. Kepala Staf Komando Distrik Militer, disingkat Kasdim
 - b. Perwira Staf Intelijen, disingkat Pasiintel;
 - c. Perwira Seksi Operasi, disingkat Pasiops;
 - c. Perwira Staf Personel, disingkat Pasipers;
 - d. Perwira Staf Logistik, disingkat Pasilog;
 - e. Perwira Seksi Teritorial, disingkat Pasiter.

- 3 Eselon Pelayanan. Kepala Kelompok Tata Usaha dan Urusan Dalam, disingkat Kapoktuud;
- 4 Eselon Pelaksana.
 - a. Koramil 0816/01 Kota (14 Kelurahan, 10 Desa);
 - b. Koramil 0816/02 (24 Desa);
 - c. Koramil 0816/03 (15 Desa);
 - d. Koramil 0816/04 (6 Kelurahan. 13 Desa);
 - e. Koramil 0816/05 (13 Desa);
 - f. Koramil 0816/06 (19 Desa);
 - g. Koramil 0816/07 (19 Desa);
 - h. Koramil 0816/08 (15 Desa);
 - i. Koramil 0816/09 (19 Desa);
 - j. Koramil 0816/10 (20 Desa);
 - k. Koramil 0816/11 (20 Desa);
 - l. Koramil 0816/12 (20 Desa);
 - m. Koramil 0816/13 (23 Desa);
 - n. Koramil 0816/14 (16 Desa);
 - o. Koramil 0816/15 (19 Desa);
 - p. Koramil 0816/16 (17 Desa);
 - q. Koramil 0816/17 (15 Desa);
 - r. Koramil 0816/18 (16 Desa);
 - s. Komandan Unit Intelijen Kodim, disingkat Danunitinteldim.

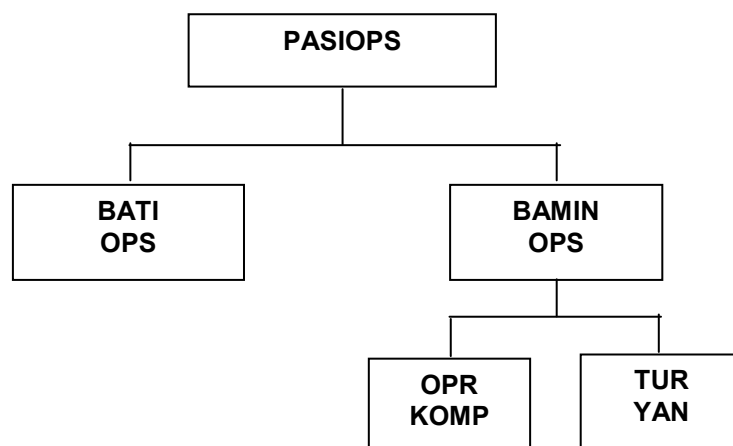
Secara umum struktur organisasi Kodim 0816/SDA terdiri dari Unsur Pimpinan yaitu Komandan Kodim (Dandim), Unsur Pembantu Pimpinan terdiri dari Kepala Staf Kodim (Kasdim), Staf Intelijen, Staf Operasi, Staf Personel, Staf Logistik, Staf Teritorial dan Kelompok Tata Usaha Urusan Dalam (TUUD) sebagai unsur pelayanan. Unsur pelaksana terdiri dari Unit Intelijen Type C dan Komando Rayon Militer (Koramil) yang berjumlah 18 Koramil.

4.1.5 Struktur Organisasi Staf Operasi Kodim 0816/SDA

Staf Operasi Kodim 0816/SDA dikepalai oleh Pasiops yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh satu Bintara Tinggi yang dijabat oleh seorang Bati Angkatan Darat berpangkat Pembantu Letnan dan satu Bintara yang dijabat oleh seorang Bintara Angkatan Darat berpangkat Sersan Mayor, terdiri dari :

- 1 Bintara Tinggi Operasi/Latihan, disingkat Batiops/lat;
- 2 Bintara Administrasi, disingkat Bamin.

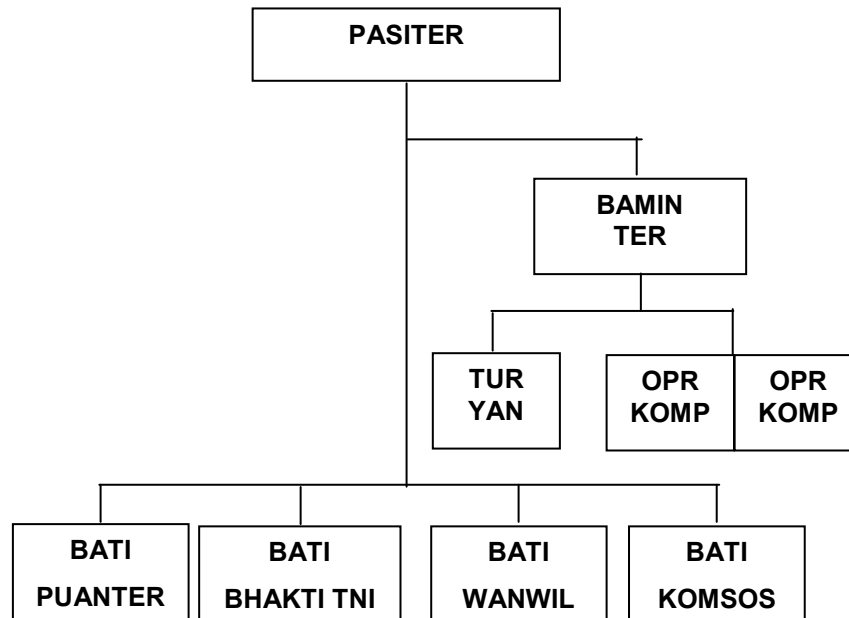
Berikut ini disampaikan Struktur Organisasi Staf Operasi Kodim 0816/SDA sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Staf Operasi Kodim 0816/SDA
 Sumber : Markas Besar Angkatan Darat, Organisasi dan Tugas Komando Distrik Militer, (2012).

4.1.6 Struktur Organisasi Staf Teritorial Kodim 0816/SDA

Berikut ini disampaikan Struktur Organisasi Staf Teritorial Kodim 0816/SDA sebagai berikut :



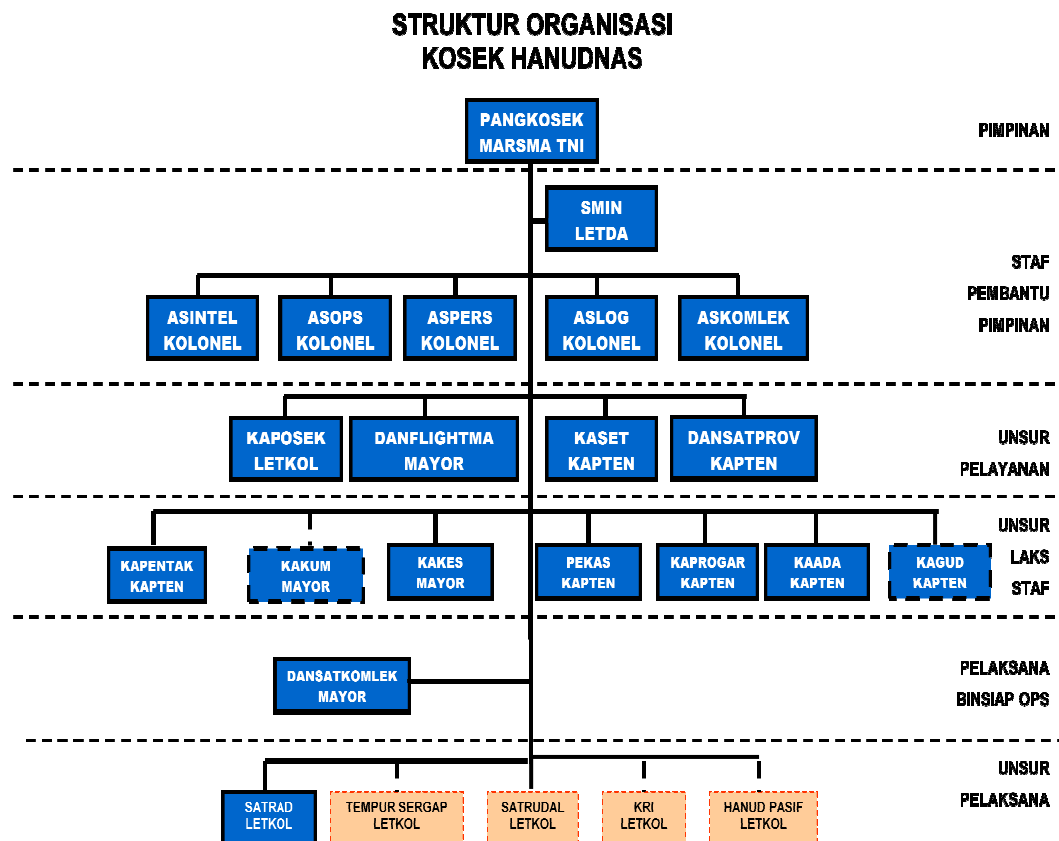
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Staf Teritorial Kodim 0816/SDA
 Sumber : Markas Besar Angkatan Darat, Organisasi dan Tugas Komando Distrik Militer, (2012).

Staf Teritorial Kodim 0816/SDA dikepalai oleh Pasiter yang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh empat Bintara Tinggi yang masing-masing dijabat oleh seorang Bati Angkatan Darat berpangkat Pembantu Letnan dan satu Bintara yang dijabat oleh seorang Bintara Angkatan Darat berpangkat Sersan Mayor, terdiri dari :

- 1 Bintara Tinggi Kemampuan Teritorial, disingkat Batipuanter;
- 2 Bintara Tinggi Bhakti TNI, disingkat Bati Bhakti TNI;
- 3 Bintara Tinggi Perlawanan Wilayah, disingkat Batiwanwil;
- 4 Bintara Tinggi Komunikasi Sosial, disingkat Batikomsos;
- 5 Bintara Administrasi, disingkat Bamin.

4.1.7 Struktur Organisasi dan Tugas Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas)

Berikut ini disampaikan Struktur Organisasi Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional (Kosekhanudnas) sebagai berikut :



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Kosek Hanudnas
 Sumber : Kohanudnas, Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Kosekhanudnas, (2015).

Tugas dan tanggung Komando Sektor Hanudnas adalah sebagai berikut :

- 1 Kosekhanudnas adalah pembantu Kohanudnas dalam menyelenggarakan pembinaan dan operasi pertahanan udara;
- 2 Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pangkosekhanudnas mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Memimpin Kosekhanudnas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pembinaan dan operasi pertahanan udara;
 - b. Menentukan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan dalam rangka memimpin Kosekhanudnas guna menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi dan tugas Kosekhanudnas;
 - c. Mengkoordinasikan, mengawasi, memberikan pengarahan, terhadap penyelenggaraan sistem operasi Hanud;
 - d. Mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan penyelenggaraan sistem operasi Hanud;
 - e. Menyenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan badan/instansi di dalam dan di luar TNI yang ada di wilayahnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok Kosekhanudnas;
 - f. Memberikan saran dan masukan kepada Pangkohanudnas mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi Hanud dan pembinaan unsur-unsur Hanud TNI dan non TNI;
 - g. Menyenggarakan koordinasi terhadap pelaksanaan kerjasama Hanud terkoordinasi dengan negara tetangga sesuai petunjuk Pangkohanudnas;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang dibebankan oleh Pangkohanudnas;
 - i. Apabila Pangkosekhanudnas berhalangan, pelaksanaan tugas pembinaan dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk.
- 3 Pangkosekhanudnas bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Pangkohanudnas.

Tugas dan tanggung jawab Staf Operasi Kosekhanudnas adalah sebagai berikut :

- 1 Sops adalah Staf umum Kosekhanudnas yang bertugas dibidang operasi dan latihan;
- 2 Dalam melaksanakan tugas tersebut pasal 18 subpasal a, Sops mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasi Pertahanan udara di wilayah Kosekhanudnas;
 - b. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan latihan unsur Hanud di Jajaran Kosekhanudnas;
 - c. Mengkoordinasikan jadwal operasi Matud dan pengamanan udara VVIP/VIP;
 - d. Memberikan supervisi pada Kaposek terhadap pelaksanaan Operasi Hanud;
 - e. Merumuskan dan menyiapkan saran kebijakan untuk pengerahan unsur-unsur Hanud TNI, non TNI yang akan dilibatkan dalam operasi Hanud Aktif dan Hanud Pasif;
 - f. Merumuskan dan menyiapkan pengembangan sistem dan metode operasi dan latihan pertahanan udara Pernika;
 - g. Membuat produk staf untuk perencanaan operasi dan latihan serta Kontinjensi;
 - h. Menyenggarakan dan mengawasi kegiatan Lambangja;
 - i. Melaksanakan koordinasi dalam rangka operasi dan latihan Hanud terkoordinasi dengan Negara lain;

- j. Memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima sesuai bidang tugasnya;
 - k. Melaksanakan tugas lain sesuai petunjuk Panglima.
3. Sops dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- a. Pembantu Madya Operasi disingkat Bandyoops;
 - b. Pembantu Madya Latihan disingkat Bandyalat;
 - c. Pembantu Madya Keselamatan Terbang dan Kerja disingkat Bandy Lambangja.
4. Sops dipimpin oleh Asisten Operasi disingkat Asops, dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Pangkosekhanudnas.(Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Kosekhanunas, 2015)

4.1.8 Susunan Organisasi, Tugas dan Tanggung Jawab Pertahanan Udara Pasif Aspek Darat

Susunan organisasi pertahanan udara pasif aspek darat terdiri dari:

- 1. Pangkosek Hanudnas;
- 2. Danpuskor Hanud Pasif : Dansatkowil;
- 3. Pakor Hanud Pasif : Dansat Arhanud / Perwira Arhanud yang ditunjuk;
- 4. Dansubkor Hanud Pasif : Kepala Obyek Vital Nasional (Ka. Obvitnas);
- 5. Seksi-seksi.

Tugas dan tanggung jawab Danpuskor Hanud Pasif yang dalam hal ini Dansatkowil TNI AD adalah sebagai berikut :

- 1 Menentukan kebijakan umum tentang Hanud pasif di wilayah tanggung jawabnya;
- 2 Menentukan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan dukungan dalam Hanud pasif;
- 3 Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya udara di wilayah tanggung jawabnya;
- 4 Menghimpun dan mendata seluruh kekuatan personel dan materiil dalam rangka mengoptimalkan dukungan Hanud Pasif;
- 5 Mengkoordinir pembuatan Protap Hanud;
- 6 Melaksanakan pengawasan terhadap semua Koordinator Hanud pasif yang ada dibawahnya;
- 7 Melakukan koordinasi ke atas, ke samping, dan ke bawah;
- 8 Bertanggung jawab atas terselenggaranya Hanud pasif di wilayah tanggung jawabnya.(Mabesad, 2016)

4.1.9 Gambaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Sidoarjo adalah sebuah Kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, merupakan salah satu Kabupaten terbesar dengan perkembangan ekonomi cukup pesat dan jumlah penduduk yang cukup padat. Berikut ini merupakan kondisi Kabupaten antara lain :

- 1 Letak Daerah. Daerah Kabupaten Sidoarjo merupakan wilayah yang berada di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo secara Geografis terletak di pantai selat Madura masuk dalam wilayah kerja Pembantu Gubernur Jatim di Surabaya dan terletak antara 112,5° s/d 112,9° Bujur Timur dan 7,3° s/d 7,5° Lintang Selatan. Sebelah Utara Daerah ini dibatasi oleh sungai Mas, sebelah Timur selat Madura, Sebelah selatan sungai Porong dan

sebelah Barat perpecahan sungai brantas menjadi sungai Mas dan sungai Porong;

- 2 Luas Daerah. Luas Kabupaten Sidoarjo adalah 7.142.425 Ha (714.243 Km²) yang meliputi 18 Kecamatan;
- 3 Jumlah Penduduk. Kabupaten Sidoarjo memiliki jumlah penduduk pada Tahun 2016 sebesar **2.092.608** jiwa.(Data Wilayah Kodim 0816/SDA, 2017);
- 4 Data Obyek Vital. Data obyek vital yang terdapat di Kabupaten Sidoarjo baik berupa instansi militer, instansi sipil, obyek vital dan obyek rawan lainnya sebagai lampiran.(Data Obyek Vital Kodim 0816/SDA, 2017)

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Peran Kodim 0816/SDA Selaku Unsur Sekaligus Koordinator Seluruh Unsur Hanud Pasif Dalam Pelaksanaan Opshanudnas

Peran akan tugas Kodim 0816/SDA selaku unsur dan koordinator Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo sejauh ini belum dilaksanakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Letkol Inf Fadli mulyono sebagai Komandan Kodim 0816/SDA sebagai berikut :

“Sejauh ini Kodim belum pernah melaksanakan perannya dalam Operasi Hanud Pasif. Kodim juga tidak pernah melaksanakan operasi maupun latihan Hanud pasif”

Pernyataan Dandim 0816/SDA ini diperkuat oleh pernyataan Kapten Inf Kabul Termanto selaku Perwira Seksi Operasi (Pasiops) Kodim 0816/SDA sebagai berikut :

“Kodim 0816SDA belum pernah melaksanakan tugas-tugas seperti yang diatur di dalam Hanud pasif. Selama saya berdinis di satuan ini belum pernah mendengar dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang

berkaitan dengan Hanud pasif. Saya baru mendengar tentang peran Kodim dalam Hanud pasif dari Peneliti. Namun untuk tugas-tugas lain seperti penanganan perang darat dan bencana alam sudah dilaksanakan”

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kapten Arh Bambang Suryono selaku Pasiter Kodim 0816/SDA, sebagai berikut:

“Sampai dengan saat ini Kodim 0816/SDA tidak menyiapkan wilayah untuk kepentingan Hanud pasif. Selama ini Kodim hanya menyiapkan wilayah untuk kepentingan perang darat dan penanggulangan bencana alam”

Berdasarkan ketiga pernyataan diatas dapat diketahui bahwa selama ini Kodim 0816/SDA tidak pernah melaksanakan peran akan tugas sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan unsur-unsur yang ada di internal Kodim mengenai mekanisme dan pelaksanaan Hanud pasif. Selama ini Kodim 0816/SDA hanya menyiapkan wilayah untuk kepentingan perang darat dan penanggulangan akibat bencana alam. Selain itu, Kodim 0816/SDA belum pernah melaksanakan latihan maupun operasi pertahanan udara pasif. Lebih jauh mengenai belum terlaksananya peran akan tugas ini dinyatakan oleh Serda Purwanto sebagai Babinsa Ramil 16 Sukodono Kodim 0816/SDA sebagai berikut :

“Saya belum melakukan hal-hal yang berkaitan dengan tugas Hanud pasif dikarenakan saya tidak mengetahui akan tugas tersebut”

Untuk lebih meyakinkan akan keadaan yang terjadi saat ini, mengutip pernyataan Kolonel Arh M. Hasyim sebagai Assus Matra Darat Kohanudnas sebagai berikut :

“Saya rasa kurang optimal, banyak Satkowil TNI AD khususnya Kodim yang tidak mengetahui tugas ini. Banyak memang yang harus dibenahi khususnya dalam pelaksanaan mekanisme Operasi Pertahanan Udara Nasional. Tapi memang harus pelan-pelan”

Komandan Komando Teritorial setempat sebagai Komandan Unsur Pertahanan Udara Pasif membentuk organisasi dan menggelar Pos Komando (Posko) pertahanan udara pasif di tingkat Kabupaten/Kota sebagai Komando Operasi Pertahanan Udara Pasif, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satuan tugas - satuan tugas serta seksi-seksi.(Kohanudnas, Protap Opshanud, 2015). Pos Komando digunakan sebagai sarana komando dan pengendalian terhadap semua unsur yang berada di bawah kendalinya. Selaku Komandan Unsur Hanud pasif, Dansatkowil TNI AD bertanggung jawab terhadap adanya Posko. Namun berdasarkan pernyataan Letkol Inf Fadli mulyono sebagai Komandan Kodim 0816/SDA sebagai berikut :

“Posko Hanud pasif belum ada di wilayah Kodim 0816/SDA karena satuan belum pernah terlibat di dalam latihan Hanud pasif”

Pernyataan Dandim 0816/SDA diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Kapten Inf Kabul Tarmanto selaku Perwira Seksi Operasi (Pasiops) Kodim 0816/SDA sebagai berikut :

“Kodim 0816/SDA tidak memiliki Posko Hanud pasif”

Sejauh ini Posko Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo belum terbentuk. Hal ini disebabkan karena Kodim belum pernah terlibat di dalam latihan Hanud pasif.

Dansatkowil berkewajiban untuk melakukan koordinasi dan komunikasi dengan unsur Hanud pasif lainnya seperti Pemerintah Daerah, Polres Sidoarjo, Obyek vital dan masyarakat. Koordinasi dan komunikasi antar sesama unsur Hanud pasif bertujuan untuk menyamakan persepsi dan pandangan di dalam pelaksanaan Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo. Berikut pernyataan Letkol Inf Fadli mulyono sebagai Komandan Kodim 0816/SDA :

“Kodim belum pernah melaksanakan komunikasi maupun koordinasi terhadap unsur Hanud pasif lainnya terkait pelaksanaan operasi ini”

Pernyataan Dandim diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan Kapten Inf Kabul Termanto selaku Perwira Seksi Operasi (Pasiops) Kodim 0816/SDA sebagai berikut :

“Kodim 0816/SDA belum pernah melaksanakan supervisi Hanud pasif kepada seluruh unsur Hanud pasif lainnya di Kabupaten Sidoarjo dikarenakan Kodim juga tidak mengetahui peran akan tugas Hanud pasif ini”

Peran akan tugas Kodim sebagai supervisi untuk mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan belum dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan unsur-unsur yang berada di satuan mengenai Hanud pasif.

Dalam pelaksanaan tugas Hanud pasif, Kodim harus memiliki suatu Prosedur Tetap (Protap) tertulis yang merupakan panduan tentang bagaimana mekanisme Hanud pasif dilakukan. Protap bahaya udara mutlak harus dimiliki oleh Kodim sebagai dasar dan acuan bagi unsur-unsur yang berada di dalamnya untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Hanud pasif. Namun kenyataan yang ada saat ini sesuai dengan pernyataan Dandim 0816/SDA sebagai berikut :

“Kodim belum pernah membuat Protap bahaya udara. Protap yang ada di Kodim saat ini adalah Protap penanggulangan bencana alam yang sudah terkoordinasi dengan BPBD dan Protap terhadap perang darat”

Ketiadaan Protap bahaya udara di Kodim 0816/SDA juga diperkuat oleh pernyataan Perwira Seksi Operasi (Pasiops) Kodim 0816/SDA sebagai berikut :

“Saya tidak pernah membuat Protap Bahaya Udara karena memang tidak mengetahui sama sekali mekanisme Hanud pasif. Namun untuk Protap-Protap yang menjadi tugas Kodim sudah kami buat”

Kondisi yang terjadi saat ini mengenai ketiadaan Protap bahaya udara di Kodim 0816/SDA lebih disebabkan karena ketidaktahuan mekanisme

Hanud pasif. Saat ini satuan hanya memiliki Protap-Protap yang berkaitan dengan tugas sesuai program kerja. Protap yang ada saat ini berupa Protap terhadap serangan darat dan Protap penanggulangan bencana alam.

Sistem dan jaring komunikasi semua unsur Hanud pasif harus terintegrasi dalam suatu sistem informasi, sehingga dapat saling memberikan informasi, demikian halnya dengan jaringan sistem senjata pemukul. (Kohanudnas, Protap Opshanud, 2015). Namun yang terjadi saat ini, Sistem dan jaring komunikasi belum terpasang di semua unsur Hanud pasif terutama Kodim 0816/SDA, Pemerintah Daerah dan Polres Sidoarjo. Hal ini diungkapkan oleh Perwira Seksi Operasi (Pasiops) Kodim 0816/SDA sebagai berikut :

“Kodim 0816/SDA tidak memiliki jaringan maupun sistem komunikasi Hanud pasif”

Secara umum peran akan tugas Kodim 0816/SDA baik sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan baik dari Komandan Kodim, Perwira staf dan anggota Kodim 0816/SDA. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan dari Assus Matra Darat Kohanudnas. Tugas-tugas Hanud pasif seperti yang diatur dalam Protap Opshanud yang dikeluarkan oleh Kohanudnas mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pengakhiran belum dilaksanakan.

4.2.2 Analisis Peluang dan Kendala Kodim 0816/SDA Dalam Pelaksanaan Peran Sebagai Unsur Sekaligus Koordinator Pertahanan Udara Pasif

Di dalam pelaksanaan peran yang belum optimal akan tugas sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo, tentunya harus melihat dari kemungkinan peluang yang dimiliki oleh Kodim 0816/SDA. Peluang-peluang yang akan digunakan nantinya dapat berasal dari internal Kodim 0816/SDA maupun peluang dilihat dari faktor

eksternal baik berupa kebijakan maupun kondisi di wilayah kabupaten Sidoarjo dan faktor-faktor penentu lainnya. Berikut ini beberapa peluang yang disampaikan oleh Letkol Inf Fadli Mulyono selaku Dandim 0816/SDA berdasarkan hasil wawancara, sebagai berikut :

“Secara internal terutama personel siap melaksanakan tugas ini, kita memiliki data wilayah yang lengkap dan program pembinaan teritorial juga berjalan cukup baik baik kegiatan Bhakti TNI, Pembinaan Ketahanan Wilayah dan Pembinaan Komunikasi Sosial. Kodim juga memiliki Protap bencana alam dan Protap menghadapi bahaya serangan darat, hal ini mungkin dapat kita sinkronkan terutama di dalam penentuan daerah dan pengungsian. Secara eksternal, koordinasi dan komunikasi antar instansi di Kabupaten Sidoarjo terjalin cukup baik. Forkopimda dan forum-forum komunikasi dan koordinasi lainnya juga sudah berjalan cukup baik. Saya kira ini merupakan peluang jika nantinya satuan memiliki program kerja Hanud pasif”

Sedangkan menurut Kapten Inf Kabul Tarmanto selaku Pasiops Kodim 0816/SDA, peluang yang dimiliki oleh Kodim 0816/SDA baik secara internal maupun dihadapkan dengan peluang secara eksternal adalah sebagai berikut :

“Peluang yang ada kalau saya lihat secara internal adanya beberapa Personel Kodim tepatnya 1 Perwira dan 2 orang Bintara yang pernah mengikuti pendidikan tentang Hanud pasif di Pusdik Arhanud dapat berdayakan untuk memberikan pengetahuan Hanud pasif kepada personel Kodim lainnya. Kodim memiliki Protap penanganan serangan darat dan Bencana alam yang kemungkinan dapat mendukung pembuatan Protap bahaya udara. Program pembinaan teritorial Kodim dapat berjalan dengan cukup baik. Secara ekstenal, hubungan yang baik antar instansi dan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo baik komunikasi dan koordinasi. Keberadaan Pusdiklat Hanudnas di Surabaya dan Pusdik Arhanud juga merupakan peluang yang cukup baik guna pelaksanaan Hanud pasif.

Peluang yang dapat digunakan guna mengoptimalkan peran akan tugas Kodim 0816/SDA dalam pelaksanaan Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo menurut Pasiter Kodim 0816/SDA adalah sebagai berikut :

“Peluang yang dimiliki oleh Kodim 0816/SDA adalah adanya beberapa personel Kodim yang sudah pernah mengikuti pendidikan Hanud pasif di Pusdik Arhanud Karang Ploso-Batu. Selain itu, kegiatan program pembinaan teritorial baik Bhakti TNI, Bintangwil dan Binkomsos sudah berjalan cukup baik di Kabupaten Sidoarjo serta tingginya kesadaran masyarakat khususnya di dalam penanggulangan bencana alam yang menurut saya akan sangat berguna jika diarahkan pada antisipasi terhadap serangan udara. Adanya hubungan komunikasi dan koordinasi yang cukup baik antar instansi merupakan peluang yang sangat baik guna pelaksanaan Hanud pasif nantinya”

Adanya peluang yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan peran akan tugas Hanud pasif juga disampaikan oleh unsur pelaksana teknis di lapangan, seperti yang disampaikan oleh Serda Purwanto selaku Babinsa Ramil 16 Sukodono Kodim 0816/SDA sebagai berikut :

“Kegiatan pembinaan teritorial yang telah berjalan cukup baik di wilayah tanggung jawab saya. Koordinasi dan komunikasi antar instansi sudah tercipta dengan baik. Adanya Protap terhadap serangan darat dan penanggulangan bencana”

Untuk dapat lebih mendukung pernyataan para unsur yang terdapat di Kodim 0816/SDA, berikut disampaikan pernyataan Kolonel Arh M. Hasyim selaku Assus Matra Darat Kohanudnas sebagai berikut :

“Saya pikir perlu dimanfaatkan program latihan dan sosialisasi Hanud pasif baik dari Kohanudnas maupun Kosek-Kosek, manfaatkan program pendidikan baik di Pusdiklat Hanudnas dan Pusdik Arhanud. Manfaatkan hubungan baik dengan seluruh instansi yang berada di daerah baik Pemda, pihak obyek vital, Kepolisian dan masyarakat. Perkuat kegiatan pembinaan teritorial Satkowil TNI AD. Kita tahu bahwa Sistem Pertahanan Negara kita menganut Sishanta yang mana melibatkan seluruh komponen bangsa serta kebijakan dari Panglima TNI sendiri tentang adanya interoperabilitas antar satuan dan seluruh unsur-unsur di dalamnya. Masih banyak peluang yang ada kalau menurut saya”

Secara umum peluang yang dimiliki baik internal maupun eksternal berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan baik oleh Dandim,

Pasiops, pasiter dan Anggota Kodim 0816/SDA serta diperkuat oleh pernyataan dari Assus Matra Darat Kohanudnas adalah sebagai berikut :

- 1 Sistem Pertahanan Negara Indonesia yang menganut Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) dimana hal ini melibatkan seluruh komponen bangsa dan seluruh sumber daya nasional untuk kepentingan Hanudnas;
- 2 Kebijakan Panglima TNI mengenai Operasi Gabungan, dimana seluruh Matra baik satuan TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta POLRI dan instansi pemerintah lainnya harus dapat bersinergi dan memiliki Interoperabilitas;
- 3 Adanya program latihan Hanud Pasif dari Kohanudnas;
- 4 Adanya Pusat Pendidikan dan Latihan Pertahanan Udara Nasional (Pusdiklat Hanudnas) dan Pusdik Arhanud yang menyelenggarakan program pendidikan mengenai Hanud pasif;
- 5 Adanya hubungan yang harmonis antar instansi dan pejabat di wilayah Kabupaten Sidoarjo;
- 6 Adanya Proja sosialisasi tentang Hanud pasif yang dilaksanakan oleh staf operasi Komando Sektor Hanudnas II. Kodim 0816/SDA berada di wilayah tanggung jawab dari Kosekhanudnas II.

Setelah mengetahui peluang-peluang yang ada, Berikut ini beberapa kendala yang dihadapi oleh Kodim 0816/SDA baik secara internal maupun eksternal di dalam pelaksanaan peran akan tugasnya sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif di kabupaten Sidoarjo. Kendala yang ada saat ini menurut Dandim 0816/SDA sebagai berikut :

“Pertama tentunya ketidaktahuan satuan dan personel tentang mekanisme Hanud pasif, jika kita mengetahui dan ada program tentang Hanud pasif tentunya akan kita siapkan dan laksanakan secara maksimal. Kodim juga tidak pernah melaksanakan latihan Hanud pasif. Selain itu, kondisi di wilayah tanggung jawab Kodim yaitu Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak sekali obyek vital nasional yang sampai dengan saat ini belum ditentukan secara jelas oleh Pemerintah Pusat. Penduduk Kabupaten Sidoarjo sangat padat dihadapkan dengan jumlah personel Kodim yang kurang memadai.

Pesatnya pembangunan bidang ekonomi juga menjadi kendala dan hal yang tidak kalah pentingnya adalah belum sinkronnya antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan”

Pernyataan Dandim 0816/SDA tentang kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan dalam pelaksanaan Hanud pasif diperkuat oleh pernyataan Pasiops Kodim 0816/SDA sebagai berikut :

“Jika saya mendengar penjelasan dan melihat mekanisme Hanud pasif dari peneliti dihadapkan dengan kondisi satuan dan wilayah Kabupaten Sidoarjo, kendala-kendala secara internal adalah tingkat pemahaman personel yang ada di satuan tentang Hanud pasif yang sangat minim. Hal ini menyebabkan tidak terlaksananya peran Kodim akan tugas sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif. Ketiadaan sistem dan jaringan informasi serta Posko Hanud pasif di Kodim 0816/SDA juga merupakan kendala. Kemudian secara eksternal, pemahaman yang kurang dari segenap unsur lainnya seperti Pemda, Polri, obyek vital dan masyarakat. Selain itu, perkembangan pembangunan ekonomi yang sangat pesat ditambah dengan kepadatan penduduk di Kabupaten Sidoarjo. Banyaknya obyek vital dan penyebarannya yang tidak teratur semakin menambah rumitnya permasalahan dalam melaksanakan Hanud pasif”

Kendala-kendala dari aspek teritorial seperti yang disampaikan oleh Kapten Arh Bambang Suryono selaku Pasiter Kodim 0816/SDA adalah sebagai berikut :

“Kendala secara internal satuan adalah ketidakpahaman personel Kodim 0816/SDA tentang pelaksanaan Hanud pasif sehingga selama ini tidak pernah melaksanakan perencanaan dan persiapan Hanud pasif. Kodim juga tidak memiliki peranti lunak sebagai dasar dalam pelaksanaan Hanud pasif dan kurangnya personel yang ada saat ini dihadapkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo. Secara eksternal, Pemahaman unsur lainnya baik Pemda, Polri, Obyek vital dan masyarakat tentang Hanud pasif sangat minim. Penyebaran obyek vital, pesatnya pembangunan bidang ekonomi, penyebaran penduduk dan belum sinkronnya antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan merupakan kendala-kendala dalam pelaksanaan Hanud pasif. Wilayah Kodim 0816/SDA memiliki banyak instansi militer baik dari TNI AD, TNI AL

dan TNI AU yang merupakan target dari serangan udara dihadapkan dengan banyaknya pemukiman penduduk di daerah sekitarnya”

Adapun kendala yang terjadi di lapangan mengenai kurang optimalnya pelaksanaan Hanud pasif menurut penyampaian Serda Purwanto selaku Babinsa Ramil 16 Sukodono Kodim 0816/SDA sebagai berikut :

“Kendala-kendala yang saya hadapi adalah ketidakpahaman saya selaku Babinsa tentang Hanud pasif sehingga tidak dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di wilayah tanggung jawab saya. Pesatnya pembangunan dan padatnya penduduk yang ada di wilayah Kecamatan Sukodono serta pemahaman masyarakat tentang Hanud pasif yang sangat terbatas akibat tidak pernah adanya sosialisasi dan penyuluhan mengenai hal tersebut”

Dalam rangka memperkuat informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Komando Kewilayahan TNI AD khususnya Kodim di dalam melaksanakan peran akan tugasnya sebagai unsur dan sekaligus koordinator Hanud pasif di daerah, berikut ini pernyataan yang disampaikan oleh Kolonel Arh M. Hasyim selaku Assus Matra Darat Kohanudnas sebagai berikut :

“Saya melihat personel di Satkowil TNI AD kurang memahami tugasnya, banyak satuan dan daerah yang tidak memiliki Protap bahaya udara, tidak adanya program latihan dan pesatnya pembangunan bidang ekonomi di daerah serta susahnya sinkronisasi antara RTRW Daerah dan RTRW Aspek Pertahanan. Banyak sekali kendala yang terjadi di lapangan”

Secara umum keadaan yang terjadi di lapangan dihadapkan dengan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kodim 0816/SDA dalam pelaksanaan tugas Hanud pasif adalah sebagai berikut :

- 1 Pesatnya pembangunan di bidang ekonomi dan padatnya jumlah penduduk di wilayah tanggung jawab Kodim 0816/SDA dihadapkan dengan keterbatasan jumlah personel satuan;
- 2 Banyaknya Obyek Vital Nasional dan obyek-obyek lainnya baik sipil maupun militer yang merupakan target dari serangan udara

musuh di Kabupaten Sidoarjo. Belum adanya penentuan Obyek Vital Nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah secara jelas. Selain itu, letak Obyek Vital dan instansi militer yang berdekatan dengan daerah pemukiman penduduk yang padat;

- 3 Belum adanya Prosedur Tetap Bahaya Udara di Kabupaten Sidoarjo guna menghadapi ancaman serangan udara. Belum adanya Posko Hanud pasif dan sistem maupun jaringan komunikasi yang digunakan sebagai komando dan pengendalian Hanud pasif;
- 4 Kodim 0816/Sidoarjo dan seluruh unsur Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo tidak mengetahui mekanisme dan tidak pernah melaksanakan latihan pertahanan udara pasif secara utuh serta ketiadaan program latihan di dalam satuan dan program dari Pemerintah Daerah sendiri;
- 5 Belum sinkronnya antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan.

4.2.3 Analisis Strategi Kodim 0816/SDA Sebagai Unsur Sekaligus Koordinator Hanud Pasif Dalam Opshanudnas

Dalam menganalisis strategi guna mengoptimalkan peran Kodim 0816/SDA di dalam pelaksanaan Hanud pasif, hal yang paling utama adalah mengetahui sejauh mana pentingnya peran tersebut dihadapkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Berikut ini disampaikan beberapa pernyataan mengenai pentingnya peran kodim di dalam pelaksanaan Hanud pasif. Pernyataan dari Letkol Inf Fadli Mulyono selaku Komandan Kodim 0816/ SDA yaitu :

“Operasi Hanud pasif sangat penting untuk dilaksanakan mengingat perang dimulai dengan serangan udara. Operasi Hanud pasif sendiri bertujuan untuk dapat mencegah dan mengurangi dampak dari serangan udara. Hal ini sangat penting di dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Saya pribadi sangat mendukung

jika operasi ini dilaksanakan di semua wilayah Indonesia khususnya di wilayah Kodim 0816/SDA”

Sedangkan pernyataan Kapten Inf Kabul Tarwanto selaku Pasiops Kodim 0816/SDA dilihat dari aspek operasi dan latihan adalah sebagai berikut :

“Peran Kodim dalam Operasi Hanud pasif sangat vital dan sepengetahuan saya juga bahwa perang akan dimulai dengan serangan udara. Sehingga peran ini sangat penting guna memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai akibat dari serangan udara. Peran ini juga memerlukan penguatan di masa mendatang”

Pernyataan Kapten Arh Bambang Suryono selaku Pasiter Kodim 0816/SDA dilihat dari aspek teritorial adalah sebagai berikut :

“Sejauh ini memang peran tersebut belum terlaksana di Kodim 0816/SDA. Namun menurut saya, peran Kodim dalam pelaksanaan Hanud pasif sangat baik dan penting. Peran ini perlu dilaksanakan secara optimal dengan terlebih dahulu diberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Hanud pasif kepada seluruh personel satuan. Peran ini sangat penting mengingat perang akan dimulai dengan serangan udara dan kegiatan hanud pasif bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat”

Berikut ini pernyataan Serda Purwanto selaku Babinsa Ramil 16 Sukodono mengenai pentingnya peran Kodim di dalam pelaksanaan Hanud pasif dilihat dari aspek teknis di lapangan :

“Menurut pendapat saya, peran Hanud pasif oleh Kodim sangat bermanfaat terutama di dalam memberikan perlindungan dari serangan udara musuh”

Guna menguatkan pentingnya peran Kodim di dalam melaksanakan perannya dalam Hanud pasif, berikut pernyataan Kolonel Arh M. Hasyim sebagai Assus Matra Darat Kohanudnas, yaitu :

“Peran ini sangat penting dan perlu terus dioptimalkan, memang satuan kewilayahan yang dapat melakukannya karena berkaitan dengan unsur-unsur lain di daerah terutama Pemerintah Daerah. Kita

juga memiliki satuan-satuan Arhanud di daerah sehingga bisa saling bekerjasama dalam melaksanakan tugas”

Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah disampaikan baik oleh unsur-unsur yang berada di Kodim 0816/SDA maupun oleh Assus Matra Darat Kohanudnas tentang pentingnya Kodim di dalam melaksanakan perannya sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif tentunya harus dibuat strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Setiap perang yang terjadi salah satunya adalah dengan melakukan serangan udara terhadap obyek-obyek vital negara sasaran. Hal inilah yang melatarbelakangi perlunya strategi Hanud pasif yang tepat. Tujuan secara umum dari Hanud pasif itu sendiri adalah untuk memberikan perlindungan terhadap akibat dari serangan udara terutama terhadap obyek dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pemahaman akan pengetahuan mengenai mekanisme dan prosedur Hanud pasif oleh semua unsur yang termasuk di dalamnya sesuai dengan doktrin yang telah ditentukan. Manfaatkan semua kekuatan yang ada guna mendapatkan strategi yang komprehensif sehingga dapat berhasil dan berdaya guna khususnya di wilayah Kodim 0816/SDA.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Peran Kodim 0816/SDA Selaku Unsur Sekaligus Koordinator Seluruh Unsur Hanud Pasif Dalam Pelaksanaan Opshanudnas

Dalam Protap Opshanud yang dikeluarkan oleh Kohanudnas mengatakan bahwa Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang dalam hal ini adalah Kodim 0816/SDA ditunjuk sebagai Komandan Unsur Hanud Pasif (Dan Unsur Hanud Pasif). Sedangkan sesuai dengan Bujuknis Hanud Pasif Aspek Darat, Dansatkowil/Dandim 0816/SDA dalam hal ini adalah sebagai Komandan Pusat Koordinasi Hanud Pasif. Hal ini memiliki konsekuensi logis terhadap peran akan tugasnya di dalam pelaksanaan Hanud pasif di wilayah Kabupaten Sidoarjo baik seperti yang diatur di

dalam Protap Opshanud Kohanudnas maupun Bujuknis Hanud Pasif Aspek Darat.

Menurut Soeharto (2002), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka sebenarnya ia telah menjalankan suatu peran. Di dalam Struktur Organisasi Kodim terdapat eselon-eselon yang mengatur tentang tugas dan tanggung jawab. Dimana tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan dengan baik khususnya tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Program Kerja Kodim dalam melaksanakan tugas pokoknya bidang pembinaan teritorial. Namun untuk tugas sebagai Komandan Unsur Hanud Pasif seperti yang diatur dalam Protap Opshanud belum dilaksanakan secara optimal. Komandan Kodim belum melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan peran akan tugasnya dalam pelaksanaan Hanud pasif (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara). Hal ini juga disampaikan oleh Robbin (2001:227), mengartikan peran sebagai “pengaturan mengenai kebiasaan yang diharapkan dari pekerjaan seseorang yang diberikan dalam suatu unit sosial”.

Selanjutnya mengenai Teori peran (*Role Theory*) dapat didefinisikan sebagai “batasan dan pengaturan dari penerapan peran orang yang memegang posisi tertentu yang ditentukan oleh orang yang berada di atasnya baik ke dalam maupun keluar sesuai dengan batasan yang dimiliki organisasi”. Sesuai dengan Protap Opshanud yang dikeluarkan oleh Kohanudnas, bahwa Komandan Kodim 0816/SDA ditunjuk sebagai Dan Unsur Hanud Pasif di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dimana Dan Unsur Hanud Pasif bertanggung jawab kepada satuan di atasnya yaitu Pangkosek Hanudnas II dalam pelaksanaan tugasnya di dalam Operasi Hanud Pasif. Namun mekanisme ini belum berjalan disebabkan karena Kodim 0816/SDA belum pernah melaksanakan operasi maupun latihan Hanud pasif (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara).

Sedangkan menurut Dougherty dan Pritchard (1985) dalam Bauer (2003:55), teori peran dapat memberikan kerangka konseptual dalam perilaku/tindakan di dalam suatu organisasi. Mereka juga menyatakan bahwa peran dapat menciptakan suatu produk sebagai akibat dari tindakan dan perilakunya. Peran akan tugas sebagai unsur Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo menuntut Kodim 0816/SDA harus dapat menciptakan suatu produk berupa Prosedur Tetap Bahaya Udara yang dijadikan sebagai dasar dan pedoman di dalam berbuat dan bertindak dalam rangka mengantisipasi akibat adanya serangan udara lawan (Kohanudnas, Protap Opshanud, 2015). Namun berdasarkan (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara), Kodim 0816/SDA belum pernah membuat Protap Bahaya Udara dalam rangka operasi Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini disebabkan karena Unsur-unsur yang berada di Kodim 0816/SDA tidak mengetahui peran akan tugasnya sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara).

Biddle dan Thomas (1996), menyatakan bahwa teori peran dibagi menjadi empat golongan, yaitu:

- 1 Orang yang mengambil bagian dalam suatu interaksi sosial. Komandan Kodim 0816/SDA selaku Dan Unsur Hanud Pasif merupakan pimpinan di dalam struktur organisasi Hanud Pasif, dimana harus dapat berinteraksi dengan seluruh unsur Hanud pasif lainnya. Interaksi sosial ini juga harus dilakukan oleh personel-personel internal Kodim 0816/SDA seperti pejabat Pasiops, Pasiter dan Babinsa guna mendukung pelaksanaan operasi Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo;
- 2 Perilaku yang kemudian muncul dalam melakukan interaksi tersebut. Perilaku yang diharapkan dari Komandan Kodim 0816/SDA di dalam Hanud pasif adalah dapat berjalannya mekanisme Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan pengorganisasian, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara terus menerus dengan unsur dibawahnya serta

melengkapi segala keperluan guna mendukung pelaksanaannya. Perilaku yang diharapkan dari personel Kodim lainnya seperti pejabat Pasiops adalah dapat mengkoordinir unsur lainnya dalam bidang operasi dan latihan. Pejabat Pasiter harus dapat menciptakan kondisi wilayah yang diharapkan sesuai dengan mekanisme Hanud pasif;

- 3 Kedudukan orang-orang dalam perilaku. Hal ini telah jelas dituangkan di dalam Struktur Organisasi Hanud pasif yang dikeluarkan oleh Kohanudnas. Siapa yang bertindak selaku unsur pendukung dan unsur pelaksana telah diatur sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya;
- 4 Kaitan antara orang dan perilaku. Di dalam susunan organisasi Kodim 0816/SDA terdapat unsur-unsur jabatan yang memiliki spesifikasi peran, tugas dan tanggung jawab yang berbeda guna mendukung kelancaran setiap pelaksanaan tugas satuan.

Selain peran secara personal, ditinjau dari struktur dan fungsional maka peran dalam arti struktur adalah semua tindakan yang harus dilakukan oleh setiap komponen (fungsional) dari suatu institusi demi terwujudnya tujuan (sasaran) yang telah ditetapkan. Jadi dalam pengertian fungsional adalah output dari interaksi sejumlah komponen terhadap suatu sistem/instansi/organisasi. (Salim et al., 1995). Di dalam Struktur Organisasi Hanud pasif baik dari Protap Opshanud maupun Hanud Pasif aspek darat terdapat tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap unsur demi terwujudnya tujuan dari pelaksanaan Hanud pasif. Kodim 0816/SDA yang dalam hal ini adalah Dandim ditunjuk sebagai Dan Unsur Hanud Pasif yang memiliki tugas membentuk organisasi dan menggelar Pos Komando Hanud Pasif di Kabupaten Sidoarjo sebagai Komando Operasi Hanud Pasif. Begitu juga dengan unsur Pemerintah Daerah dan Satuan-satuan Kerja yang ada dibawahnya, unsur Polres Kabupaten Sidoarjo dan unsur Obvitnas. Namun hal ini belum terbentuk dan terlaksana dengan baik. Unsur-unsur Hanud pasif yang berada di

Kabupaten Sidoarjo belum mengetahui akan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan unsur-unsur tersebut mengenai operasi Hanud pasif (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara).

Peran dari tinjauan perilaku organisasi adalah merupakan salah satu komponen dari sistem sosial organisasi (*Organization's social system*) diluar norma dan budaya dari organisasi itu sendiri. Satuan Komando Kewilayahan TNI AD merupakan salah satu organisasi yang berada di daerah dengan tugasnya sebagai unsur sekaligus koordinator dalam pertahanan udara pasif. Scott et al. (1981) dalam **Kanfer** (1987:197), menyatakan terdapat lima aspek penting dari peran, sebagai berikut:

- 1 Peran bersifat impersonal, bahwa posisi peran itu sendiri akan menentukan harapannya bukan individunya. Dalam hal ini, langkah-langkah yang diambil oleh Kodim 0816/SDA di dalam pelaksanaan Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo merupakan harapan yang harus terpenuhi. Personel-personel yang terdapat di Kodim 0816/SDA harus dapat bekerja secara optimal dalam rangka mendukung tugas-tugas Kodim. Satuan atas, instansi lain dan Masyarakat tidak akan pernah melihat personal melainkan sejauh mana organisasi yang dalam hal ini Kodim 0816/SDA melakukan perannya di dalam pelaksanaan Hanud pasif guna mendukung operasi pertahanan udara nasional. Namun harapan tersebut belum terpenuhi oleh Kodim 0816/SDA (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara);
- 2 Peran berkaitan dengan perilaku kerja. Perilaku yang diharapkan dalam suatu pekerjaan tertentu. Sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif, Kodim 0816/SDA harus dapat melaksanakan hal-hal sesuai dengan tugas yang diatur di dalam Protap Opshanud dan Hanud pasif aspek darat. Kodim 0816/SDA harus dapat menentukan kebijakan umum tentang Hanud pasif di wilayah kabupaten Sidoarjo, menentukan kebijakan pelaksanaan pembinaan dan dukungan dalam Hanud pasif, mengkoordinasikan

dan mengendalikan penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya udara di wilayahnya, menghimpun dan menata seluruh kekuatan personel dan materiil dalam rangka mengoptimalkan dukungan Hanud pasif, mengkoordinir pembuatan Protap Hanud pasif, melaksanakan pengawasan terhadap semua unsur di bawahnya dan melakukan koordinasi ke atas, ke samping dan ke bawah serta bertanggung jawab atas terselenggaranya Hanud pasif di wilayah Kabupaten Siodarjo (Bujuknis Hanud Pasif Aspek Darat, 2016). Kodim 0816/SDA belum sepenuhnya melaksanakan tugas-tugas tersebut. Koordinasi yang terjalin dengan cukup baik di wilayah bukan dalam rangka pelaksanaan Hanud pasif melainkan koordinasi tentang tugas-tugas lainnya (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara);

- 3 Peran biasanya sulit dikendalikan. Peran terkadang menyebabkan ambigu atau kebingungan dalam implementasinya. Peran Kodim 0816/SDA dalam penyelenggaraan Hanud pasif di wilayah Kabupaten Siodarjo akan mengalami kesulitan di dalam pelaksanaannya, hal ini disebabkan karena tugas ini tidak dilaksanakan oleh Kodim 0816/SDA secara mandiri. Tugas ini harus dapat bersinergi dengan unsur-unsur lain diluar satuan. Kondisi inilah yang menyebabkan kebingungan di dalam implementasinya karena dituntut adanya pengetahuan dan pemahaman yang sama antar semua unsur. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam pelaksanaan Hanud pasif terutama penentuan daerah, pencegahan urbanisasi, penyebaran obyek vital, pembuatan sistem cadangan, penggunaan komponen cadangan dan komponen pendukung serta tenaga-tenaga lainnya (Protap Opshanud, 2015) akan sedikit bersinggungan dengan penanggulangan akibat serangan darat dan penanggulangan akibat bencana alam (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara);

- 4 Peran dapat dipelajari dengan cepat dan dapat juga menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama. Mekanisme dan pedoman tentang pelaksanaan Hanud pasif telah diatur di dalam Protap Opshanud dan Bujuknis Hanud Pasif Aspek Darat. Kedua referensi tersebut mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing unsur Hanud pasif sehingga dapat dipelajari dengan cepat. Dengan keterlibatan Kodim 0816/SDA di dalam pelaksanaan Hanud pasif khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo tentunya juga akan meyebabkan perubahan perilaku utama. Selain pelaksanaan tugas-tugas sesuai program kerja yang telah ditentukan, Kodim 0816/SDA juga harus merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam operasi Hanud pasif. Segala hal mengenai mekanisme Hanud pasif seperti yang terdapat di dalam Protap Opshanud maupun Bujuknis Hanud Pasif Aspek Darat sejauh ini belum terlaksana (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara);
- 5 Peran dalam suatu pekerjaan tentunya tidaklah sama, seseorang atau organisasi dapat memainkan beberapa peran. Peran akan tugas Kodim 0816/SDA sangat bervariasi dan berbeda-beda. Tugas - tugas Kodim 0816/SDA TA. 2017 dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, tugas Kodim untuk melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, yaitu dengan melakukan Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer selain Perang (OMSP) dan tugas Kodim dalam melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat serta tugas Kodim 0816/SDA itu sendiri dalam Hanud pasif tentunya menuntut tindakan yang berbeda-beda. Tugas-tugas Kodim 0816/SDA diluar tugas Hanud pasif telah dapat dilaksanakan secara optimal. Namun untuk tugas Kodim 0816/SDA di dalam Hanud pasif belum dapat terlaksana (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara).

4.3.2 Peluang dan Kendala Kodim 0816/SDA Dalam Pelaksanaan Peran Sebagai Unsur Sekaligus Koordinator Pertahanan Udara Pasif

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan guna mengoptimalkan peran Kodim 0816/SDA sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo. Sistem Pertahanan Negara Indonesia yang menganut Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) seperti yang tercantum di dalam UU RI Nomor 3 Tahun 2002 dimana hal ini melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Peraturan perundang-undangan ini harus dilaksanakan secara seksama oleh setiap komponen bangsa khususnya unsur-unsur yang termasuk di dalam pelaksanaan Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo. Dasar ini merupakan peluang yang dapat digunakan oleh Kodim 0816/SDA untuk mensinergikan pelaksanaan Hanud pasif dengan unsur lainnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Kebijakan Panglima TNI mengenai Operasi Gabungan, dimana seluruh Matra baik satuan TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta POLRI dan instansi pemerintah lainnya harus dapat bersinergi dan memiliki Interoperabilitas. Dalam beberapa kali kesempatan baik di dalam Rapat Pimpinan TNI & POLRI, Apel Dansat TNI AD, TNI AL dan TNI AU dan pembicara kunci di beberapa lembaga pendidikan baik militer maupun sipil seperti di Lemhanas RI, Sesko TNI dan Sesko Angkatan serta di Universitas-Universitas yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, Panglima TNI senantiasa menekankan tentang pentingnya interoperabilitas di dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal ini tentunya merupakan peluang yang cukup baik untuk digunakan oleh Kodim 0816/SDA dalam perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan Hanud pasif. Kebijakan ini dapat berimplikasi terhadap terciptanya

kesamaan visi dan misi seluruh komponen bangsa untuk bersinergi dalam setiap kegiatan yang terintegrasi.

Adanya program latihan Hanud Pasif dari Kohanudnas. Kohanudnas memiliki program-program latihan baik latihan Hanud aktif maupun latihan Hanud pasif yang dilaksanakan setiap tahun. Salah satu latihan Hanud pasif yang dilaksanakan oleh Kohanudnas adalah latihan Operasi Hanud Pasif “Sarang Petir”. Latihan ini merupakan Operasi Pertahanan Udara Pasif dalam rangka mengamankan objek-objek vital strategis dari ancaman serangan udara musuh di seluruh wilayah Indonesia dengan melaksanakan deteksi dan identifikasi sasaran-sasaran yang dikenal maupun tidak dikenal yang akan mendekati posisi obyek-obyek vital strategis, mencegah serangan udara terhadap obyek-obyek vital strategis, mencegah kerugian yang lebih besar akibat serangan udara dan mewujudkan pengawasan wilayah udara sepanjang waktu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI (Kohanudnas, Superior Air Defence, 2015).

Adanya Pusat Pendidikan dan Latihan Pertahanan Udara Nasional (Pusdiklat Hanudnas) dan Pusdik Arhanud yang menyelenggarakan program pendidikan mengenai Hanud pasif. Keberadaan Pusdiklat Hanudnas di Surabaya dan Pusdik Arhanud dan Karangploso Kota Batu merupakan peluang yang sangat baik jika dimanfaatkan secara optimal oleh Kodim 0816/SDA dalam rangka meningkatkan pengetahuan mengenai Hanud pasif. Pusdiklat Hanudnas memiliki program pendidikan baik Hanud aktif maupun Hanud pasif. Sedangkan Pusdik Arhanud saat ini juga telah memiliki program pendidikan Hanud pasif. Beberapa personel Kodim 0816/SDA baik Perwira maupun Bintara telah mengikuti pendidikan Hanud pasif di Pusdik Arhanud (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara).

Adanya hubungan yang harmonis antar instansi dan pejabat di wilayah Kabupaten Sidoarjo (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara). Kondisi ini dapat dijadikan peluang bagi Kodim 0816/SDA baik dalam rangka pemberian sosialisasi maupun dalam rangka perencanaan,

pengorganisasian maupun pelaksanaan Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo. Komunikasi baik yang tercipta antar instansi juga dapat digunakan oleh Kodim 0816/SDA untuk secara bersama-sama menciptakan suatu SOP atau Protap Bahaya Udara untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dukungan seluruh *Stake Holder* Hanud pasif di wilayah sangat penting guna terciptanya sinergitas pelaksanaan Hanud pasif.

Adanya Proja sosialisasi tentang Hanud pasif yang dilaksanakan oleh Staf Operasi Komando Sektor Hanudnas II. Kodim 0816/SDA berada di wilayah tanggung jawab dari Kosekhanudnas II. Melihat dari tugas-tugas Kosekhanudnas dan Staf Operasi Kosekhanudnas II yaitu Mengkoordinasikan, mengawasi, memberikan pengarahan, terhadap penyelenggaraan sistem operasi Hanud dan memberikan supervisi pada Kaposek terhadap pelaksanaan Operasi Hanud (Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Kosekhanudnas, 2015). Kedua tugas tersebut merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Kodim 0816/SDA. Selain itu, Kosekhanudnas II selalu memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan latihan Hanud pasif kepada seluruh unsur-unsur yang terlibat.

Berdasarkan hasil dari analisis data, kendala-kendala yang dihadapi oleh Kodim 0816/SDA dalam pelaksanaan Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo adalah keterbatasan jumlah personel satuan dihadapkan dengan pesatnya pembangunan di bidang ekonomi dan padatnya jumlah penduduk di wilayah tanggung jawab Kodim 0816/SDA. Teori Kendala / *Theory Of Constraint* (TOC) menyatakan bahwa setiap organisasi menghadapi sumber daya yang terbatas Keterbatasan-keterbatasan ini disebut "Kendala" (constraint). Keterbatasan jumlah personel di Kodim 0816/SDA dapat mengurangi efektifitas pelaksanaan Hanud pasif yang akan dilaksanakan (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara). Pesatnya pembangunan dan jumlah penduduk sesuai data wilayah yang terdapat di Kodim 0816/SDA juga merupakan hambatan yang tidak ringan (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara). Teori Kendala

mengakui bahwa kinerja setiap organisasi dibatasi oleh kendala-kendalanya. Jika hendak memperbaiki kinerjanya, suatu organisasi harus mengidentifikasi kendala-kendalanya, mengeksploitasi kendalanya dalam jangka pendek dan jangka panjang, kemudian menemukan cara untuk mengatasinya. Teori Kendala atau *Theory Of Constraints* (TOC) merupakan sebuah filosofi manajemen yang mula-mula dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt dan dikenalkan dalam bukunya, *The Goal*.

Selanjutnya menurut Hansen dan Mowen (2009), Jenis kendala berdasarkan asalnya dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu kendala internal (*internal constraint*) dan kendala eksternal (*external constraint*). Kendala internal adalah faktor-faktor yang membatasi organisasi yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri. Sedangkan kendala eksternal adalah faktor-faktor yang membatasi organisasi yang berasal dari luar organisasi. Banyaknya Obyek Vital Nasional dan obyek-obyek lainnya baik sipil maupun militer yang merupakan target dari serangan udara musuh di Kabupaten Sidoarjo (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara). Kondisi ini menyebabkan permasalahan yang tidak mudah di dalam melaksanakan peran kodim 0816/SDA akan tugas Hanud pasif. Hal lain yang menambah semakin kompleksnya kendala yang dihadapi oleh Kodim 0816/SDA adalah belum adanya penentuan Obyek Vital Nasional yang diatur dengan Peraturan Perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah secara jelas. Keadaan ini membuat Kodim 0816/SDA akan mengalami permasalahan di dalam kegiatan penentuan daerah,

Selain itu, letak Obyek Vital dan instansi militer yang berdekatan dengan daerah pemukiman penduduk yang padat (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara). Obyek vital dan instansi militer merupakan sasaran atau target dari setiap serangan udara yang dilakukan oleh lawan. Apabila letak dari obyek vital dan instansi militer berdekatan dengan daerah pemukiman masyarakat tentunya memiliki kerawanan yang sangat besar akan timbulnya korban jiwa dari masyarakat pada saat terjadi serangan udara. Selain kerugian korban jiwa, kerugian materiil berupa

hancurnya bangunan perumahan juga tidak dapat dihindari. Kondisi ini lagi-lagi menambah kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi oleh Kodim 0816/SDA dalam pelaksanaan Hanud pasif di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Belum adanya Prosedur Tetap Bahaya Udara di Kabupaten Sidoarjo guna menghadapi ancaman serangan udara. Protap bahaya udara berisi kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang mengatur siapa berbuat apa dalam rangka mengatasi akibat dari serangan udara. Ketiadaan Protap mengindikasikan ketidaktahuan unsur-unsur Hanud pasif dalam rangka melaksanakan tugasnya. Belum adanya Posko Hanud pasif sebagai tempat untuk mengendalikan mekanisme operasi yang akan dilaksanakan. Ketiadaan Pos Komando menyebabkan sulitnya pengendalian operasi Hanud pasif oleh pejabat Komandan/pimpinan operasi. Kendala ini semakin kompleks dengan belum tergelarnya sistem maupun jaringan komunikasi Hanud pasif. Jaringan maupun sistem komunikasi digunakan untuk sarana komunikasi dan koordinasi antar unsur Hanud pasif. Ketiadaan jaringan maupun sistem komunikasi praktis membuat komando dan pengendalian Hanud pasif tidak dapat berjalan.

Kodim 0816/Sidoarjo dan seluruh unsur Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo tidak mengetahui mekanisme dan tidak pernah melaksanakan latihan pertahanan udara pasif secara utuh (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara). Hal ini merupakan kendala terbesar yang dihadapi oleh Kodim 0816/SDA di dalam melaksanakan peran akan tugas operasi Hanud pasif. Hal ini sangat ironis mengingat mekanisme dan ketentuan-ketentuan di dalam operasi Hanud pasif telah diatur secara jelas sejak lama dan sudah tertuang dalam Protap Opshanud yang dikeluarkan oleh Kohanudnas maupun Bujuknis Hanud Pasif Aspek Darat yang dikeluarkan oleh Mabes TNI AD. Kendala tersebut semakin diperbesar dengan tidak adanya program latihan di dalam satuan dan program dari Pemerintah Daerah itu sendiri.

Kendala selanjutnya merupakan kendala klasik yang sampai dengan saat ini belum ada solusi pemecahannya yaitu belum sinkronnya antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara). Kendala ini tidak hanya terjadi di wilayah kodim 0816/SDA, namun terjadi hampir di seluruh wilayah NKRI. Program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo seharusnya tetap memperhatikan aspek pertahanan. Jika hal ini tidak terwujud akan dapat menyebabkan kendala yang sangat berarti bagi Kodim 0816/SDA di dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif.

4.3.3 Strategi Kodim 0816/SDA Sebagai Unsur Sekaligus Koordinator Hanud Pasif Dalam Opshandnas

Setelah mengetahui kendala-kendala atau masalah-masalah yang terjadi baik dari internal maupun eksternal dalam pelaksanaan Hanud pasif, maka dapat diketahui strategi peran akan tugas Kodim 0816/SDA sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mendukung Operasi Pertahanan Udara Nasional. Solihin (2012), mendefinisikan strategi sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kodim 0816/SDA harus memiliki langkah-langkah yang konkrit dalam pencapaian tujuan guna optimalnya peran dalam Hanud pasif berdasarkan tugas yang telah ditentukan. Selanjutnya menurut Jatmiko (2003), strategi dideskripsikan sebagai sebuah cara dimana organisasi akan mencapai tujuan-tujuannya sesuai dengan peluang-peluang yang ada dan ancaman-ancaman di lingkungan eksternal yang dihadapi serta berbagai sumber daya dan kemampuan internal satuan/organisasi, sehingga organisasi yang dalam ini adalah Kodim 0816/SDA dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.

Strategi nantinya juga harus memperhatikan peluang-peluang yang ada sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan. Penentuan Strategi juga didasarkan kepada kemampuan dan batas kemampuan yang ada baik secara internal maupun eksternal. Dengan memperhatikan

faktor-faktor tersebut, diharapkan strategi yang dilakukan dapat menjawab semua permasalahan yang terjadi secara tepat dan komprehensif. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Anthony, Parrewe dan Kacmar (1999), bahwa definisi strategi adalah sebuah formulasi dari misi dan tujuan organisasi, dimana rencana aksi (*action plan*) dalam pencapaian tujuan harus mempertimbangkan kondisi dan pengaruh-pengaruh kekuatan di luar satuan yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi.

Strategi yang dilakukan untuk masalah pesatnya pembangunan di bidang ekonomi dan padatnya jumlah penduduk di wilayah tanggung jawab Kodim 0816/SDA dihadapkan dengan keterbatasan jumlah personel satuan adalah sebagai berikut :

- 1 Melaksanakan pemutakhiran data wilayah Kodim 0816/SDA secara berkesinambungan terutama data-data yang berkaitan dengan Hanud pasif. *Update* data wilayah harus senantiasa dilaksanakan oleh Kodim 0816/SDA dengan tujuan untuk mengetahui setiap perubahan-perubahan kondisi wilayah yang terjadi baik dari aspek geografi, demografi dan kondisi sosial dalam kaitannya dengan perencanaan Hanud pasif yang akan dilaksanakan. Strategi/ upaya ini sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh Kodim 0816/SDA yaitu Mampu menyelenggarakan pandataan Geografi, Demografi, Kondisi Wilayah serta SDA, SDM, dan SDB untuk kepentingan Ruang Alat dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh untuk kepentingan pertahanan negara (Mabesad, 2012);
- 2 Merencanakan dan menyiapkan daerah-daerah yang akan dijadikan tempat pengungsian penduduk jika terjadi serangan udara. Penentuan daerah pengungsiaan semaksimal mungkin tidak jauh berbeda dengan daerah pengungsian yang disiapkan dalam rangka menghadapi perang darat sehingga dapat efektif dan efisien (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara). Rencana

penentuan daerah pengungsian penduduk akibat serangan udara diupayakan dapat sejalan dengan rencana daerah pengungsian akibat serangan darat agar tercipta efektifitas dan efisiensi di dalam pelaksanaannya. Hatten dan hatten (1996) menyatakan bahwa salah satu petunjuk dalam strategi yang dilakukan adalah Setiap organisasi/satuan tidak hanya membuat satu strategi, hal ini tergantung pada ruang lingkup kegiatannya. Apabila kemudian terdapat banyak strategi yang dibuat maka harus strategi yang satu harus konsisten dengan startegi yang lainnya;

- 3 Pemenuhan personel Kodim 0816/SDA agar memiliki tingkat operasional yang tinggi guna mengoptimalkan pelaksanaan Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo. Menurut Nawawi (2003), Sumber daya manusia merupakan faktor yang paling penting untuk menuju misi, tujuan dan pencapaian suatu organisasi. Tanpa adanya personel yang cukup, tugas-tugas kodim 0816/SDA dalam Hanud pasif tidak dapat dijalankan secara optimal. Pemenuhan kekurangan personel Kodim 0816/SDA merupakan salah satu upaya prioritas dihadapkan dengan kepadatan jumlah penduduk yang menjadi tanggung jawab Kodim 0816/SDA.

Strategi yang dapat dilakukan terhadap permasalahan banyaknya Obyek Vital Nasional dan obyek-obyek lainnya baik sipil maupun militer yang merupakan target dari serangan udara musuh di Kabupaten Sidoarjo adalah dengan cara melakukan penyebaran obyek vital. Untuk menghindari kehancuran total, maka obyek-obyek vital perlu disebar, sehingga satu sama lain jaraknya berjauhan (Protap Opshanud, 2015). Manfaatkan adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar pejabat di Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan saran dan masukan khususnya kepada Pemerintah Daerah mengenai pentingnya penyebaran letak Obyek Vital dalam Hanud pasif.

Kemudian untuk permasalahan belum adanya penentuan Obyek Vital Nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan

maupun Peraturan Pemerintah secara jelas (Kohanudnas, Laporan Pelaksanaan Opshanud Pasif “Sarang Petir”, 2016) adalah dengan cara memberikan saran secara berjenjang ke komando atas mengenai pentingnya penentuan obyek-obyek vital nasional yang bernilai strategis yang dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah. Strategi untuk kendala letak Obyek Vital dan instansi militer yang berdekatan dengan daerah pemukiman penduduk yang padat adalah dengan cara meminimalkan daerah pemukiman penduduk di sekitar obyek-obyek rawan yang merupakan target / sasaran serangan udara musuh. Pengembangan pembangunan pemukiman penduduk kedepan harus diupayakan sejauh mungkin dari keberadaan obyek-obyek vital dan obyek-obyek lainnya yang merupakan target dari serangan udara.

Strategi untuk kendala belum adanya Prosedur Tetap Bahaya Udara di Kabupaten Sidoarjo guna menghadapi ancaman serangan udara adalah dengan melaksanakan pembuatan Prosedur Tetap (Protap) bahaya udara terpadu di wilayah Kabupaten Sidoarjo. (Sesuai Protap Opshanud & Hanud Pasif Aspek Darat, format terlampir). Selain itu, pembuatan Prosedur Tetap (Protap) tentang bahaya udara di masing-masing instansi khususnya Obyek vital nasional, instansi militer, dan obyek-obyek lainnya yang merupakan target dari serangan udara musuh juga harus terwujud (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara). Protap bahaya udara baik untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo maupun Protap untuk masing instansi secara internal harus senantiasa dilatihkan secara simultan agar memiliki tingkat operasional yang cukup tinggi.

Belum adanya Posko Hanud pasif dan sistem maupun jaringan komunikasi yang digunakan sebagai komando dan pengendalian Hanud pasif dapat dilaksanakan dengan upaya Menggelar pembentukan Pos Komando Hanud Pasif dan pemasangan jaring komunikasi dan sistem komunikasi yang terintegrasi secara permanen guna kepentingan pelaksanaan operasi Hanud pasif di wilayah Kodim 0816/SDA. Seperti yang disampaikan oleh David (2011), bahwa strategi adalah sarana

bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Pembentukan Posko Hanud Pasif dan penggelaran jaring dan sistem komunikasi Hanud pasif secara permanen bertujuan untuk jangka panjang dalam rangka memudahkan komando dan pengendalian Hanud pasif yang akan dilaksanakan.

Selain itu, melaksanakan koordinasi yang baik dengan seluruh unsur Hanud pasif yang berada di Kabupaten Sidoarjo untuk pemasangan tanda peringatan bahaya udara (Lampiran 1.3, Transkrip Wawancara). Peralatan pendukung pertahanan udara pasif yang digelar di daerah obyek vital atau strategis diantaranya adalah peralatan kamuflase atau penyamaran fasilitas, sirine atau alarm tanda bahaya sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat sekitar, *ambulance*, bunker-bunker persembunyian termasuk didalamnya persediaan makanan dan alat pertahanan diri serta peralatan lainnya. (Kohanudnas, *Superior Air Defence*, 2015).

Strategi berdasarkan permasalahan Kodim 0816/Sidoarjo dan seluruh unsur Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo tidak mengetahui mekanisme Hanud pasif adalah dengan cara sebagai berikut :

- 1 Mengikutsertakan personel Kodim 0816/SDA baik Perwira maupun Bintara untuk mengikuti kursus/ pendidikan Hanud pasif baik di Pusdiklat Hanudnas Surabaya maupun di Pusdik Arhanud Karang Ploso Batu;
- 2 Manfaatkan Program Kerja sosialisasi Hanud pasif yang berada di Kosekhanudnas II oleh perwira staf operasi untuk menambah wawasan mengenai mekanisme Hanud pasif dengan cara pembekalan maupun sosialisasi terhadap personel Kodim 0816/SDA sendiri maupun kepada unsur Pemerintah Daerah, instansi militer lainnya, Polri, Obvitnas, dan masyarakat di Kabupaten Sidoarjo;

- 3 Mengoptimalkan kegiatan bela negara dan sosialisasi wawasan kebangsaan serta pembinaan kepada komponen cadangan dan komponen pendukung guna mendukung pelaksanaan Hanud pasif.

Kenyataan bahwa Kodim 0816/SDA beserta segenap unsur Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo tidak pernah melaksanakan latihan pertahanan udara pasif secara utuh serta ketiadaan program latihan di dalam satuan dan program dari Pemerintah Daerah sendiri, adalah dengan cara :

- 1 Melibatkan Kodim 0816/SDA dan seluruh unsur Hanud pasif terutama Pemerintah Daerah, Polri, Obyek vital nasional dan masyarakat dalam setiap latihan Hanud pasif yang diselenggarakan oleh Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas);
- 2 Adanya program latihan Gladi Posko dan latihan simulasi terpadu tentang Hanud pasif. Hal ini sangat penting mengingat program latihan Hanud pasif dari Kohanudnas tidak dilaksanakan setiap tahunnya di wilayah Kodim 0816/SDA. Selanjutnya adalah adanya sinkronisasi program Hanud pasif Kodim dan seluruh unsur yang berada di wilayah.

Strategi berdasarkan permasalahan belum sinkronnya antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan adalah dengan cara mensinergikan antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan untuk pengembangan pembangunan dimasa mendatang. Sekilas mengenai RTRW seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang merupakan tindak lanjut dari UU Nomor 26/2007 tentang Penataan Ruang khususnya Pasal 18 ayat (3). Permen ini memuat ketentuan teknis muatan rencana tata ruang wilayah Kota serta proses dan prosedur penyusunan rencana tata

ruang wilayah Kota. Namun RTRW yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten/Kota seharusnya selaras dengan Aspek lainnya yang dalam hal ini adalah aspek pertahanan (Penulis tidak mengangkat masalah ini karena luasnya pembahasan).

Keselarasannya antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan kedepan merupakan faktor yang sangat penting dalam rangka menyusun perencanaan pola Hanud pasif yang paling ideal di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mintzberg (2007), yang menyatakan bahwa konsep strategi itu sekurang-kurangnya mencakup 5 hal yang salah satunya adalah pernyataan untuk semakin memperjelas arah yang ditempuh organisasi secara rasional dalam mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang dan suatu perspektif yang menyangkut visi yang terintegrasi antara organisasi dengan lingkungannya yang menjadi batas bagi aktivitasnya.

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- 1 Satuan Komando Kewilayahan TNI AD yang dalam hal ini adalah Kodim 0816/SDA merupakan salah satu unsur sekaligus koordinator pertahanan udara pasif dimana perannya cukup vital. Namun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi terhadap beberapa narasumber menyatakan bahwa tugas-tugas Hanud pasif belum dilaksanakan. Baik Kodim 0816/SDA sendiri maupun unsur-unsur Hanud pasif lainnya tidak mengetahui mekanisme pelaksanaan operasi Hanud pasif.

- 2 Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, terdapat peluang-peluang antara lain : Sistem Pertahanan Negara yang menganut Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) dan adanya kebijakan Panglima TNI tentang terwujudnya interoperabilitas antar semua unsur di dalam setiap pelaksanaan operasi merupakan peluang dari segi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan. Adanya program latihan Hanud Pasif dari Kohanudnas dan program sosialisasi Hanud pasif yang dilaksanakan oleh Staf Operasi Kosekhanudnas II serta keberadaan Pusdiklat Hanudnas dan Pusdik Arhanud yang mengadakan pendidikan Hanud pasif merupakan peluang yang sangat baik guna meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hanud pasif kepada personel Kodim 0816/SDA dan semua unsur Hanud pasif di wilayah kabupaten Sidoarjo. Peluang selanjutnya adalah terciptanya hubungan komunikasi dan

koordinasi yang baik antar pejabat dan instansi di Kabupaten Sidoarjo.

Sedangkan kendala-kendala yang terjadi berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan adalah pesatnya pembangunan dalam bidang ekonomi dan padatnya jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo dihadapkan dengan ketebatan personel Kodim 0816/SDA, banyaknya obyek vital nasional dan obyek-obyek rawan lainnya baik sipil maupun militer serta belum adanya peraturan Perundang-undangan yang jelas mengenai penentuan obyek vital nasional, Belum adanya Prosedur Tetap Bahaya Udara di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Pos Komando serta jaring dan sistem komunikasi Hanud pasif yang permanen. Kendala selanjutnya adalah belum adanya pemahaman dan pengetahuan mengenai mekanisme pelaksanaan Hanud pasif baik Kodim 0816/SDA sendiri maupun segenap unsur lainnya serta ketiadaan program latihan Hanud pasif. Berikutnya adalah kendala klasik yang dihadapi hampir di seluruh wilayah Indonesia yaitu belum sinkronnya antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dengan RTRW Aspek Pertahanan.

- 3 Strategi yang dapat dilakukan berdasarkan peluang dan kendala yang terjadi dihadapkan pada kekuatan dan kelemahan yang ada, antara lain : Melaksanakan pemutakhiran data wilayah Kodim 0816/SDA secara berkesinambungan terutama data-data yang berkaitan dengan Hanud pasif, merencanakan dan menyiapkan daerah-daerah yang akan dijadikan tempat pengungsian penduduk jika terjadi serangan udara. Penentuan daerah pengungsian semaksimal mungkin tidak jauh berbeda dengan daerah pengungsian yang disiapkan dalam rangka menghadapi perang darat sehingga dapat efektif dan efisien serta pemenuhan personel Kodim 0816/SDA agar memiliki tingkat operasional yang tinggi.

Strategi yang kedua adalah melakukan penyebaran obyek vital untuk menghindari kehancuran total, memberikan saran secara berjenjang ke komando atas mengenai pentingnya penentuan obyek-obyek vital nasional yang bernilai strategis yang dituangkan ke dalam Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah serta meminimalkan daerah pemukiman penduduk di sekitar obyek-obyek rawan yang merupakan target / sasaran serangan udara musuh.

Strategi yang ketiga adalah dengan melaksanakan pembuatan Prosedur Tetap (Protap) bahaya udara terpadu di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Protap bahaya udara baik untuk wilayah Kabupaten Sidoarjo maupun Protap untuk masing instansi secara internal harus senantiasa dilatihkan secara simultan agar memiliki tingkat operasional yang cukup tinggi. Menggelar pembentukan Pos Komando Hanud Pasif dan pemasangan jaring komunikasi dan sistem komunikasi yang terintegrasi secara permanen. Melaksanakan pemasangan tanda peringatan bahaya udara dan peralatan pendukung pertahanan udara pasif seperti peralatan kamuflase atau penyamaran fasilitas, sirine atau alarm tanda bahaya sebagai sarana pemberitahuan kepada masyarakat sekitar, *ambulance*, bunker-bunker persembunyian termasuk didalamnya persediaan makanan dan alat pertahanan diri serta peralatan lainnya.

Strategi yang keempat adalah dengan cara mengikutsertakan personel Kodim 0816/SDA untuk mengikuti kursus/ pendidikan Hanud pasif baik di Pusdiklat Hanudnas Surabaya maupun di Pusdik Arhanud Karang Ploso Batu, manfaatkan Program Kerja sosialisasi Hanud pasif yang berada di Kosekhanudnas II, mengoptimalkan kegiatan bela negara dan sosialisasi wawasan kebangsaan serta pembinaan kepada komponen cadangan dan komponen pendukung guna mendukung

pelaksanaan Hanud pasif. Berikutnya adalah dengan melibatkan semua unsur dalam setiap latihan Hanud pasif yang diselenggarakan oleh Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) dan adanya program latihan Gladi Posko dan latihan simulasi terpadu tentang Hanud pasif.

Strategi yang kelima berdasarkan permasalahan belum sinkronnya antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan adalah dengan cara mensinergikan antara RTRW Kabupaten Sidoarjo dan RTRW Aspek Pertahanan untuk pengembangan pembangunan dimasa mendatang.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, Berikut beberapa saran yang dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan peran akan tugas Satkowil TNI AD (Kodim 0816/SDA) sebagai unsur sekaligus koordinator Hanud pasif di Kabupaten Sidoarjo dalam rangka mendukung Operasi Pertahanan Udara Nasional, yaitu :

5.2.1 Saran Teoritis

- 1 Dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Pemerintah tentang obyek-obyek vital nasional yang bernilai startegis secara jelas.
- 2 Adanya pemenuhan peranti lunak mengenai Operasi Pertahanan Udara Pasif di seluruh Satkowil TNI AD khususnya dan semua unsur Hanud pasif di daerah pada umumnya.
- 3 Terciptanya Prosedur Tetap Bahaya Udara baik di lingkungan internal instansi militer, Polri, instansi sipil dan obyek vital nasional serta yang paling penting terciptanya Protap Bahaya Udara di seluruh wilayah Indonesia mulai dari tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota secara terpadu.

5.2.2 Saran Praktis

5.2.2.1 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- 1 Adanya penekanan kembali oleh Pemerintah Pusat mengenai pentingnya sinkronisasi antara RTRW Kabupaten/Kota dan RTRW Aspek Pertahanan dimasa yang akan datang.
- 2 Terciptanya alat peringatan bahaya udara di setiap daerah baik Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

5.2.2.2 Mabes TNI dan Kohanudnas

- 1 Adanya alokasi khusus bagi personel Satuan Komando Kewilayahan TNI AD (Kodim 0816/SDA) dan personel-personel dari unsur Hanud pasif lainnya di Kabupaten Sidoarjo untuk mengikuti pendidikan, kursus dan penataran serta pembekalan tentang Operasi Pertahanan Udara Pasif baik di Pusdiklat Hanudnas maupun di Pusdik Arhanud. Namun secara umum disarankan agar program pendidikan, kursus, penataran dan pembekalan dapat diberikan kepada seluruh unsur-unsur Hanud pasif di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak tentang Operasi Hanud Pasif.
- 2 Adanya program latihan Hanud pasif di seluruh Satkowil TNI AD dengan skala prioritas baik berupa gladi posko maupun latihan simulasi dan keterlibatan seluruh unsur Hanud pasif di daerah dalam setiap program latihan Hanud pasif yang diselenggarakan oleh Kohanudnas.

5.2.2.3 Mabes TNI AD

- 1 Adanya peningkatan level jabatan struktural Dansatkowil TNI AD terutama di Kabupaten/Kota besar yang memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi dari sudut pandang Operasi Hanud Pasif.

Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengorganisasian Hanud Pasif di daerah.

- 2 Adanya penambahan materi Hanud pasif dalam pelaksanaan kegiatan program pembinaan teritorial yang dilakukan oleh Satkowil TNI AD khususnya program pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan perlawanan wilayah.
- 3 Adanya prioritas pemenuhan kekuatan personel di Satuan Komando Kewilayahan TNI AD dimana daerah yang menjadi tanggung jawabnya memiliki tingkat kerawanan cukup tinggi terhadap pelaksanaan pertahanan udara pasif seperti di Kabupaten Sidoarjo.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

- Abdurrasyid, Priyatna. (2008). *Beberapa Bentuk Hukum Udara Sebagai Pengantar Menuju Indonesia Emas*. Jakarta: Fikahati Anesha Bekerja Sama Dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
- Anthony, W.P., Parrewe, P. L., dan Kacmar, K.M. (1999). *Strategic Human Resource Management. Second Edition*. Orlando: Harcourt Brace and Company.
- Arikunto, Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian-Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bauer, Jeffrey C. (2003). *Role Ambiguity and Role Clarity*. Clermont: A Comparison of Attitudes in Germany and The United States
- Biddle, B.B., & Thomas, E.J. (Eds). (1996). *Role Theory: Concept and Research*. New York: Wiley.
- David, Fred R. (2011). *Manajemen Strategis : Konsep*. Jakarta Salemba Empat.
- Eliyahu M. Goldratt and Jeff Cox. (2004). *The Goal: A Process of Ongoing Improvement*. North River Press.
- H. Hadari Nawawi. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Cetakan ke-7*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hansen and Mowen. (2009). *Cost Management: Accounting and Control, 6th Edition*. South-Western.
- Hakim, Chappy. (2011). *Pertahanan Indonesia-Angkatan Perang Negara Kepulauan*. Indonesia: Red and White Publishing.

- Ismail Solihin. (2012). *Manajemen Strategik*. Jakarta : Erlangga
- Jatmiko, Rammad Dwi. (2003). *Manajemen Stratejik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Disahkan Dengan Permenhan RI No. 23 Tahun 2015 Tanggal 20 Nov 2015. Jakarta: Kemenhan RI.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Doktrin Pertahanan Negara*, Disahkan Dengan Permenhan RI No. 38 Tahun 2015 Tanggal 31 Desember 2015. Jakarta:Kemenhan RI.
- Kementerian Pertahanan RI. (2015). *Buku Strategi Pertahanan Negara*, Disahkan Dengan Permenhan No. 24 Tahun 2015 Tanggal 22 November 2015. Jakarta: Kemenhan RI.
- Komando Distrik Militer 0816/SDA. (2017). *Data Wilayah Kodim 0816/Sidoarjo Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial*. Sidoarjo: Kodim 0816/SDA.
- Komando Pertahanan Udara Nasional. (2015). *Prosedur Tetap Operasi Pertahanan Udara*, Disahkan Oleh Keputusan Panglima Kohanudnas Nomor Kep/108/XI/2015 Tanggal 2 November 2015. Jakarta: Kohanudnas.
- Komando Pertahanan Udara Nasional. (2015). *Superior Air Defence System Sebagai Penegak Supremasi Hukum dan Kedaulatan di Wilayah Udara NKRI*. Jakarta: Kohanudnas.
- Komando Pertahanan Udara Nasional. (2016). *Laporan Pelaksanaan Operasi Pertahanan Udara Pasif "Sarang Petir-16" pada Triwulan III TA 2016*. Jakarta: Kohanudnas.

- Mabes TNI AD. (2008). *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Satuan Komando Kewilayahan TNI AD* Disahkan Dengan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/13/III/2008 tanggal 28 Maret 2008. Jakarta: Mabes TNI AD.
- Mabes TNI AD. (2012). *Organisasi dan Tugas Komando Distrik Militer*. Disahkan dengan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/111/XII/2012 Tanggal 12 Desember 2012. Jakarta: Mabes TNI AD.
- Mabes TNI AD. (2016). *Petunjuk Teknis Tentang Pertahanan Udara Pasif Aspek Darat*. Disahkan Dengan Keputusan Kasad Nomor Kep/749/IX/2016 tanggal 7 September 2016. Jakarta: Mabes TNI AD.
- Mabes TNI AU. (2008). *Buku Petunjuk Induk Tentang Operasi Udara*, Disahkan Dengan Perkasau No. Perkasau/24/V/2008 Tanggal 19 Mei 2008. Jakarta: Mabes TNI AU.
- Mabes TNI AU. (2012). *POP dan DSP Simak BMN Kosekhanudnas dan Jajaran*. Disahkan dengan Peraturan Kasau Nomor Perkasau/160/XI/2012 tanggal 6 November 2012. Jakarta: Mabes TNI AU.
- Martono. (2007). *Pengantar Hukum Udara, Nasional dan Internasional, Bagian Pertama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mintzberg, Henry. (2007). *Tracking Strategies : Toward a General Theory*. New York: Oxford Univercity Press Inc.
- Moleong, Lexy.J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan ke-16*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pusdik Arhanud. (2005). *Pertahanan Udara Pasif Aspek Darat, Naskah Sekolah*. Batu: Pusdik Arhanud.

- Pramono, Agus. (2011). *Dasar-dasar Hukum Udara dan Luar Angkasa*. Jakarta; Ghalia.
- Robbin, Stephen. (2001). *Perilaku Organisasi. Jilid 1 dan 2. Terjemahan oleh Tim Indeks*. 2003. Jakarta: PT. Indeks Kelompok Gramedia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kombinasi (mix methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Makmur. (2014). *Tentang Ilmu Pertahanan*. Jakarta: Unhan, Dapur Buku.
- Suradinata, Ermaya. (2005). *Buku Dasar Geopolitik dan Strategi Dalam Kerangka Keutuhan NKRI*. Jakarta: Suara Bebas.

B. Dasar Hukum :

- Sekretariat Negara RI. (2002). *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Sekretariat Negara RI. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Sekretariat Negara RI. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Sekretariat Negara RI. (2009). *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

C. Jurnal :

Arash, Baghdadi and Bakhtiyari, S. Eghtedar. (2014). *An Analilytical Approach to the Issue of Passive Defense in Relation with Preservation of Urban Elements*. Tehran, Iran: Islamic Azad University

Atmaja, Tinton D. Dan Saputra, Hendri M. (2010). *Perancangan Arsitektur Sistem Integrasi Infomasi Pada Jaringan Pertahanan Udara Bergerak*. Bandung: ITB

Easton, Ian. (2014). *Taiwan Defense Strategy in an Age of Precision Strike*. Arlington Virginia: Project 2049 Institute.

Goss, Thomas. (2006). *“Who’s in Charge ?” New Challenges in Homeland Defence and Homeland Security*. USA: The Center for Homeland Defence and Security (CHDS).

Hatten,K. J. and Hatten, M. L. (1996). *“Strategic Groups, Asymmetrical Mobility Barriers, and Contestability,” Strategic Management Journal*. United States of America: Elsevier Inc.

Kanfer, R. (1987). *Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, determinants*. *Journal of Social and Clinics Psychology*.

D. Kamus :

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

E. Media Online :

<https://jodenmot.wordpress.com> site, *Teori Peran, Pengertian, dan Definisi Peran Juni 2005*, Diunduh Pada Tanggal 30 April 2017.

<http://e-journal.uajy.ac.id/1574/3/2EM16271.pdf>, *Konsep Strategi*, Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2017

Miles and Hubberman. (2010). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.

Soeharto, (2002); Soekamto, (1984). *Teori Peran*. elib.unikom.ac.id/files/.../jbptunikompp-gdl-yugodwipra-34109-9-unikom_y-i.pdf. Diunduh pada 09 Juni 2017.